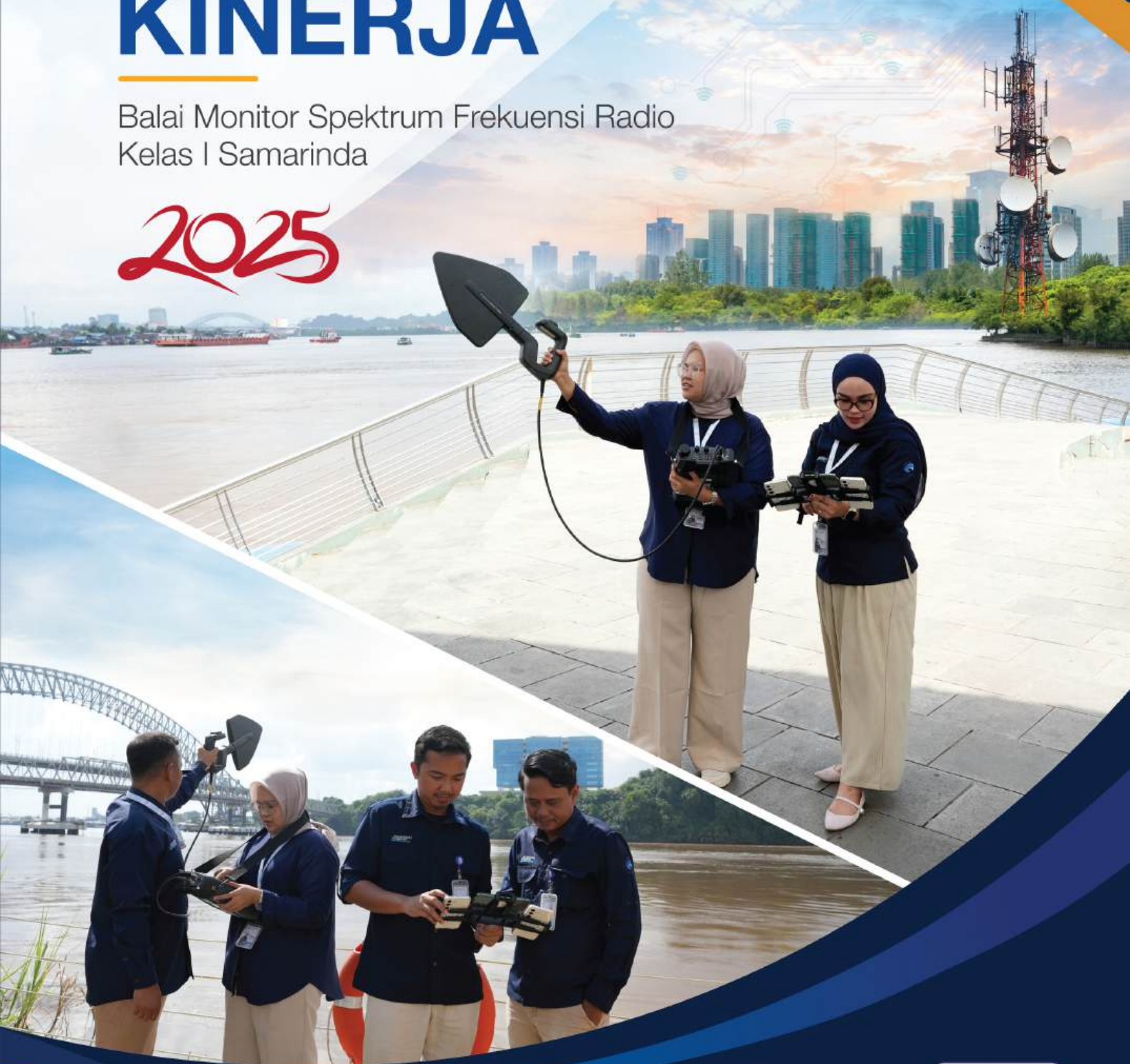


LAPORAN KINERJA

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas I Samarinda

2025



Follow us :

@balmonsamarinda





LAPORAN KINERJA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SAMARINDA
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

2025

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

Peran tersebut dilaksanakan untuk memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, serta bebas dari gangguan interferensi yang dapat menghambat kualitas layanan. Pengelolaan spektrum frekuensi radio merupakan bagian strategis dalam mendukung transformasi digital nasional, peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, serta penguatan konektivitas dan ekosistem ekonomi digital. Dalam konteks tersebut, Balmon Samarinda berperan dalam menjaga

keteraturan spektrum guna mendukung layanan komunikasi, penyiaran, navigasi maritim, penerbangan, serta aktivitas ekonomi dan pemerintahan berbasis teknologi di wilayah Kalimantan Timur. Pada tahun 2025, capaian kinerja Balmon Samarinda diukur melalui 13 indikator kinerja pada aspek pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio serta 2 indikator pada aspek tata kelola birokrasi. Rincian capaian kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.
Penilaian Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

SASARAN KINERJA I				
MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KUALITAS PENGENDALIAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI				
Indikator Kinerja		Target	Capaian	Persentase
1.	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kab/Kota	100%	125%
2.	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
3.	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105.26%
4.	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133.33%
5.	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	95.42%	112.26%
6.	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	99.06%	123.83%
7.	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	125%	125%
8.	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	150%	150%
9.	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
10.	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
11.	Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	122.19%	122.19%
12.	Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	107.22%	107.22%
13.	Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%

RINGKASAN
EKSEKUTIF

SASARAN KEGIATAN II

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DI TJEN INFRASTRUKTUR DIGITAL YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1. Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025	86.95 (Nilai)	85.76	98.63%
2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97 (Nilai)	100	103.09%

Secara umum, seluruh indikator kinerja telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan serta akuntabilitas kinerja instansi, mengingat pada tahun 2025 terjadi perubahan nomenklatur yang menyebabkan perpindahan dari DIPA

Satker Lama ke DIPA Satker Baru. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dalam peningkatan efektivitas pengawasan spektrum frekuensi radio dan penyusunan strategi pengelolaan spektrum ke depan. Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian kinerja ini diuraikan dalam Bab III laporan ini.

Pada Sasaran Program I “MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KUALITAS PENGENDALIAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI” terdapat 13 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Target Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio termonitor kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur adalah 80%. Dilakukan monitoring, identifikasi dan verifikasi pada pita penugasan 10 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025 sehingga telah tercapai target 100%. Capaian ini sesuai target yang telah ditentukan.

2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Target Pemeriksaan Stasiun Radio adalah 100%, untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap stasiun microwave link dan stasiun siaran dengan capaian dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 sebesar 100%. Capaian ini sesuai target yang telah ditentukan.

3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Target Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio adalah 95% aduan gangguan tertangani. Untuk mencapai target tersebut telah dilakukan penanganan terhadap 4 aduan dari total 4 aduan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025 sehingga capaian target mencapai 100%. Capaian ini sesuai target yang telah ditentukan.

4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Target Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital yang ditetapkan sebesar 75%. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan Balmon Samarinda dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025, indikator tersebut telah mencapai 100% dan didapatkan sebanyak 335 perangkat yang telah tersertifikasi termonitor, hal tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Target Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT adalah 85%. Pada tahun 2025 SLA Stasiun Monitor secara keseluruhan sebesar 95.42% melebihi dari target PK yang telah ditetapkan dengan kualitas 100%, sehingga capaian targetnya menjadi 112.26%. Capaian ini melebihi target yang telah ditentukan.

6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

Target Penanganan Sanksi Denda Administratif di UPT adalah 80%. Total invoice Selama tahun 2025 adalah sebanyak 32 invoice, dengan 30 invoice terbayar, 1 invoice belum terbayar (reminder 3) dan 1 invoice belum jatuh tempo, sehingga capaian target untuk indikator

penanganan sanksi denda administratif adalah 99.06%. Capaian ini melebihi target yang telah ditentukan.

7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Target Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang telah ditetapkan sebesar 100% Kabupaten/Kota di wilayah kerja Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengukuran Drive Test dan Static Test yang telah dilakukan Balmon Samarinda dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025, indikator tersebut telah mencapai 100% sesuai rencana dan memenuhi standar Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan.

8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Indikator kinerja kegiatan UNAR berbasis Computer Assisted Test (CAT) ditetapkan sebanyak 6 kali pelaksanaan dengan target capaian 100%. Pada tahun 2025, realisasi pelaksanaan UNAR berbasis CAT mencapai 12 kali kegiatan, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 200%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN ditetapkan sebanyak 1 kali pelaksanaan dengan target capaian 100%. Pada tahun 2025, kegiatan sertifikasi LRC dan IKRAN terealisasi sebanyak 1 kali pelaksanaan, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, berdasarkan realisasi kedua indikator kinerja tersebut, capaian kinerja penyelenggaraan layanan sertifikasi mencapai 150%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 150%.

9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Target kinerja penanganan pencegahan dan pengurangan piutang ditetapkan sebesar 100%, serta koordinasi penanganan piutang yang meliputi kerja sama dengan KPKNL, pengumpulan dokumen penghapusan mutlak, dan pelaksanaan PPNTD dengan target capaian 100%.

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan piutang dilakukan melalui penyampaian dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan rincian tagihan



kepada wajib bayar secara rutin, dengan total tagihan piutang yang ditindaklanjuti sebanyak 704 tagihan. Kegiatan tersebut dilaporkan secara bulanan dari Januari sampai dengan Desember 2025 sebanyak 12 laporan. Berdasarkan realisasi tersebut, capaian kinerja mencapai 100% dan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Selain itu, dilaksanakan kegiatan koordinasi dan pendampingan penagihan piutang yang dilimpahkan kepada KPKNL, pengumpulan dokumen penghapusan mutlak, serta pelaksanaan PPNTD. Kegiatan ini dilaporkan secara triwulanan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 4 laporan. Realisasi kegiatan koordinasi tersebut mencapai 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, berdasarkan realisasi kedua indikator kinerja tersebut, capaian kinerja penanganan pencegahan dan pengurangan piutang mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah memenuhi dan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Capaian ini sesuai dengan target capaian dengan persentase terhadap target sebesar 100%.

10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Target pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik ditetapkan sebesar 100% dengan target minimal 30 peserta. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap standar serta mekanisme pelayanan publik, pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pelayanan publik secara *hybrid* (*online* dan *offline*) sebanyak 1 kali kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 144 orang, yang terdiri atas 75 orang peserta *offline* dan 69 orang peserta *online*.

Berdasarkan realisasi tersebut, capaian kinerja mencapai 100% dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini sesuai dengan target capaian dengan persentase terhadap target sebesar 100%.

11. Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Target pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM/IPKP) ditetapkan sebesar 100%, dengan ketentuan minimal 1 kali pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun, jumlah responden minimal 30 orang, serta target nilai capaian sebesar 3.2 pada skala survei 4.0. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini mengacu pada Peraturan

Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Telah dilaksanakan kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM/IPKP) dengan nilai capaian sebesar 3.91 pada skala survei 4.0 dan jumlah responden sebanyak 43 orang. Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja mencapai 122.19% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini melebihi target capaian dengan persentase terhadap target sebesar 122.19%.

12. Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Target pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik melalui Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) ditetapkan sebesar 100%, dengan ketentuan minimal 1 kali pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun, jumlah responden minimal 30 orang, serta target nilai capaian sebesar 3.6 pada skala survei 4.0. Pelaksanaan survei ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Telah dilaksanakan kegiatan Survei Integritas Pelayanan Publik (IKM/IPKP) dengan nilai capaian sebesar 3.86 pada skala survei 4.0 dan jumlah responden sebanyak 43 orang. Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja mencapai 107.22% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini melebihi target capaian dengan persentase terhadap target sebesar 107.22%.

13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

Target pelaksanaan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi) ditetapkan sebesar 100%, dihitung dari jumlah site ISR tidak sesuai yang telah ditindaklanjuti dibandingkan jumlah site ISR yang tidak sesuai.

Pada tahun 2025, sebanyak 33 site ISR Microwave Link yang tidak sesuai telah berhasil diverifikasi dan telah ditindaklanjuti. Dengan capaian ini, target kinerja terpenuhi sebesar 100%. Capaian ini sesuai target capaian dengan persentase terhadap target sebesar 100%.

Pada Sasaran Program II “MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DIJEN INFRASTRUKTUR DIGITAL YANG EFEKTIF DAN EFISIEN” terdapat 2 (dua) indikator kinerja, berikut ringkasan capaian indikator.

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025

Target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda adalah sebesar 86.95. Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan Desember 2025 sebesar 85.76 atau mencapai 98.63% dari target.

Capaian tersebut masih menunjukkan kinerja yang baik. Nilai yang belum mencapai target dipengaruhi oleh adanya perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, yang berdampak pada peralihan DIPA dari satker lama ke satker baru. Kondisi ini menyebabkan mekanisme penilaian IKPA dihitung secara gabungan, sehingga mempengaruhi nilai akhir yang diperoleh.

Ke depan, dengan kondisi instansi dan pengelolaan anggaran yang telah lebih stabil, diharapkan capaian Nilai Kinerja Anggaran dapat lebih optimal dan memenuhi target yang ditetapkan.

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA adalah 97. Telah dilaksanakan pelaporan keuangan UAKPA sesuai kualitas yang ditargetkan. Capaian indikator nilai kinerja sampai dengan Desember 2025 sebesar 100 atau persentase sebesar 103.09% dari target. Capaian ini melebihi target yang telah ditentukan.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda dapat diselesaikan dengan baik.

LKIP ini merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda selama Tahun Anggaran 2025, yang memuat capaian kinerja secara terukur serta keterkaitannya dengan penggunaan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja instansi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Penyusunan LKIP Tahun 2025 dilakukan secara sistematis dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Balmon Samarinda serta berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Tahun 2025 merupakan periode yang dinamis seiring dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian,

yang turut berdampak pada penyesuaian proses kerja dan pengelolaan anggaran. Namun demikian, seluruh jajaran Balmon Samarinda mampu beradaptasi dengan baik sehingga pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja tetap berjalan optimal.

Melalui laporan ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda menyampaikan hasil kinerja yang dicapai berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025. Diharapkan informasi yang disajikan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Samarinda, Januari 2026
Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas I Samarinda



WARKO

Daftar Isi

2	Ringkasan Eksekutif
8	Kata Pengantar
10	Daftar Isi
11	Daftar Tabel
13	Daftar Bagan
01 PENDAHULUAN	
15	Latar Belakang
16	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
19	Potensi dan Permasalahan Strategis
20	Sistematika Pelaporan
02 PERENCANAAN KINERJA	
23	Rencana Strategis Tahun 2025-2029
25	Sasaran Program
27	Perjanjian Kinerja Tahun 2025
03 AKUNTABILITAS KINERJA	
31	Capaian Kinerja Organisasi
<i>Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi</i>	
32	IK-1.1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
39	IK-1.2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio
48	IK-1.3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio
53	IK-1.4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital
59	IK-1.5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT
66	IK-1.6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif
74	IK-1.7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan
81	IK-1.8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)
89	IK-1.9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio
97	IK-1.10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik
102	IK-1.11. Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)
108	IK-1.12. Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)
113	IK-1.13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)
<i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien</i>	
120	IK-2.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025
142	IK-2.2. Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025
143	Kinerja Lainnya
152	Dampak 5 (Lima) Tahun Terakhir 2021-2025
04 PENUTUP	
160	Penutup

Daftar Tabel

Tabel 1. Penilaian Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	3
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
Tabel 2.2. Anggaran Kegiatan DIPA Lama (Kode Satker 613420) Tahun 2025	28
Tabel 2.3. Anggaran Kegiatan DIPA Baru (Kode Satker 694698) Tahun 2025	29
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	31
Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja 2021-2025	32
Tabel 3.3. Tabel Capaian Kumulatif Tiap Bulan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	33
Tabel 3.4. Tabel Pita Penugasan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	34
Tabel 3.5. Tabel Identifikasi Hasil Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	34
Tabel 3.6. Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya	35
Tabel 3.7. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja 2021-2025	39
Tabel 3.8. Pemeriksaan Stasiun Radio	41
Tabel 3.9. Pemeriksaan secara Remote Site	41
Tabel 3.10. Pemeriksaan secara Open Shelter	42
Tabel 3.11. Pengukuran Stasiun Siaran Radio FM	42
Tabel 3.12. Pengukuran Stasiun Siaran Televisi Digital	42
Tabel 3.13. Tabel Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio Microwavelink (Remote Site)	43
Tabel 3.14. Tabel Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio Microwavelink (Open Shelter)	43
Tabel 3.15. Tabel Rekapitulasi Hasil Pengukuran Stasiun Radio Penyelenggara Penyiaran 2025	44
Tabel 3.16. Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya	44
Tabel 3.17. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja 2021-2025	48
Tabel 3.18. Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2025	49
Tabel 3.19. Jumlah Kegiatan Berdasarkan Dinas Pengguna yang Terganggu	50
Tabel 3.20. Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya	51
Tabel 3.21. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja 2021-2025	53
Tabel 3.22. Hasil Kegiatan Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital per Kabupaten/Kota	54
Tabel 3.23. Hasil Kegiatan Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital per Kabupaten/Kota	55
Tabel 3.24. Identifikasi Hasil Kegiatan Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital Periode Tahun 2025	55
Tabel 3.25. Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya	56
Tabel 3.26. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja 2021-2025	59
Tabel 3.27. Perangkat SMFR yang diperhitungkan dalam pengukuran SLA di UPT Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda	61
Tabel 3.28. Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya	63
Tabel 3.29. Capaian Kumulatif Tiap Bulan Penanganan Sanksi Denda Administratif	68
Tabel 3.30. Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya	69
Tabel 3.31. Tabel Capaian Kumulatif Tiap Bulan Pengukuran Kualitas Layanan	75
Tabel 3.32. Prosedur Penugasan Static Test	75
Tabel 3.33. Identifikasi Hasil Unduh Data (Downlink)	76
Tabel 3.34. Identifikasi Hasil Upload Data (Uplink)	76
Tabel 3.35. Identifikasi Hasil Web Test Browsing Speed (Mbps)	77
Tabel 3.36. Identifikasi Hasil Capacity Speed Test Downlink	77
Tabel 3.37. Identifikasi Hasil Capacity Speed Test Uplink	78
Tabel 3.38. Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya	79
Tabel 3.39. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja	81
Tabel 3.40. Rekapitulasi Total Peserta UNAR Tahun 2025	82
Tabel 3.41. Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya	84
Tabel 3.42. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja	89

Daftar Tabel

Tabel 3.43. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja	90
Tabel 3.44. Rekapitulasi Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Piutang	92
Tabel 3.45. Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya	92
Tabel 3.46. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja	97
Tabel 3.47. Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya	100
Tabel 3.48. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja	102
Tabel 3.49. Detail Nilai Survei Pelayanan Publik per Unsur	103
Tabel 3.50. Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya	104
Tabel 3.51. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja	108
Tabel 3.52. Detail Nilai Survei Integritas Pelayanan Publik per Unsur	109
Tabel 3.53. Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya	109
Tabel 3.54. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja	113
Tabel 3.55. Rekapitulasi Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link (Prima Aksi) Tahun 2025	114
Tabel 3.56. Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya	115
Tabel 3.57. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja	120
Tabel 3.58. Rekapitulasi Deviasi Hal III DIPA Tahun 2025 Satker Lama (613420)	125
Tabel 3.59. Rekapitulasi Deviasi Hal III DIPA Tahun 2025 Satker Baru (694698)	125
Tabel 3.60. Rekapitulasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2025 Satker Lama (613420)	126
Tabel 3.61. Rekapitulasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2025 Satker Baru (694698)	126
Tabel 3.62. Rekapitulasi Belanja Kontraktual Tahun 2025 Satker Lama (613420)	127
Tabel 3.63. Rekapitulasi Belanja Kontraktual Tahun 2025 Satker Baru (694698)	127
Tabel 3.64. Rekapitulasi Penyelesaian Tagihan Tahun 2025 Satker Lama (613420)	128
Tabel 3.65. Rekapitulasi Penyelesaian Tagihan Tahun 2025 Satker Baru (694698)	128
Tabel 3.66. Rekapitulasi Detail Indikator Kinerja Pengelolaan UP dan TUP Tahun 2025 Satker Lama (613420)	129
Tabel 3.67. Rekapitulasi Detail Indikator Kinerja Pengelolaan UP dan TUP Tahun 2025 Satker Baru (694698)	129
Tabel 3.68. Rekapitulasi Capaian Output Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 DIPA Satker Lama (613420)	130
Tabel 3.69. Rekapitulasi Capaian Output Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 DIPA Satker Baru (694698)	130
Tabel 3.70. Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2025 DIPA Satker Lama (613420)	133
Tabel 3.71. Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2025 DIPA Satker Baru (694698)	134
Tabel 3.72. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana TA 2025 Satker Lama (613420)	135
Tabel 3.73. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana TA 2025 Satker Baru (694698)	135
Tabel 3.74. Realisasi Belanja Per-Jenis Kegiatan TA 2025 Satker Lama (613420)	136
Tabel 3.75. Realisasi Belanja Per-Jenis Kegiatan TA 2025 Satker Baru (694698)	136
Tabel 3.76. Formulasi Perhitungan Nilai UAKPA Tahun 2025	142
Tabel 3.77. Jumlah PNS Yang Mendapatkan Kenaikan Pangkat TA. 2025	144
Tabel 3.78. Data Kenaikan Gaji Berkala ASN Selama Tahun 2025	144
Tabel 3.79. Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya	145
Tabel 3.80. Data Pegawai Yang Mengikuti Diklat/Bimtek Teknis	145
Tabel 3.81. Neraca BMN Balmon SFR Kelas I Samarinda Tahun 2025	148
Tabel 3.82. Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan Jenis Transaksi Periode s.d 31 Desember 2025	148
Tabel 3.83. Rekapitulasi Naskah Dinas Tahun 2025	150
Tabel 3.84. Rekapitulasi Bulanan Naskah Dinas Tahun 2025	150

Daftar Bagan

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Balai Monitor Kelas I Samarinda	16
Bagan 3.1. Penanganan Sanksi Administratif	68
Bagan 3.2. Persentase Peserta UNAR Tahun 2025	83
Bagan 3.3. Persentase Kelulusan Peserta UNAR Tahun 2025	83
Bagan 3.4. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker pada Aplikasi Monev Kemenkeu	122
Bagan 3.5. Jadwal Pemutakhiran RPD Hal III DIPA	125
Bagan 3.6. Persentase Realisasi Anggaran 2025 DIPA Satker Lama (613420)	132
Bagan 3.7. Peta Jabatan Balai Monitor SFR Kelas I Samarinda Tahun 2025	143
Bagan 3.8. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2025	143
Bagan 3.9. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	143
Bagan 3.10. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	144

Daftar Grafik

Grafik 3.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2025	50
Grafik 3.2. Jumlah Kegiatan Berdasarkan Dinas Pengguna yang Terganggu	50
Grafik 3.3. Capaian Berfungsinya Perangkat SMFR dalam Perhitungan Service Level Agreement (SLA)	62
Grafik 3.4. Identifikasi Hasil Unduh Data (Downlink)	76
Grafik 3.5. Identifikasi Hasil Unduh Data (Uplink)	76
Grafik 3.6. Identifikasi Hasil Web Test Browsing Speed (Mbps)	77
Grafik 3.7. Identifikasi Hasil Capacity Speed Test Downlink	78
Grafik 3.8. Identifikasi Hasil Capacity Speed Test Uplink	78
Grafik 3.9. Rekapitulasi Peserta UNAR Tahun 2025	83
Grafik 3.10. Pendistribusian SPP/RT Tahun 2025	91
Grafik 3.11. Rincian Responden Survei Kepuasan Masyarakat (IKM/IPKP)	104
Grafik 3.12. Rincian Responden Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	109
Grafik 3.13. Data ISR Microwave Link (Prima Aksi) Tahun 2025 yang Telah ditindaklanjuti	114
Grafik 3.14. Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2025 Satker Lama (613420)	126
Grafik 3.15. Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2025 Satker Baru (694698)	127
Grafik 3.16. Capaian Nilai Smart pada aplikasi E-Monev Smart	131
Grafik 3.17. Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dan TA 2025	133
Grafik 3.18. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TA 2025 DIPA Satker Lama (613420)	134
Grafik 3.19. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TA 2025 DIPA Satker Baru (694698)	134
Grafik 3.20. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana TA 2025 Satker Lama (613420)	135
Grafik 3.21. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana TA 2025 Satker Baru (694698)	135
Grafik 3.22. Benchmark Capaian Kinerja IK-2.1 Tahun 2025	137
Grafik 3.23. Jumlah Unit Transaksi BMN Berdasarkan Transaksi	149
Grafik 3.24. Jumlah Bulanan Naskah Dinas Tahun 2025	150



01

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Potensi dan Permasalahan Strategis
- D. Sistematika Pelaporan

”

Spektrum frekuensi radio merupakan salah satu sumber daya alam yang terbatas dan memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional

”

A. LATAR BELAKANG

Spektrum frekuensi radio merupakan salah satu sumber daya alam yang terbatas dan memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional, setara dengan sumber daya lainnya seperti lahan, minyak, dan air. Oleh karena itu, pengelolaan spektrum frekuensi radio harus dilakukan secara efisien, optimal, dan ekonomis guna mendukung berbagai sektor, antara lain pertahanan dan keamanan, maritim, penerbangan, komunikasi seluler, internet pita lebar, penyiaran, serta pengembangan ekosistem digital.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang pada tahun 2025 mengalami perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada Kementerian Komunikasi dan Digital, memiliki mandat untuk mengelola dan mengawasi penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan tugasnya, Balmon Samarinda melaksanakan kegiatan monitoring, inspeksi, penertiban, pengukuran, serta pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta meminimalkan

potensi interferensi yang dapat mengganggu layanan telekomunikasi.

Tahun 2025 merupakan periode yang dinamis seiring dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian yang berdampak pada penyesuaian proses kerja dan pengelolaan anggaran. Namun demikian, Balmon Samarinda tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal serta menjaga kinerja organisasi tetap berjalan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini bertujuan untuk:

1. Mengukur kinerja Balmon Samarinda berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Menyajikan evaluasi atas capaian program dan kegiatan dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio.
3. Memberikan informasi akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai efektivitas pelaksanaan tugas Balmon Samarinda.
4. Menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja dan kebijakan pada tahun berikutnya.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai capaian, tantangan, serta langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, sehingga terwujud tata kelola spektrum yang semakin tertib, optimal, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program;
 - pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
 - penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika;
- pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
 - penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
 - pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
 - pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
 - pelaksanaan ujian amatir radio; dan
 - pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Bagan 1.1.
Struktur Organisasi Balai Monitor Kelas I Samarinda



Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda terdiri dari:

1. Subbagian Umum



Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan hubungan masyarakat.

2. Tim Kerja Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi



- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pengukuran, pemeriksaan stasiun radio, dan pemantauan penggunaan SFR serta pemenuhan standarisasi APT dan infrastruktur digital lainnya;
- Pemantauan dan evaluasi penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital lainnya;
- Pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- Pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum di bidang pengendalian SFR, pemenuhan standarisasi APT, serta penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- Pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio;

- Pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang hasil penertiban SFR/APT;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan penertiban SFR/APT dan penanganan gangguan SFR; dan
- Pengenaan sanksi denda administratif atas pelanggaran penggunaan SFR dan/atau sertifikat APT.

3. Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan



- Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio dan perangkat ukur kualitas layanan;
- Pelaksanaan ketersediaan perangkat monitor frekuensi radio dan perangkat ukur kualitas layanan;
- Pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
- Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan SFR;
- Pelaksanaan ujian amatir radio dan sertifikasi izin komunikasi radio perikanan;
- Pelaksanaan konsultasi perizinan bidang SFR, sertifikasi operator radio, dan sertifikasi APT, serta penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- Pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik mengenai frekuensi radio; dan
- Pelaksanaan survei IKM/IPKP dan survei IIPP/IPAK.

4. Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital



- Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital;
- Pengelolaan data hasil pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital;
- Melakukan pembaharuan data kualitas layanan infrastruktur digital ke dalam aplikasi PMT;
- Pengukuran parameter teknis stasiun siaran;
- Pemeriksaan stasiun radio microwave link untuk seluler; dan
- Verifikasi site *microwave link* (Prima Aksi).

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan Kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 10 kabupaten/kota dengan luas wilayah sekitar 127.346,92 km² dan jumlah penduduk sekitar 4,1 juta jiwa (2024). Sebagai wilayah penyangga sekaligus lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas dan transformasi digital nasional.

Meningkatnya pembangunan infrastruktur, aktivitas industri, serta penggunaan layanan telekomunikasi mendorong kebutuhan spektrum frekuensi radio yang semakin tinggi. Kondisi ini menuntut pengelolaan spektrum yang tertib, optimal, dan bebas dari gangguan agar kualitas layanan komunikasi tetap terjaga.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Balmon Samarinda masih menghadapi beberapa permasalahan strategis, antara lain:

- Peningkatan kebutuhan spektrum untuk layanan broadband dan komunikasi digital;
- Potensi interferensi akibat kepadatan penggunaan frekuensi;

- Masih ditemukannya penggunaan frekuensi tanpa izin (ISR) dan perangkat tidak sesuai standar;
- Luasnya wilayah kerja dan kondisi geografis yang menantang dalam pelaksanaan monitoring;
- Keterbatasan sarana prasarana dan SDM monitoring; serta
- Kebutuhan peningkatan pengawasan kualitas layanan infrastruktur digital.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Balmon Samarinda terus memperkuat pengawasan dan pengendalian spektrum melalui kegiatan monitoring, penertiban, peningkatan layanan publik, serta sinergi dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, pengelolaan spektrum diharapkan semakin optimal dalam mendukung konektivitas dan pembangunan digital di wilayah Kalimantan Timur.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Komunikasi

dan Informatika Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda meliputi :





02

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029
- B. Sasaran Program
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Sumber daya spektrum frekuensi radio merupakan aset publik yang bersifat terbatas dan strategis, sehingga pengelolaannya memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta peningkatan kualitas dan kecepatan layanan digital. Pengelolaan spektrum frekuensi radio tersebut selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital yang berkomitmen mendorong Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita. Transformasi digital ini diarahkan untuk mewujudkan konektivitas bermakna yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, membangun ekosistem digital yang memberdayakan, serta menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat. Upaya tersebut mencakup pengembangan pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital, yang didukung oleh tata kelola digital yang kuat, pengembangan ekosistem *start-up*, industri game, serta pemanfaatan teknologi digital baru (*emerging technologies*).

Infrastruktur digital yang meliputi broadband, spektrum dan orbit satelit, perangkat TIK, telekomunikasi khusus, serta data center merupakan fondasi utama dalam mendukung transformasi digital nasional. Selain itu, komunikasi publik, pengendalian dan pengawasan ruang digital, serta penguatan internal manajemen menjadi faktor pendukung agar pelaksanaan kebijakan dan program berjalan efektif dan efisien. Melalui kerangka tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong terwujudnya transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaulat dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Kementerian Komdigi memiliki sembilan sasaran strategis, antara lain:

1. Mempercepat penyediaan konektivitas broadband inklusif, berkualitas, dan terjangkau.
2. Mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional.
4. Mengakselerasi kualitas dan produktivitas masyarakat digital.
5. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric
6. Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi.
8. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik.

9. Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien.

Berdasarkan sembilan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) memperoleh mandat utama untuk mendukung pencapaian empat Sasaran Strategis. **Sasaran Strategis 1**, yaitu mempercepat penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau. Peran ini dilaksanakan melalui perencanaan dan pengembangan infrastruktur digital yang terintegrasi dan berkelanjutan, penguatan tata kelola data pembangunan infrastruktur digital, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, serta peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. DJID juga mendorong pemerataan akses internet, termasuk di wilayah prioritas dan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, serta melakukan pengendalian pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kebijakan tarif guna menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi dan peningkatan kualitas layanan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan **Sasaran Strategis 2**, yaitu mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional, DJID berperan memastikan ketersediaan dan keandalan infrastruktur komunikasi yang mendukung layanan strategis pemerintah, khususnya dalam perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini dilaksanakan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, harmonisasi regulasi, serta fasilitasi pengembangan infrastruktur TIK di daerah. DJID juga mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan sistem komunikasi nasional melalui penguatan standar operasional, redundansi sistem, serta peningkatan kualitas layanan komunikasi khusus agar tetap andal dalam kondisi darurat maupun bencana, sehingga kesinambungan layanan publik yang bersifat vital tetap terjaga dan mampu mendukung respons cepat pemerintah dalam situasi krisis secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Kemudian dalam rangka mendukung **Sasaran Strategis 7**, yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kementerian Komunikasi dan Digital, DJID berperan dalam memastikan terselenggaranya layanan publik bidang infrastruktur dan perangkat digital yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Peran ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas proses pelayanan, penguatan standar layanan, serta pemanfaatan sistem digital guna mendukung kemudahan akses dan kepastian layanan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, DJID bertanggung jawab dalam pengelolaan PNBPN bidang

infrastruktur digital secara akuntabel dan optimal, serta menjaga integritas pelayanan publik.

Adapun dalam mendukung **Sasaran Strategis 9**, yaitu mewujudkan transformasi internal manajemen yang adaptif dan resilien. Peran ini dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi, penguatan manajemen kinerja, pengelolaan risiko, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi manajemen untuk mendukung proses kerja yang lebih agile dan responsif. DJID juga mendorong implementasi reformasi birokrasi tematik secara konsisten sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang profesional, akuntabel, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui persentase implementasi reformasi birokrasi di lingkungan DJID.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, DJID menetapkan dua program utama, yaitu Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital serta Program Dukungan Manajemen. Kedua program ini dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang mencakup penataan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, standarisasi perangkat digital, monitoring dan pengendalian kualitas layanan telekomunikasi, penyelenggaraan layanan publik bidang sumber daya dan perangkat digital, serta penguatan tata kelola, pengawasan internal, dan pengelolaan keuangan serta barang milik negara. Program dan kegiatan tersebut dirancang untuk memastikan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang andal sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan tugas organisasi.

Selanjutnya, sebagai bentuk penjabaran operasional dari program dan kegiatan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) di tingkat pelaksana teknis, ditetapkan Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Balai Monitor SFR Kelas I Samarinda. Perjanjian kinerja ini memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, serta target yang telah diselaraskan dengan kebijakan dan arah strategis DJID, sehingga menjadi pedoman utama bagi UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui perjanjian kinerja tersebut, UPT diarahkan untuk melaksanakan pengendalian spektrum frekuensi radio, pengawasan perangkat dan menjaga kualitas layanan telekomunikasi, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik secara terukur dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian kinerja UPT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian sasaran strategis DJID dan Kementerian Komunikasi dan Digital secara keseluruhan.



B. SASARAN PROGRAM

Sebagai tindak lanjut atas tujuan dan sasaran strategis serta program yang telah ditetapkan, Balai Monitor SFR Kelas I Samarinda menetapkan sasaran kegiatan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan kegiatan dalam satu tahun perencanaan. Setiap sasaran kegiatan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, yang digunakan sebagai dasar evaluasi atas capaian kinerja unit kerja selama periode perencanaan.

I. MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KUALITAS PENGENDALIAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI.

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran kegiatan ini, terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja yang akan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan sasaran kegiatan ini, yaitu:

1. Persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio dengan **target 80%**;
2. Persentase (%) pemeriksaan stasiun radio dengan **target 100%**;
3. Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dengan **target 95%**;
4. Persentase (%) tingkat kepatuhan standar teknis Alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital dengan **target 75%**;
5. Persentase (%) terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT dengan **target 85%**;
6. Persentase (%) penanganan sanksi denda administrasi dengan **target 80%**;
7. Persentase (%) tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan dengan **target 80%**;
8. Persentase (%) penyelenggaraan layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTSIKRAN) dengan **target 100%**;
9. Persentase (%) pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio dengan **target 100%**;
10. Persentase (%) sosialisasi pelayanan publik dengan **target 100%**;
11. Persentase (%) pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik (IKM/IPKP) dengan **target 100%**;
12. Persentase (%) pelaksanaan survei integritas pelayanan publik (IIPP/IPAK) dengan **target 100%**;
13. Persentase (%) tindak lanjut verifikasi site ISR *microwave link* yang tidak sesuai (PrimaAksi) dengan **target 100%**.

II. MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN.

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran kegiatan kedua, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang akan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan sasaran kegiatan ini.

1. Nilai kinerja anggaran balai/loka Tahun 2025 dengan target 86.95. Yang menjadi indikator penilaian nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan UP/TUP, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, deviasi halaman III DIPA, revisi DIPA, capaian output, dan penyerapan anggaran.

2. Nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan target 97. Yang menjadi indikator penilaian nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA adalah jumlah transaksi koreksi audit, kesalahan penggunaan akun belanja, saldo kas di bendahara pengeluaran/penerimaan akhir tahun, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke entitas pelaporan, hasil penilaian PIPK, dan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penilaian PIPK.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran program pada poin sebelumnya diwujudkan melalui Perjanjian Kinerja UPT. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, pemberi amanah adalah Ditjen Infrastruktur Digital sedangkan penerima amanah adalah Balmon Kelas I Samarinda. PK disusun untuk menciptakan tolok ukur penilaian atas kinerja penerima amanah sehingga dapat dilakukan evaluasi atas keberhasilan/kegagalan pencapaian unit kerja penerima amanah atas indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun PK Tahun 2025 antara Ditjen Infrastruktur Digital dengan Balmon Kelas I Samarinda dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

KINERJA I		
MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KUALITAS PENGENDALIAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI		
Indikator Kinerja	Target	
1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio		80% Kab / Kota
2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio		100%
3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio		95%
4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/ atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital		75%
5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT		85%
6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif		80%
7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan		100%
8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)		100%
9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio		100%
10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik		100%
11. Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)		100%
12. Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)		100%
13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)		100%
KINERJA II		
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DJITEN INFRASTRUKTUR DIGITAL YANG EFEKTIF DAN EFISIEN		
Indikator Kinerja	Target	
1. Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025		86.95 (Nilai)
2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)		97 (Nilai)

Untuk tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas I Samarinda menetapkan pagu awal sebesar Rp 15.335.140.000. Dengan adanya blokir/refocusing/revisi dan berlakunya nomenklatur serta SOTK baru, DIPA terbagi menjadi dua, yaitu Rp 4.886.438.000 untuk DIPA lama (**kode satker 613420**) dan Rp 9.744.089.000 untuk DIPA baru (**kode satker 694698**) yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 2.2.
Anggaran Kegiatan DIPA Lama (**Kode Satker 613420**) Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran	
1. Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio	Rp.	704.367.000,-
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Rp.	4.182.071.000,-
Total Anggaran	Rp.	4.886.438.000,-

Tabel 2.3.
Anggaran Kegiatan DIPA Baru (**Kode Satker 694698**) Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran	
1. Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio	Rp.	2.049.320.000,-
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Rp.	7.694.769.000,-
Total Anggaran	Rp.	9.744.089.000,-





03

AKUNTABILITAS
KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Kinerja Lainnya
- C. Dampak 5 (lima) Tahun Terakhir (2021-2025)

”
Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2025 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran kegiatan/program yang ingin dicapai oleh Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda
”

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Tahun 2025

KINERJA I		
MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KUALITAS PENGENDALIAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI		
Indikator Kinerja	Target	Capaian
1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kab / Kota	100%
2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%
3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%
4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%
5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	95.42%
6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	99.06%
7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	125%
8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	150%
9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%
10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%
11. Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	122.19%
12. Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	107.22%
13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	100%	100%

KINERJA II		
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DI TJEN INFRASTRUKTUR DIGITAL YANG EFEKTIF DAN EFISIEN		
Indikator Kinerja	Target	Capaian
1. Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025	86.95 (Nilai)	85.76
2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97 (Nilai)	100

SASARAN PROGRAM I

MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

terdapat 13 Indikator Kinerja, berikut penjelasan rinci pencapaian masing-masing indikator:

1. INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE (%) MONITORING PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO



Target indikator kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada tahun 2025 adalah **80%** dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja.

Target indikator kinerja di atas mengacu pada Perjanjian Kinerja masing-masing tahun, yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMN. Perbandingan capaian dilakukan terhadap periode 2021–2025 untuk melihat perkembangan kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 3.2.
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja 2021-2025

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%

a. Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan telekomunikasi, penyiaran, navigasi, maritim, pertahanan, serta berbagai layanan publik lainnya. Karena sifatnya yang terbatas dan strategis, pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan bebas dari gangguan menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya kualitas layanan telekomunikasi yang andal di setiap wilayah.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis frekuensi radio, potensi terjadinya penggunaan frekuensi tanpa izin, penyimpangan parameter teknis, interferensi antar pengguna, serta ketidaksesuaian



penggunaan dengan peruntukannya juga semakin tinggi. Kondisi ini menuntut adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian yang sistematis melalui monitoring spektrum frekuensi radio secara berkala dan terukur.

Kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap pemanfaatan frekuensi telah sesuai dengan perizinan, ketentuan teknis, serta tidak menimbulkan gangguan yang merugikan pengguna lain maupun masyarakat.

Pelaksanaan monitoring ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan spektrum frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan-peraturan turunannya. Aturan-aturan ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, indikator Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio disusun untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio telah dilakukan secara efektif di wilayah kerja, guna menjamin tertib spektrum, meminimalkan potensi gangguan, dan mendukung kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah memonitor penggunaan spektrum frekuensi radio di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota, selama tahun anggaran 2025.

c. Capaian Target

Berdasarkan Perjanjian Kinerja UPT di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Tahun 2025, target untuk IK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yaitu 80% Kab/Kota termonitor. Kegiatan monitoring ini dilakukan pada 15 pita frekuensi sesuai penugasan, menggunakan Stasiun Tetap/Transportable, Stasiun Bergerak, atau Perangkat Jinjing. Target yang dimonitor yaitu minimal 60% dari ISR yang telah ditetapkan mengacu pada aplikasi Report Online (ROL) dan 80% hasil monitor SFR harus teridentifikasi. Adapun perhitungan untuk capaian ini sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten atau Kota termonitor}}{\text{Total Kabupaten atau Kota di wilayah kerja UPT}}$$

- CAPAIAN KOMULATIF TIAP BULAN

Tabel 3.3.
Tabel Capaian Kumulatif Tiap Bulan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kab/Kota	
Bulan	% Capaian
Januari	0.0%
Februari	0.0%
Maret	20.0%
April	20.0%
Mei	30.0%
Juni	30.0%
Juli	30.0%
Agustus	50.0%
September	80.0%
Oktober	90.0%
November	100.0%
Desember	100.0%

- PITA PENUGASAN

Tabel 3.4.

Tabel Pita Penugasan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

No.	Subservis	Pita Frekuensi Radio (MHz)
1.	Radio FM, DRM	87 – 108
2.	Penerbangan VHF	108 – 137
3.	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik, Maritim VHF	137 – 174
4.	DRM, DAB	174 – 230
5.	Tetap,Bergerak, Marabahaya	300 – 430
6.	Komrad UHF	430 – 460
7.	Tetap,Bergerak	460 – 470
8.	Televisi UHF	478 – 806
9.	Trunking, Downlink Seluler 800	806 – 880
10.	Downlink Seluler 900	925 – 960
11.	International Mobile Telecommunication (IMT)	1427 – 1518
12.	Downlink Seluler 1800	1805 – 1880
13.	Downlink Seluler 2100	2110 – 2170
14.	International Mobile Telecommunication (IMT)	2170 – 2200
15.	Seluler, Broadband 2.3 GHz	2300 – 2400

- IDENTIFIKASI HASIL

Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kab/kota pada 15 pita penugasan, ditargetkan termonitor minimal 60% dari ISR yang telah ditetapkan mengacu pada aplikasi Report Online (ROL) dan 80% hasil monitor SFR harus teridentifikasi. Hasilnya ditemukan sebanyak 1795 ISR termonitor dari target sebanyak 1487 ISR atau sebesar 120.71% ISR telah termonitor. Serta sebanyak 10659 penggunaan frekuensi radio telah teridentifikasi dari total 10703 penggunaan frekuensi radio yang termonitor atau sebesar 99.58%. Dari hasil ini, diperoleh persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota sebesar 100%.

Tabel 3.5.

Tabel Identifikasi Hasil Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025				
Kabupaten/Kota	Total ISR Target	Total ISR Termonitor	Total Termonitor	Total Teridentifikasi
Kutai Kartanegara	371	375	790	782
Kutai Timur	328	334	705	703
Berau	190	240	1539	1532
Balikpapan	158	256	4398	4385
Paser	117	186	266	266
Samarinda	112	162	2579	2569
Kutai Barat	109	112	173	173
Bontang	62	68	100	96
Penajam Paser Utara	32	53	126	126
Mahakam Ulu	8	9	27	27
Total	1487	1795	10703	10659

- BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Dalam rangka melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi, dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru, dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta. Ketiga unit kerja tersebut memiliki kesamaan klasifikasi organisasi sebagai Balai Monitor Kelas I, sehingga memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang relatif sebanding dalam pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio.

Selain itu, ketiga unit kerja tersebut juga memiliki cakupan wilayah kerja yang relatif sama. Balmon SFR Kelas I Samarinda memiliki wilayah kerja yang mencakup 10 Kab/Kota. Balmon SFR Kelas I Yogyakarta juga memiliki wilayah kerja sekitar 10 Kab/Kota yang mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Di sisi lain, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 12 Kab/Kota yang mencakup wilayah Provinsi Riau.

Oleh karena itu, Balmon Pekanbaru dan Balmon Yogyakarta dapat dijadikan benchmark yang tepat untuk menilai capaian kinerja karena struktur organisasi dan cakupan wilayah kerja yang sebanding dengan Balmon Samarinda.

Hasil benchmarking tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Praktik-praktik kinerja yang dinilai efektif dari unit kerja pembanding dapat dijadikan referensi dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, hasil benchmark ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas serta mendukung pencapaian target kinerja yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.6.

Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	Balmon Samarinda	80	100	Persentase capaian kinerja Balmon Samarinda, Balmon Pekanbaru, dan Balmon Yogyakarta masing-masing telah mencapai 100%
	Balmon Pekanbaru	80	100	
	Balmon Yogyakarta	80	100	



d. Analisis Pencapaian Target

Monitoring spektrum frekuensi radio dilaksanakan untuk memastikan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio berlangsung secara tepat guna, sesuai dengan peruntukkan dan ketentuan yang berlaku, serta terhindar dari potensi tumpang tindih antar pengguna. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalkan terjadinya gangguan, serta menjamin efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas monitoring spektrum frekuensi radio. Kendala tersebut antara lain faktor geografis dan infrastruktur, keterbatasan sumber daya, serta tantangan teknologi dan operasional. Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Timur yang cukup menantang, dengan karakteristik wilayah yang luas, banyak area terpencil, serta aksesibilitas yang terbatas, menjadi salah satu faktor utama. Wilayah-wilayah yang sulit dijangkau memerlukan waktu dan upaya lebih karena monitoring harus dilakukan melalui aktivitas lapangan secara langsung. Selain itu, keterbatasan jangkauan penerimaan perangkat monitoring untuk jarak yang sangat jauh menyebabkan tidak seluruh frekuensi radio dapat terpantau secara optimal, khususnya pada lokasi dengan topografi yang terhalang atau berada di luar radius cakupan alat.

Di sisi lain, keterbatasan jumlah perangkat monitoring yang memadai juga menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika kegiatan monitoring harus dilaksanakan secara bersamaan di beberapa lokasi prioritas. Kondisi tersebut menuntut adanya perencanaan dan penjadwalan kegiatan yang lebih cermat, serta penetapan prioritas wilayah berdasarkan tingkat potensi gangguan maupun kepadatan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Kendala teknis pada perangkat monitoring turut berpengaruh terhadap akurasi dan kualitas data hasil pengukuran. Gangguan pada perangkat, kebutuhan kalibrasi, serta keterbatasan pembaruan teknologi dapat memengaruhi validitas hasil monitoring. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan dan kalibrasi perangkat secara berkala, peningkatan kapasitas teknologi secara bertahap, serta pelatihan teknis yang lebih intensif bagi pejabat fungsional agar mampu mengantisipasi dan mengatasi potensi gangguan teknis yang muncul di lapangan.



Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan pengendalian dan pengawasan spektrum frekuensi radio, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan geografis yang perlu dioptimalkan penanganannya. Evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja pada periode berikutnya, guna memastikan tercapainya target indikator secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam penyempurnaan perencanaan tugas dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan monitoring di tingkat kabupaten/kota. Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio, diperlukan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut diarahkan pada penilaian kinerja dan optimalisasi pemanfaatan peralatan monitoring, serta identifikasi dan penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi

di lapangan, termasuk gangguan pada perangkat dan keterbatasan akses menuju wilayah terpencil, sehingga pelaksanaan monitoring dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi prioritas dalam mendukung optimalisasi kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah dan kualitas perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR), baik yang bersifat tetap (*fixed/transportable*), bergerak (*mobile*), maupun jinjing (*portable*). Ketersediaan perangkat monitoring yang memadai diharapkan mampu memperluas cakupan pengawasan, meningkatkan ketepatan dalam mendeteksi penggunaan frekuensi, serta mempercepat respons terhadap potensi gangguan spektrum frekuensi radio.

Selain dukungan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan monitoring juga menjadi fokus utama. Penyediaan pelatihan teknis, pembinaan

kompetensi, serta penguatan kemampuan analisis lapangan diperlukan agar petugas memiliki keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan perangkat, mengidentifikasi sumber interferensi, serta menyelesaikan berbagai tantangan teknis dan operasional yang muncul. Di samping itu, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk unsur keamanan dan instansi di bidang teknologi komunikasi, serta peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat, menjadi faktor pendukung kelancaran operasional monitoring, khususnya pada wilayah terpencil atau daerah dengan keterbatasan akses. Dengan langkah tersebut, pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

f. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio, diperlukan langkah strategis yang berorientasi pada penguatan perencanaan, optimalisasi sumber daya, serta pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan. Penerapan teknologi tersebut diharapkan mampu memperluas cakupan monitoring secara lebih optimal dan efisien, termasuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses, sehingga kegiatan monitoring dapat lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap peningkatan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

Selain itu, perlu disusun dan diterapkan protokol pengawasan serta pemeliharaan rutin terhadap perangkat SMFR guna menjamin keberlangsungan operasional yang andal dan berkesinambungan. Penguatan sistem monitoring berbasis teknologi digital juga menjadi rekomendasi utama, melalui integrasi Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dengan sistem pengelolaan data yang lebih terstruktur dan real-time. Pengembangan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan deteksi potensi interferensi, memperluas cakupan pengawasan, serta mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.

Di sisi lain, diperlukan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis lanjutan, penguatan kompetensi analisis spektrum, serta peningkatan kemampuan dalam pemanfaatan fitur-fitur perangkat monitoring terkini. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga perlu terus diupayakan, baik melalui pengadaan perangkat tambahan maupun optimalisasi pemeliharaan

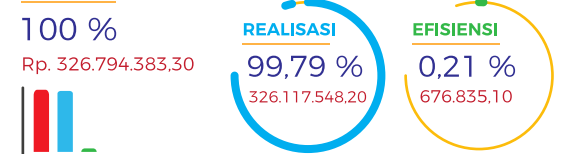


dan kalibrasi alat secara berkala untuk menjaga keandalan operasional.

Rekomendasi lainnya adalah penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi keamanan, serta pemangku kepentingan di bidang komunikasi dan penyiaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan monitoring di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Sinergi ini penting untuk mempercepat tindak lanjut atas temuan di lapangan serta meningkatkan kepatuhan pengguna frekuensi.

g. Efisiensi

PAGU ANGGARAN



Hingga akhir tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda telah merealisasikan anggaran kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio sebesar Rp 326,117,548.20 atau 99.79% dari total pagu anggaran sebesar Rp 326,794,383.30. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 676,835.10 atau 0.21% dari total pagu yang dialokasikan.

Efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring tidak hanya tercermin dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga melalui pengelolaan pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan secara lebih optimal. Dalam beberapa kegiatan monitoring, dilakukan pengaturan komposisi tim secara lebih proporsional dengan menyesuaikan jumlah personel yang terlibat berdasarkan kebutuhan kegiatan. Hal ini memungkinkan kegiatan monitoring tetap berjalan efektif dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih efisien.

Selain itu, penggunaan kendaraan operasional juga diatur secara lebih optimal dengan menggabungkan beberapa titik lokasi monitoring dalam satu perjalanan dinas. Pengaturan tersebut membantu menekan biaya operasional perjalanan sekaligus menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan monitoring di wilayah kerja.

Melalui pengaturan pelaksanaan kegiatan monitoring yang lebih efisien tersebut, kegiatan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio tetap dapat dilaksanakan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam upaya mencapai target indikator kinerja, implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini antara lain:

1. **Berorientasi Pelayanan:** Berkomitmen untuk memberikan layanan pengawasan spektrum frekuensi radio yang responsif, tepat waktu, dan solutif terhadap potensi gangguan yang berdampak pada kepentingan publik.
2. **Akuntabel:** Melaksanakan pemantauan spektrum secara sistematis dan terdokumentasi, serta menyajikan laporan hasil monitoring yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Kompeten:** Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknologi terbaru dan penggunaan perangkat monitoring yang modern untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi pemantauan.

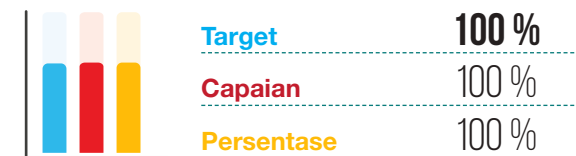
4. **Harmonis:** Menjalin kerja sama dengan instansi terkait, operator telekomunikasi, dan komunitas radio untuk menjaga ketertiban spektrum serta menyelesaikan potensi gangguan.
5. **Loyal:** Melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi untuk memastikan spektrum digunakan secara optimal bagi kepentingan publik, perkembangan ekonomi dan keamanan negara.
6. **Adaptif:** Mengikuti perkembangan teknologi monitoring, seperti sistem pemantauan otomatis, sensor IoT, dan analisis berbasis AI,

serta menyesuaikan strategi dengan dinamika kebutuhan komunikasi di daerah.

7. **Kolaboratif:** Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, penyelenggara jasa telekomunikasi, dan komunitas pengguna frekuensi untuk menciptakan ekosistem yang tertib dan efisien, serta berpartisipasi dalam forum nasional dan internasional untuk berbagi pengalaman dan solusi dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio.

2. INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE (%) PEMERIKSAAN STASIUN RADIO



Target indikator kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio pada tahun 2025 yaitu sebesar **100%**. Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan pelaksanaan kegiatan menyangkut indikator ini.

Target indikator kinerja di atas mengacu pada Perjanjian Kinerja masing-masing tahun, yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMN. Perbandingan capaian dilakukan terhadap periode 2021–2025 untuk melihat perkembangan kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 3.7.

Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja 2021-2025

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	90%	105.81%	100%	157.67%	100%	109.55%	100%	100%	100%	100%

a. Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya publik yang terbatas dan penggunaannya diatur secara ketat oleh negara untuk menjamin keteraturan serta keberlanjutan layanan komunikasi. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan gangguan yang dapat menghambat layanan komunikasi publik. Dalam praktiknya, penggunaan frekuensi radio oleh stasiun radio, baik untuk kepentingan penyiaran, komunikasi khusus, maupun layanan lainnya, berpotensi menimbulkan penyimpangan parameter teknis, penggunaan tidak sesuai izin, atau bahkan pengoperasian tanpa izin apabila tidak diawasi secara berkala.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pemeriksaan stasiun radio sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap stasiun radio beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan, memenuhi ketentuan teknis yang berlaku, serta tidak menimbulkan interferensi yang merugikan pengguna frekuensi lainnya. Pemeriksaan ini melibatkan beberapa aspek penting, termasuk pemeriksaan microwave link dan pengukuran parameter teknis pada stasiun siaran.

Pemeriksaan microwave link dilakukan dengan mengakses NOC (Network Operation Center) dan NMS (Network Management System) melalui remote site serta inspeksi open shelter, untuk memastikan kesesuaian dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki serta memastikan tidak adanya gangguan yang dapat menurunkan kualitas layanan telekomunikasi.

Pada pengukuran parameter teknis pada stasiun siaran, baik untuk radio FM maupun televisi digital, bertujuan untuk memastikan kesesuaiannya dalam Izin Stasiun Radio. Proses ini sangat penting untuk menghindari penyimpangan yang dapat mempengaruhi kualitas siaran dan menyebabkan gangguan pada layanan lainnya.

Dengan pelaksanaan pemeriksaan yang terencana dan terukur, diharapkan kualitas pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio dapat terus meningkat serta memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan layanan komunikasi yang andal dan berdaya saing.

b. Sasaran Kegiatan

Penetapan target indikator kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio pada tahun 2025 yaitu sebesar 100%. Targetnya terdiri dari target pemeriksaan stasiun radio microwave link secara remote site dan open shelter, pengukuran stasiun radio siaran FM dan pengukuran stasiun televisi siaran digital.

c. Capaian Target

Berdasarkan Perjanjian Kinerja UPT di Direktorat Pengendalian SDPPI Tahun 2025, target untuk IK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio yaitu 100% Target Diperiksa. Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio terdiri dari :

1) Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link

Pemeriksaan stasiun radio microwave link dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pemeriksaan Stasiun Radio. Target pemeriksaan remote site dilakukan sekurang-kurangnya 100% dari 349 data target yang diberikan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital pada Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD), sedangkan Target pemeriksaan melalui inspeksi (open shelter) dilakukan sekurang-kurangnya 60% dari 4309 data target yang ditetapkan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital pada Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD).



Perhitungan untuk capaian ini yaitu:

(Jumlah yang dilakukan pemeriksaan stasiun radio + data tindaklanjut temuan pelanggaran hasil pemeriksaan stasiun radio yang dikenakan sanksi)

=

(Total data target pemeriksaan stasiun radio sesuai perhitungan data sampling + total data pelanggaran pemeriksaan stasiun radio)

2) Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM

Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran dilakukan pada pita frekuensi siaran Radio FM. Target pengukuran stasiun siaran terdiri dari Seluruh stasiun siaran Radio FM. UPT dengan jumlah ISR siaran Radio FM (> 50) ISR dapat melakukan pengukuran parameter teknis sekurang – kurangnya 50 ISR siaran Radio FM. Diutamakan pengukuran terhadap stasiun Radio FM dengan Status Off Air pada Tahun 2024.

Perhitungan untuk capaian ini yaitu:

(Jumlah yang dilakukan pemeriksaan stasiun radio + data tindaklanjut temuan pelanggaran hasil pemeriksaan stasiun radio yang dikenakan sanksi)

=

(Total data target pemeriksaan stasiun radio sesuai perhitungan data sampling+total data pelanggaran pemeriksaan stasiun radio)

3) Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Televisi Digital.

Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran dilakukan pada pita frekuensi siaran TV Digital. Target pengukuran stasiun siaran terdiri dari Seluruh stasiun siaran TV Digital. UPT dengan jumlah ISR siaran TV Digital (> 20) ISR dapat melakukan pengukuran parameter teknis sekurang – kurangnya 20 ISR siaran TV Digital. Diutamakan pengukuran terhadap stasiun TV Digital dengan Status Off Air pada Tahun 2024.

Perhitungan untuk capaian ini yaitu:

(Jumlah yang dilakukan pemeriksaan stasiun radio + data tindaklanjut temuan pelanggaran hasil pemeriksaan stasiun radio yang dikenakan sanksi)

=

(Total data target pemeriksaan stasiun radio sesuai perhitungan data sampling+total data pelanggaran pemeriksaan stasiun radio)

CAPAIAN KUMULATIF TIAP BULAN

1) Pemeriksaan Stasiun Radio

Tabel 3.8.
Pemeriksaan Stasiun Radio

Pemeriksaan Stasiun Radio	
Bulan	% Capaian
Januari	0.00%
Februari	0.20%
Maret	0.50%
April	0.50%
Mei	9.80%
Juni	9.82%
Juli	11.44%
Agustus	52.34%
September	69.00%
Oktober	99.79%
November	100.00%
Desember	100.00%

a). Pemeriksaan Microwave Link

Tabel 3.9.
Pemeriksaan secara Remote Site

Remote Site	
Bulan	% Capaian
Januari	0.00%
Februari	0.00%
Maret	0.00%
April	0.00%
Mei	0.00%
Juni	4.15%
Juli	5.85%
Agustus	49.71%
September	66.80%
Oktober	100.00%
November	100.00%
Desember	100.00%

Tabel 3.10.
Pemeriksaan secara Open Shelter

Open Shelter	
Bulan	% Capaian
Januari	0.00%
Februari	0.00%
Maret	0.00%
April	0.00%
Mei	0.00%
Juni	92.86%
Juli	92.86%
Agustus	92.86%
September	100.00%
Oktober	100.00%
November	100.00%
Desember	100.00%

b). Pengukuran Stasiun Siaran Radio FM

Tabel 3.11.
Pengukuran Stasiun Siaran Radio FM

Stasiun Siaran Radio FM	
Bulan	% Capaian
Januari	0.00%
Februari	18.00%
Maret	36.00%
April	36.00%
Mei	36.00%
Juni	52.00%
Juli	52.00%
Agustus	72.00%
September	100.00%
Oktober	100.00%
November	100.00%
Desember	100.00%

c). Pengukuran Stasiun Siaran Televisi Digital

Tabel 3.12.
Pengukuran Stasiun Siaran Televisi Digital

Stasiun Siaran Radio FM	
Bulan	% Capaian
Januari	0.00%
Februari	18.00%
Maret	36.00%
April	36.00%
Mei	36.00%
Juni	52.00%
Juli	52.00%
Agustus	72.00%
September	100.00%
Oktober	100.00%
November	100.00%
Desember	100.00%

IDENTIFIKASI HASIL

1) Pemeriksaan Stasiun Radio

Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio terdiri atas pemeriksaan microwavelink serta pengukuran stasiun siaran. Pemeriksaan *microwavelink* dilaksanakan melalui dua metode, yaitu *remote site* dan *open shelter*, yang masing-masing memiliki target pemeriksaan berdasarkan data pada aplikasi pelaporan APSTARD. Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4.306 microwavelink dari 4.306 target *remote site* serta 349 microwavelink dari 349 target *open shelter*, sehingga capaian kegiatan pemeriksaan *microwavelink* mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Selain itu, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan stasiun radio melalui pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran pada pita frekuensi Radio FM (FM) dan Televisi Digital (DVB-T).



Kegiatan ini dilaksanakan terhadap stasiun penyiaran yang beroperasi di wilayah kerja Balmon Samarinda dengan prioritas pada stasiun yang pada tahun sebelumnya teridentifikasi berstatus *off air*.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dari total 76 stasiun radio siaran FM yang terdata di wilayah kerja Balmon Samarinda, telah dilakukan pengukuran terhadap 75 stasiun radio siaran FM. Capaian tersebut telah melampaui target minimal 50 stasiun radio siaran FM sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, pengukuran juga dilakukan terhadap 18 stasiun televisi siaran digital dari target 18 stasiun, sehingga kegiatan pengukuran televisi digital mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator pemeriksaan stasiun radio, yaitu perbandingan antara jumlah pemeriksaan yang dilakukan ditambah data tindak lanjut temuan pelanggaran terhadap total target pemeriksaan sesuai data sampling dan data pelanggaran, diperoleh **persentase capaian Pemeriksaan Stasiun Radio sebesar 100%**.



a) Pemeriksaan Microwavelink

Tabel 3.13.
Tabel Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio Microwavelink (Remote Site)

Hasil Pemeriksaan Microwavelink (Remote Site)	
Status	Jumlah
Sesuai ISR	2387
Tidak Aktif	1918
Tidak Berizin	4
Tidak Sesuai Parameter Teknis	0
Capaian	4306
Total Diperiksa	4306

Tabel 3.14.
Tabel Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio Microwavelink (Open Shelter)

Hasil Pemeriksaan Microwavelink (Open Shelter)	
Status	Jumlah
Sesuai ISR	166
Tidak Aktif	183
Tidak Berizin	0
Tidak Sesuai Parameter Teknis	0
Target	349
Total Diperiksa	349

b) Pengukuran Stasiun Siaran

Tabel 3.15.

Tabel Rekapitulasi Hasil Pengukuran Stasiun Radio Penyelenggara Penyiaran 2025

Rekapitulasi Hasil Pengukuran Stasiun Radio Penyelenggara Penyiaran 2025				
No	Kabupaten/Kota	FM	DVB-T	Total
1.	Balikpapan	9	6	15
2.	Berau	6	2	8
3.	Bontang	10	1	11
4.	Kutai Barat	3	1	4
5.	Kutai Kartanegara	9	0	9
6.	Kutai Timur	7	0	7
7.	Mahakam Ulu	2	0	2
8.	Paser	5	2	7
9.	Penajam Paser Utara	2	0	2
10.	Samarinda	23	6	29
TOTAL		76	18	94

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Dalam rangka melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi, dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru, dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta. Ketiga unit kerja tersebut memiliki kesamaan klasifikasi organisasi sebagai Balai Monitor Kelas I, sehingga memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang relatif sebanding dalam pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio.

Selain itu, ketiga unit kerja tersebut juga memiliki cakupan wilayah kerja yang relatif sama. Balmon SFR Kelas I Samarinda memiliki wilayah kerja yang mencakup 10 Kab/Kota. Balmon SFR Kelas I Yogyakarta juga memiliki wilayah kerja sekitar 10 Kab/Kota yang mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Di sisi lain, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memiliki wilayah

kerja yang terdiri dari 12 Kab/Kota yang mencakup wilayah Provinsi Riau.

Oleh karena itu, Balmon Pekanbaru dan Balmon Yogyakarta dapat dijadikan benchmark yang tepat untuk menilai capaian kinerja karena struktur organisasi dan cakupan wilayah kerja yang sebanding dengan Balmon Samarinda.

Hasil benchmarking tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Praktik-praktik kinerja yang dinilai efektif dari unit kerja pembanding dapat dijadikan referensi dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, hasil benchmark ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas serta mendukung pencapaian target kinerja yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.16.

Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	Balmon Samarinda	100	100	Persentase capaian kinerja Balmon Samarinda, Balmon Pekanbaru, dan Balmon Yogyakarta masing-masing telah mencapai 100%
	Balmon Pekanbaru	100	100	
	Balmon Yogyakarta	100	100	

d. Analisis Pencapaian Target

Pada IK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

Pemeriksaan stasiun radio dilaksanakan untuk memastikan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mencegah terjadinya gangguan komunikasi yang dapat merugikan pengguna frekuensi lainnya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa setiap stasiun radio beroperasi berdasarkan izin yang sah dan memenuhi persyaratan teknis operasional sebagaimana tercantum dalam ketentuan perizinan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pemeriksaan stasiun radio menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait faktor geografis pada wilayah terpencil yang memiliki tingkat aksesibilitas rendah, seperti di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi tersebut memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar untuk menjangkau lokasi pemeriksaan. Selain itu, keterbatasan jumlah personel serta perangkat pemeriksaan yang tersedia turut memengaruhi efektivitas dan cakupan pengawasan. Keterbatasan jangkauan perangkat serta potensi gangguan teknis juga dapat berdampak pada akurasi hasil pengukuran, sehingga diperlukan pemeliharaan dan kalibrasi perangkat secara berkala guna menjaga keandalan dan kualitas data hasil pemeriksaan.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis secara berkala serta penguasaan perkembangan teknologi monitoring terbaru menjadi faktor penting dalam mendukung efisiensi pelaksanaan pemeriksaan. Selain itu, penambahan dan modernisasi perangkat monitoring, termasuk pemanfaatan sistem berbasis digital untuk pengolahan dan pelaporan data, perlu terus diupayakan guna mempercepat proses identifikasi dan analisis temuan pemeriksaan.

Penguatan komunikasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Dengan mengatasi berbagai kendala yang ada serta mengoptimalkan dukungan teknologi dan kerja sama lintas pihak, pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio, laporan kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi rutin terhadap kegiatan pemeriksaan di berbagai daerah. Evaluasi tersebut mencakup penilaian terhadap efektivitas penggunaan perangkat pemeriksaan, analisis kendala teknis yang terjadi di lapangan, serta identifikasi hambatan aksesibilitas pada wilayah terpencil. Selain itu, dilakukan audit atas capaian pemeriksaan pada wilayah tertentu guna memastikan kesesuaian antara target dan realisasi serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan. Melalui proses evaluasi ini, diharapkan pemeriksaan stasiun radio tetap dapat dilaksanakan secara optimal meskipun menghadapi tantangan geografis dan operasional.

Peningkatan kapasitas organisasi serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan langkah strategis yang perlu terus diupayakan dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio. Penambahan jumlah serta peningkatan kualitas perangkat pemeriksaan diperlukan guna memastikan seluruh wilayah kerja dapat dijangkau secara efektif tanpa terkendala keterbatasan peralatan. Ketersediaan perangkat yang memadai juga akan meningkatkan ketepatan dan keandalan hasil pemeriksaan di lapangan.

Di samping itu, peningkatan kompetensi petugas pemeriksa melalui pelatihan teknis secara berkelanjutan menjadi aspek yang tidak kalah penting. Penguatan kapasitas sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan pengoperasian perangkat, analisis parameter teknis, serta penanganan berbagai hambatan operasional di lapangan. Dengan dukungan perangkat yang optimal dan sumber daya manusia yang kompeten, pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi keamanan, regulator telekomunikasi, serta pemerintah daerah, perlu diperkuat untuk mendukung kelancaran operasional pemeriksaan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Kerja sama dengan masyarakat lokal juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala akses serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan stasiun radio. Dengan langkah-langkah ini, pemeriksaan dapat dilakukan

lebih optimal, sehingga kepatuhan terhadap regulasi spektrum frekuensi dapat terus terjaga.

f. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

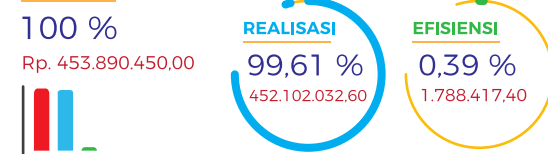
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam monitoring spektrum frekuensi radio, perlu diterapkan teknologi terbaru seperti Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) yang lebih canggih dan terintegrasi dengan sistem pemantauan berbasis data digital atau jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan pemantauan yang lebih luas dan efisien, mencakup wilayah yang lebih besar, termasuk daerah-daerah sulit dijangkau.

Selain itu penerapan digitalisasi pengisian formulir pemeriksaan juga dapat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas indikator kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio. Transformasi dari sistem pencatatan manual menuju sistem berbasis aplikasi atau platform digital akan mempercepat proses input

data di lapangan, meminimalkan potensi kesalahan pencatatan, serta memastikan kelengkapan dan konsistensi data hasil pemeriksaan. Digitalisasi ini juga mendukung transparansi, efisiensi administrasi, serta penguatan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio dapat berjalan lebih akuntabel, modern, dan responsif terhadap dinamika pengelolaan spektrum frekuensi radio.

g. Efisiensi

PAGU ANGGARAN



Hingga akhir tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda telah merealisasikan anggaran kegiatan pemeriksaan stasiun radio sebesar Rp. 452,102,032.60

atau 99.61% dari total pagu anggaran sebesar Rp.453,890,450.00. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1,788,417.40 atau 0.39% dari total pagu yang dialokasikan.

Efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio tidak hanya tercermin dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari pengelolaan pelaksanaan kegiatan secara lebih optimal. Pengaturan jadwal kegiatan serta perencanaan lokasi pemeriksaan dilakukan secara lebih terstruktur sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Selain itu, efisiensi juga didukung oleh pengaturan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang mempertimbangkan efisiensi perjalanan dinas dan pemanfaatan sarana operasional, sehingga beberapa lokasi pemeriksaan dapat dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan. Hal tersebut membantu menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio.

Di sisi lain, efisiensi juga dipengaruhi oleh perencanaan program kerja dan pengelolaan anggaran yang dilakukan secara cermat, baik dalam penentuan kegiatan maupun waktu pelaksanaannya. Dengan perencanaan yang lebih matang, kegiatan pemeriksaan stasiun radio dapat dilaksanakan secara optimal dengan pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang lebih efisien.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam upaya mencapai target indikator kinerja, implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini antara lain :

- 1) **Berorientasi Pelayanan:** diterapkan dengan memberikan pelayanan pemeriksaan yang responsif, transparan, serta memberikan penjelasan yang jelas kepada pemegang izin mengenai hasil pemeriksaan dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) **Akuntabel:** diwujudkan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara objektif, berdasarkan standar operasional prosedur, serta didukung dengan dokumentasi dan pelaporan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap hasil

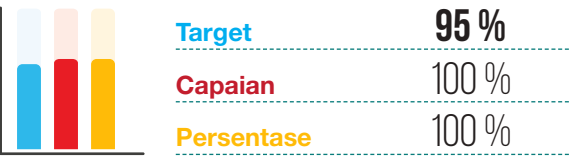
pemeriksaan dicatat secara sistematis sehingga dapat menjadi dasar evaluasi serta pengambilan keputusan dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio.

- 3) **Kompeten:** diimplementasikan dengan meningkatkan kemampuan teknis petugas pemeriksa melalui pelatihan, pembaruan pengetahuan terkait teknologi telekomunikasi, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Dengan kompetensi yang memadai, petugas mampu melakukan pemeriksaan secara akurat, mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian teknis, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat.
- 4) **Harmonis:** tercermin dalam sikap saling menghargai dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan pemegang izin, instansi terkait, serta masyarakat di wilayah pelaksanaan pemeriksaan. Pendekatan komunikasi yang baik membantu menciptakan suasana kerja sama yang kondusif sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar.
- 5) **Loyal:** diwujudkan melalui komitmen untuk menjalankan tugas pengawasan secara konsisten dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio. Petugas pemeriksa menjaga integritas serta menjunjung tinggi kepentingan organisasi dan negara dalam setiap pelaksanaan tugas.
- 6) **Adaptif:** diimplementasikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti penggunaan sistem digital dalam pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi perangkat telekomunikasi yang terus berkembang.
- 7) **Kolaboratif:** diwujudkan melalui koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio. Melalui kolaborasi yang baik, pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.



3. INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE (%) PENANGANAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO



Penetapan target indikator kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun 2025 yaitu sebesar **95%** dari jumlah aduan gangguan spektrum frekuensi radio tertangani.

Capaian indikator kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dapat dilihat pada tabel di bawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan pelaksanaan kegiatan menyangkut indikator ini.

Target indikator kinerja di atas, mengacu pada Perjanjian Kinerja masing-masing tahun, yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMN. Perbandingan capaian dilakukan terhadap periode 2021–2025 untuk melihat perkembangan kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 3.17.
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja 2021-2025

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97%	100.00%	98%	100.0%	99%	100%	100%	100%	95%	100%

a. Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki peranan strategis dalam mendukung penyelenggaraan telekomunikasi, penyiaran, navigasi, keselamatan, serta berbagai layanan komunikasi publik lainnya. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat berpotensi menimbulkan gangguan (interferensi) apabila tidak dikelola dan diawasi secara optimal. Gangguan spektrum frekuensi radio dapat berdampak pada terganggunya kualitas layanan komunikasi, menurunnya keandalan sistem, bahkan menghambat komunikasi yang bersifat vital, seperti komunikasi penerbangan, maritim, dan layanan darurat.

Dalam pelaksanaannya, gangguan dapat disebabkan oleh penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukan, penyimpangan parameter teknis, perangkat yang tidak memenuhi standar, maupun pengoperasian tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang cepat, tepat, dan



terukur sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian. Indikator kinerja Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas respons terhadap

laporan gangguan serta kemampuan penyelesaian kasus secara profesional dan akuntabel di wilayah kerja.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan pengelolaan spektrum yang efisien, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. UPT bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan spektrum secara berkala dan menindaklanjuti laporan gangguan sehingga terselenggaranya proses penanganan gangguan secara sistematis, terstandar, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap laporan gangguan dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Tujuan dari pelaksanaan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio adalah untuk menjaga kualitas dan keandalan layanan komunikasi, meminimalkan potensi interferensi yang merugikan pengguna frekuensi lainnya, serta meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio. Selain itu, indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja pengawasan melalui respons yang cepat, penyelesaian gangguan yang efektif, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait guna mewujudkan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan berkelanjutan.

b. Sasaran Kegiatan

Penetapan target indikator kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun 2025 yaitu sebesar 95% dari jumlah aduan gangguan spektrum frekuensi radio tertangani.

c. Capaian Target

Pada pelaksanaannya Balmon Samarinda mampu menangani 4 dari 4 aduan gangguan spektrum frekuensi radio sehingga secara akumulasi hingga Desember tahun 2025, capaian indikator kinerja ini mencapai 100%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa target pada Indikator Kinerja tersebut terlampaui sebesar 100% dari target 100%.

Perhitungan capaian Indikator Kinerja ini menggunakan rumus berikut:

$$\%Capaian = \frac{\text{Jumlah Gangguan SFR yang Ditangani}}{\text{Total Gangguan SFR}}$$

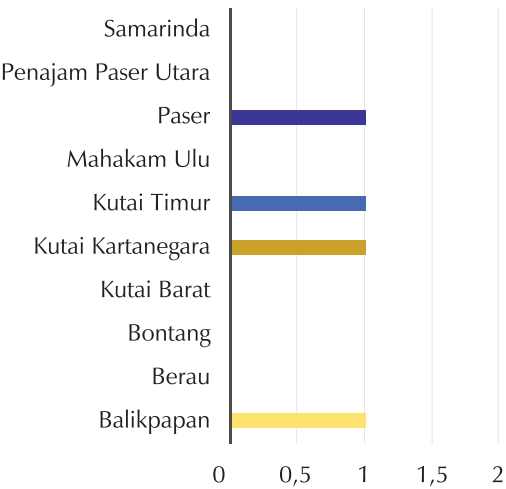
Dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna spektrum frekuensi radio khususnya menyangkut gangguan frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda selama tahun 2025 telah menangani 4 aduan gangguan frekuensi radio.

Adapun jumlah dari kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18.
Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan
1.	Balikpapan	1
2.	Berau	0
3.	Bontang	0
4.	Kutai Barat	0
5.	Kutai Kartanegara	1
6.	Kutai Timur	1
7.	Mahakam Ulu	0
8.	Paser	1
9.	Penajam Paser Utara	0
10.	Samarinda	0
TOTAL		4

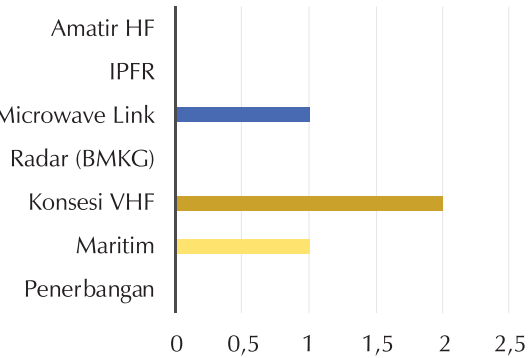
Grafik 3.1.
Kegiatan Penanganan Gangguan Tiap Kabupaten/ Kota Tahun 2025



Tabel 3.19.
Jumlah Kegiatan Berdasarkan Dinas Pengguna yang Terganggu

No	Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan
1.	Penerbangan	0
2.	Maritim	1
3.	Konsesi VHF	2
4.	Radar (BMKG)	0
5.	Microwave Link	1
6.	IPFR	0
7.	Amatir HF	0
TOTAL		4

Grafik 3.2.
Jumlah Kegiatan Berdasarkan Dinas Pengguna yang Terganggu



Berdasarkan Dinas/jenis layanan yang digunakan, jumlah pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda adalah 4 kegiatan, diantaranya Dinas Maritim 1 kegiatan, Konsesi VHF 2 kegiatan dan *Microwavelink* 1 kegiatan.



BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Dalam rangka melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi, dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru, dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta. Ketiga unit kerja tersebut memiliki kesamaan klasifikasi organisasi sebagai Balai Monitor Kelas I, sehingga memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang relatif sebanding dalam pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio.

Selain itu, ketiga unit kerja tersebut juga memiliki cakupan wilayah kerja yang relatif sama. Balmon SFR Kelas I Samarinda memiliki wilayah kerja yang mencakup 10 Kab/Kota. Balmon SFR Kelas I Yogyakarta juga memiliki wilayah kerja sekitar 10 Kab/Kota yang mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Di sisi lain, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 12 Kab/Kota yang mencakup wilayah Provinsi Riau.

Oleh karena itu, Balmon Pekanbaru dan Balmon Yogyakarta dapat dijadikan benchmark yang tepat untuk menilai capaian kinerja karena struktur organisasi dan cakupan wilayah kerja yang sebanding dengan Balmon Samarinda.

Tabel 3.20.
Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	Balmon Samarinda	95	100	Persentase capaian kinerja Balmon Samarinda, Balmon Pekanbaru, dan Balmon Yogyakarta masing-masing telah mencapai 100%
	Balmon Pekanbaru	95	100	
	Balmon Yogyakarta	95	100	

d. Analisis Pencapaian Target

Pencapaian target indikator Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio menunjukkan bahwa kinerja penanganan gangguan telah dilaksanakan secara terukur dan responsif sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Capaian tersebut tercermin dari laporan gangguan yang dapat ditindaklanjuti tepat waktu serta terselesaikan hingga tuntas dalam tahun berjalan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan sejumlah inovasi dalam proses penanganan, baik dari aspek teknis, manajerial, maupun pemanfaatan teknologi pendukung.

Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan sistem pelaporan berbasis digital, sehingga proses penerimaan laporan, analisis awal, hingga penugasan tim teknis dapat dilakukan secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, penerapan pemetaan lokasi gangguan berbasis data historis dan peta risiko wilayah turut membantu dalam menentukan prioritas penanganan, khususnya pada area dengan tingkat kerawanan interferensi yang tinggi atau yang berkaitan dengan layanan komunikasi vital. Inovasi ini mampu

Hasil benchmarking tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Praktik-praktik kinerja yang dinilai efektif dari unit kerja pembanding dapat dijadikan referensi dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, hasil benchmark ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas serta mendukung pencapaian target kinerja yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

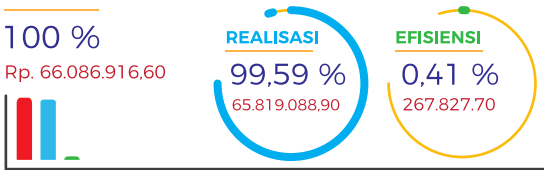
meningkatkan efektivitas perencanaan penanganan serta mengurangi waktu respons terhadap laporan masyarakat maupun pengguna frekuensi.

Dari sisi manajerial, penguatan koordinasi internal dan kolaborasi dengan instansi terkait juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian target. Mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur serta pembagian tugas yang jelas antar tim teknis memungkinkan proses identifikasi sumber gangguan dan tindakan korektif dilakukan secara lebih efisien.

Secara keseluruhan, inovasi yang diimplementasikan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kecepatan respons, ketepatan identifikasi sumber gangguan, serta tingkat keberhasilan penyelesaian kasus. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah berjalan efektif dalam mendukung tercapainya target indikator, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio secara profesional dan akuntabel.

f. Efisiensi

PAGU ANGGARAN



Hingga akhir tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda telah merealisasikan anggaran kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio sebesar Rp. 65,819,088.90 atau **99.59%** dari total pagu anggaran sebesar Rp.66,086,916.60. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 267,827.70 atau **0.41%** dari total pagu yang dialokasikan.

Efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan dicapai melalui pengelolaan kegiatan operasional yang lebih efektif, baik dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan maupun pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Pengaturan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara lebih terencana sehingga kegiatan penanganan gangguan dapat dilaksanakan secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang tersedia.

Selain itu, efisiensi juga didukung oleh koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam proses penanganan gangguan frekuensi radio, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Melalui pengelolaan kegiatan yang terencana serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan dapat mendukung kelancaran pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balmon Samarinda.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam upaya mencapai target indikator kinerja, implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini antara lain :

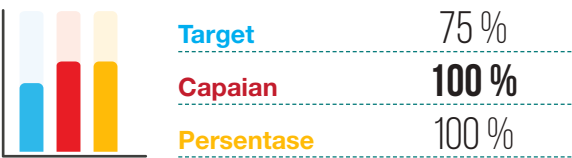
- 1) **Berorientasi Pelayanan:** diwujudkan melalui respons cepat terhadap laporan gangguan dari masyarakat maupun penyelenggara telekomunikasi, dengan memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti sesuai standar operasional prosedur dan waktu layanan yang telah ditetapkan. Petugas memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait progres penanganan gangguan serta memastikan

keberlangsungan layanan komunikasi publik tetap terjaga.

- 2) **Akuntabel:** diimplementasikan melalui pencatatan seluruh kegiatan penanganan gangguan secara tertib dalam berita acara pemeriksaan, dan laporan hasil penanganan gangguan. Setiap tindakan teknis didasarkan pada regulasi perundang-undangan di bidang spektrum frekuensi radio dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun teknis.
- 3) **Kompeten:** tercermin dari kemampuan teknis tim dalam melakukan identifikasi sumber interferensi menggunakan perangkat monitoring spektrum, analisis parameter frekuensi, serta interpretasi hasil pengukuran lapangan secara profesional. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan teknis dan pembaruan pengetahuan terhadap perkembangan teknologi radio dan sistem komunikasi.
- 4) **Harmonis:** diwujudkan dengan tetap menjaga komunikasi yang baik dan hubungan kerja sama yang harmonis antara regulator, pengguna spektrum frekuensi radio, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya.
- 5) **Loyal:** tercermin dalam komitmen untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio secara konsisten demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam penggunaan frekuensi.
- 6) **Adaptif :** ditunjukkan dengan kemampuan tim dalam menyesuaikan metode monitoring dan penanganan gangguan terhadap dinamika teknologi komunikasi yang terus berkembang, termasuk pemanfaatan perangkat monitoring modern dan sistem pelaporan berbasis digital.
- 7) **Kolaboratif:** diwujudkan melalui sinergi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam proses penanganan gangguan, kolaborasi juga dilakukan dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi, lembaga penyiaran, operator radio trunking, serta pengguna frekuensi lainnya.

4. INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE (%) TINGKAT KEPATUHAN STANDAR TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN DIGITAL



Indikator Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital pada tahun 2025 yaitu sebesar **100%**. Capaian indikator kinerja dapat dilihat bagan disebelah kemudian diikuti dengan penjelasan pelaksanaan kegiatan menyangkut indikator berikut:

Perbandingan capaian indikator kinerja berdasarkan dengan target dan capaian indikator kinerja sebelumnya (tahun 2021-2025) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.21.
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja 2021-2025

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Meningkatnya Layanan Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	-	-	100%	157.67%	100%	109.55%	100%	100%	100%	100%

a. Latar Belakang

Indikator Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital dimaksudkan untuk memastikan peredaran dan penggunaan perangkat telekomunikasi, seperti mobile transceiver/radio rig, handy talky (HT), wireless access point (wifi extender, wireless repeater router) sesuai standar dan perangkat yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan risiko teknis yang berimplikasi pada keselamatan. Perangkat tersebut menjadi bagian integral dari infrastruktur digital nasional yang mendukung konektivitas dan transformasi digital.

Tingkat kepatuhan terhadap standar teknis menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas sistem sertifikasi, pengujian, dan pengawasan perangkat telekomunikasi yang beredar di pasar. Selain itu, mengukur tingkat kepatuhan produsen, importir, distributor, dan/atau penyedia perangkat terhadap standar teknis yang berlaku.

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja telah menetapkan target 75% untuk kegiatan pemantauan kepatuhan alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Pemantauan ini mengacu pada target capaian yang meliputi 8 kali pelaksanaan dalam satu tahun dan

minimal 3 jenis perangkat prioritas yang dimonitor dalam setiap kegiatan. Pemantauan ini penting dalam menjaga ketertiban dan memastikan bahwa seluruh perangkat yang digunakan di lapangan telah memenuhi standar teknis yang berlaku.

b. Sasaran Kegiatan

Penetapan target indikator kinerja standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi digital pada tahun 2025 yaitu sebesar 75% sesuai wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan prioritas perangkat berupa Handy Talkie (HT), Wireless Access Point (WiFi Extender, Wireless



Repeater Router), serta perangkat Low Power yang meliputi *Wireless Keyboard* termasuk *Keyboard Aksara Daerah*, *True Wireless Sound (TWS)*, *Wireless Microphone*, *Bluetooth Speaker*, dan *Smart Watch*.

c. Capaian Target

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) UPT bidang Pengendalian Infrastruktur Digital Tahun 2025, Balmon Samarinda telah menyelesaikan target untuk IK-4 Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital yaitu 100% diperiksa dari target yang telah ditetapkan 75%. Kegiatan standar teknis telah ditargetkan sebanyak 8 kali kegiatan di Kabupaten/Kota, namun terdapat 2 kegiatan tambahan dalam rangka pengukuran, sehingga total dilaksanakan sebanyak 10 kali dan dari hasil kegiatan sampai Desember dengan total jumlah perangkat termonitor sebanyak 335 perangkat dan keseluruhan perangkat telah bersertifikat. Secara akumulasi hingga Desember tahun 2025, capaian indikator kinerja ini mencapai 100%.

Tabel 3.22.

Hasil Kegiatan Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital per Kabupaten/Kota

Kegiatan Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital Tahun 2025		
No	Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan
1.	Kota Samarinda	21
2.	Kota Balikpapan	105
3.	Kota Bontang	47
4.	Kabupaten Kutai Kartanegara	50
5.	Kabupaten Kutai Timur	30
6.	Kabupaten Kutai Barat	4
7.	Kabupaten Berau	34
8.	Kabupaten Penajam Paser Utara	24
9.	Kabupaten Paser	14
10.	Kabupaten Mahakam Ulu	6
TOTAL		335

Hasil kegiatan monitoring perangkat alat dan/atau perangkat telekomunikasi tahun 2025 menunjukkan bahwa dari **total 335 perangkat** yang diperiksa di 10 kabupaten/kota, sebaran terbesar berada di Balikpapan (105 perangkat), diikuti Kutai Kartanegara dan Bontang, sementara wilayah seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu memiliki jumlah paling sedikit, mencerminkan perbedaan tingkat aktivitas dan infrastruktur telekomunikasi. Berdasarkan jenisnya, perangkat yang paling dominan adalah perangkat *low power*, *wireless access point*, dan perangkat lainnya, yang mengindikasikan tingginya penggunaan teknologi nirkabel dalam aktivitas sehari-hari. Seluruh perangkat yang diperiksa dinyatakan **100% bersertifikat dan sesuai ketentuan teknis**, tanpa ditemukan pelanggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi telekomunikasi di Kalimantan Timur sangat baik dan kegiatan monitoring berjalan secara efektif. Monitoring perangkat dilakukan terhadap toko-toko penjual / distributor maupun pengguna alat/perangkat telekomunikasi.

Perhitungan capaian Indikator Kinerja ini menggunakan formula berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Perangkat bersertifikat termonitor} + \Sigma \text{Pelanggaran perangkat ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{Perangkat Termonitor}} \times 100\%$$

sehingga

$$\frac{335+0}{335} \times 100\%$$

Kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda, wajib dilakukan pelaporan data hasil pengawasan melalui aplikasi SMART, dan didapatkan hasil sebagai berikut:

- CAPAIAN KUMULATIF TIAP BULAN

Tabel 3.23.

Hasil Kegiatan Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital per Kabupaten/Kota

Bulan	Kabupaten/Kota	%Capaian
Januari	Kabupaten/Kota	%Capaian
Februari	Kota Samarinda	100.0%
Maret	Kota Balikpapan	100.0%
April	Kota Balikpapan	100.0%
Mei	Kota Balikpapan	100.0%
Juni	Kota Samarinda	0%
Juli	Kabupaten Kutai Kartanegara	100.0%
Agustus	Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang	100.0%
September	Kabupaten Paser, Kabupaten Berau	100.0%
Oktober	Kabupaten Kutai Timur, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan	100.0%
November	Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Berau	100.0%
Desember	-	0%

- IDENTIFIKASI HASIL

Selama tahun 2025, telah dilaksanakan monitoring perangkat telekomunikasi sebanyak 10 kali di 10 Kota/Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Monitoring perangkat dilakukan terhadap toko-toko penjual / distributor maupun pengguna alat/perangkat telekomunikasi. Adapun hasil dari kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi sebagai berikut:

Tabel 3.24.

Identifikasi Hasil Kegiatan Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital Periode Tahun 2025

Identifikasi Hasil Kegiatan Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital Periode Tahun 2025				
No	Kabupaten/Kota	Jenis Perangkat	Jumlah Perangkat	Bersertifikat
1.	Kota Samarinda	Handy Talkie (HT), Wireless Access Point (WiFi Extender, Wireless Repeater Router), serta perangkat Low Power yang meliputi Wireless Keyboard termasuk Keyboard Aksara Daerah, True Wireless Sound (TWS), Wireless Microphone, Bluetooth Speaker, dan Smart Watch.	21	21
2.	Kota Balikpapan		105	105
3.	Kota Bontang		47	47
4.	Kabupaten Kutai Kartanegara		50	50
5.	Kabupaten Kutai Timur		30	30
6.	Kabupaten Kutai Barat		4	4
7.	Kabupaten Berau		34	34
8.	Kabupaten Penajam Paser Utara		24	24
9.	Kabupaten Paser		14	14
10.	Kabupaten Mahakam Ulu		6	6
TOTAL			335	335

- **BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA**

Dalam rangka melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi, dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru, dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta. Ketiga unit kerja tersebut memiliki kesamaan klasifikasi organisasi sebagai Balai Monitor Kelas I, sehingga memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang relatif sebanding dalam pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio.

Selain itu, ketiga unit kerja tersebut juga memiliki cakupan wilayah kerja yang relatif sama. Balmon SFR Kelas I Samarinda memiliki wilayah kerja yang mencakup 10 Kab/Kota. Balmon SFR Kelas I Yogyakarta juga memiliki wilayah kerja sekitar 10 Kab/Kota yang mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Di sisi lain, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 12 Kab/Kota akan tetapi untuk cakupan luas wilayah masih dibawah Balmon Samarinda sehingga relatif sebanding.

Oleh karena itu, Balmon Pekanbaru dan Balmon Yogyakarta dapat dijadikan benchmark yang tepat untuk menilai capaian kinerja karena struktur organisasi dan cakupan wilayah kerja yang sebanding dengan Balmon Samarinda.

Hasil benchmarking tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan



program dan kegiatan. Praktik-praktik kinerja yang dinilai efektif dari unit kerja pembanding dapat dijadikan referensi dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, hasil benchmark ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas serta mendukung pencapaian target kinerja yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

d. **Analisis Pencapaian Target**

Pada IK-4 Kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

Pemeriksaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital bertujuan untuk memastikan setiap perangkat yang diproduksi, dirakit, diimport dan/atau diperdagangkan memenuhi standar teknis sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap jaringan telekomunikasi.

Pelaksanaan pemeriksaan menghadapi berbagai kendala, terutama faktor geografis di wilayah terpencil seperti Kalimantan Timur yang sulit diakses. Keterbatasan sumber daya, baik personel maupun efektivitas pengawasan. Komunikasi yang lebih baik dengan stakeholder diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan adanya standar teknis, ekosistem telekomunikasi dan digital dapat berkembang secara sehat, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. **Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Dalam meningkatkan efektivitas kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital, evaluasi rutin terhadap perdagangan perangkat di berbagai daerah Kabupaten / Kota sangat diperlukan.

Upaya perbaikan difokuskan pada penguatan tata kelola data hasil pemantauan dan pemeriksaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi, serta peningkatan pengelolaan sumber daya manusia guna mendukung efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap kepatuhan standar teknis. Penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti pelaku usaha, distributor perangkat, serta instansi pemerintah daerah, menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan pengawasan. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat terkait peredaran dan penggunaan perangkat di lapangan, serta mendorong peningkatan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan standar teknis.

Selain itu, kegiatan pemantauan rutin secara berkelanjutan untuk memastikan peredaran dan penggunaan perangkat tetap memenuhi ketentuan standar teknis dan sertifikasi yang berlaku, serta sebagai basis data dalam perencanaan kegiatan pengawasan berikutnya, termasuk penentuan lokasi prioritas dan identifikasi potensi ketidakpatuhan. Kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi dan digital dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terarah, sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat.

f. **Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya**

Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital, perlu dilakukan penguatan pelaksanaan monitoring melalui pendekatan yang lebih sistematis dan terarah, khususnya terhadap pengguna frekuensi radio serta distributor/perdagangan perangkat. Prioritas monitoring dapat difokuskan pada wilayah dan objek yang memiliki potensi ketidaksesuaian tinggi berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya.

Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna dan pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi guna mendorong kepatuhan secara

Tabel 3.25 .
Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Kegiatan Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	Balmon Samarinda	75	100	Persentase capaian kinerja Balmon Samarinda, Balmon Pekanbaru dan Balmon Yogyakarta, masing-masing telah mencapai 100%
	Balmon Pekanbaru	75	100	
	Balmon Yogyakarta	75	100	

preventif. Penguatan koordinasi dengan pihak terkait juga perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pengawasan dan tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian.

Di samping itu, optimalisasi pemanfaatan sistem pelaporan berbasis data digital perlu terus dikembangkan guna meningkatkan akurasi data, kemudahan pemantauan, serta kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dengan langkah tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital dapat meningkat secara berkelanjutan.

g. Efisiensi



Hingga akhir tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda telah merealisasikan anggaran kegiatan monitoring dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital sebesar Rp. 46,944,472.25 atau 99.72% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 47,076,250.00. Dengan demikian, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 131,777.75 atau 0,28% dari total pagu yang dialokasikan.

Efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dicapai melalui pengelolaan operasional yang lebih efektif, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan monitoring di lapangan. Penjadwalan kegiatan dilakukan secara lebih terstruktur dan terarah sehingga pelaksanaan monitoring terhadap pengguna frekuensi radio serta distributor/penjual alat dan/atau perangkat telekomunikasi dapat dilaksanakan secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang tersedia.

Selain itu, efisiensi juga didukung oleh optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana monitoring serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Melalui pengelolaan kegiatan yang terencana dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, kegiatan monitoring ini mampu mendukung peningkatan kepatuhan terhadap standar teknis alat

dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital di wilayah kerja Balmon Samarinda.

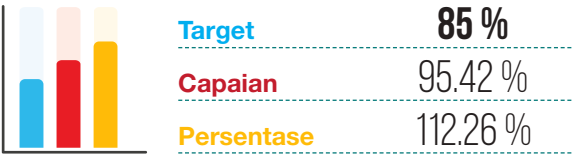
h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam upaya mencapai target indikator kinerja, implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini antara lain :

- 1) **Berorientasi Pelayanan:** Memberikan edukasi teknis untuk memastikan perangkat memenuhi spesifikasi kepada pelaku usaha, distributor, dan pengguna alat dan/atau perangkat telekomunikasi.
- 2) **Akuntabel:** Melaksanakan pemantauan dengan prosedur yang jelas dan terdokumentasi, serta menyusun laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) **Kompeten:** Meningkatkan keterampilan petugas melalui pelatihan dan penggunaan aplikasi SMART agar hasil pemantauan lebih akurat.
- 4) **Harmonis:** Membangun komunikasi yang baik dengan pelaku usaha, distributor, dan pengguna alat dan/atau perangkat telekomunikasi serta memberikan pembinaan bagi yang belum memenuhi standar.
- 5) **Loyal:** Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritas dalam melindungi kepentingan nasional dari perangkat ilegal/tidak sesuai standar.
- 6) **Adaptif:** Memanfaatkan sistem digital dalam monitoring kepatuhan, untuk meningkatkan efisiensi kerja.
- 7) **Kolaboratif:** Bekerja sama dengan pemerintah daerah, penyelenggara jasa telekomunikasi, dan pelaku usaha/distributor untuk memastikan alat dan/atau perangkat yang digunakan sesuai dengan standar teknis.

5. INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE (%) TERJAGANYA OPERASIONAL DAN FUNGSI MONITORING DARI STASIUN MONITOR FREKUENSI RADIO DI UPT



Target indikator kinerja ini adalah **85%**. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada bagan disebelah kiri ini, kemudian diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan dalam rangka capaian indikator kinerja.

Target indikator kinerja dalam bagan diatas mengacu pada Perjanjian Kinerja tiap tahun, yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMN. Perbandingan capaian dilakukan terhadap periode 2021–2025 untuk melihat perkembangan kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.26.
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja 2021-2025

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	97.26%	95%	100%	95%	100%	95%	100%	85%	95.42%

a. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan bebas dari gangguan interferensi, keberadaan Stasiun Monitor Frekuensi Radio pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki peran yang sangat strategis. Stasiun monitor berfungsi sebagai garda terdepan dalam melakukan pemantauan, pengukuran, deteksi, serta penanganan potensi pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja masing-masing. Oleh karena itu, terjaganya operasional dan fungsi monitoring secara optimal menjadi suatu keharusan guna menjamin efektivitas pengawasan spektrum frekuensi radio.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan penggunaan spektrum frekuensi radio, baik untuk layanan telekomunikasi, penyiaran, maupun kebutuhan lainnya, kompleksitas pengawasan juga semakin tinggi. Kondisi ini menuntut kesiapan infrastruktur monitoring yang andal, didukung oleh perangkat yang berfungsi dengan baik serta sumber daya manusia yang kompeten. Gangguan terhadap operasional stasiun monitor, baik yang disebabkan oleh faktor teknis, keterbatasan pemeliharaan, maupun kendala operasional lainnya, berpotensi menurunkan kualitas pengawasan dan berdampak



pada meningkatnya risiko interferensi serta pelanggaran penggunaan spektrum.

Untuk memastikan bahwa seluruh fungsi monitoring berjalan secara optimal, diperlukan suatu indikator kinerja yang mampu mengukur tingkat keterjagaan operasional stasiun monitor secara kuantitatif. Indikator Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT disusun sebagai alat ukur dalam menilai tingkat kesiapan, keandalan, dan keberlangsungan operasional perangkat monitoring yang dimiliki.

Melalui pengukuran indikator ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi operasional stasiun monitor, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pemeliharaan, serta penguatan sistem monitoring ke depan. Dengan demikian, keberlangsungan fungsi pengawasan spektrum frekuensi radio dapat tetap terjaga secara optimal dalam mendukung terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di Balmon Samarinda. Tingkat capaian kinerja diukur melalui pemenuhan Service Level Agreement (SLA) pada perangkat stasiun monitor tetap/transportable dan stasiun monitoring bergerak. Pemenuhan SLA tersebut dibuktikan melalui penyampaian data monitoring okupansi secara rutin sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan atau 1 (satu) kali setiap minggu. Adapun target capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebesar 85%.

c. Capaian Target

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja terkait terjaganya operasional dan fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT, sepanjang Januari hingga Desember 2025 telah dilaksanakan kegiatan okupansi pada perangkat stasiun monitor tetap/transportable serta stasiun monitor bergerak dengan capaian sebesar 95.42%. Capaian ini melebihi target capaian atau telah melampaui target sebesar 112.26% dari target 85%.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan stasiun monitor dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Selain itu, kegiatan monitoring juga bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai pemanfaatan spektrum frekuensi radio melalui sistem monitoring yang dimiliki.

Realisasi indikator kinerja terkait terjaganya operasional dan fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian sebesar 95,42% mengindikasikan bahwa kegiatan pengelolaan, pengoperasian, serta pemeliharaan stasiun monitor telah dilaksanakan secara efektif. Seluruh stasiun monitor, baik stasiun monitor tetap/transportable maupun stasiun monitor bergerak, dapat beroperasi dengan optimal sehingga mendukung pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Realisasi indikator kinerja terkait terjaganya operasional dan fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian sebesar 95.42% mengindikasikan bahwa kegiatan pengelolaan, pengoperasian, serta pemeliharaan stasiun monitor telah dilaksanakan secara efektif. Seluruh stasiun monitor, baik stasiun monitor tetap/transportable maupun stasiun monitor bergerak, dapat beroperasi dengan optimal sehingga mendukung pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa operasional dan pemanfaatan perangkat monitoring pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan pengelolaan sarana dan prasarana monitoring yang efektif serta konsistensi dalam penyampaian data monitoring yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh pemenuhan Service Level Agreement (SLA) perangkat monitoring, khususnya dalam hal penyampaian data monitoring. Pelaporan data monitoring melalui Aplikasi ROL telah dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali setiap bulan, sedangkan data monitoring okupansi disampaikan ke Sistem Monitoring Spektrum Nasional (SMSN) minimal 1 (satu) kali setiap minggu atau 4 (empat) kali dalam satu bulan. Konsistensi dalam pelaksanaan pelaporan tersebut menghasilkan capaian SLA sebesar 95,42%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 85%. Selain itu, SLA pada stasiun monitor bergerak juga dapat dipenuhi melalui penyampaian data monitoring ke ROL secara rutin setiap bulan.

Adapun perangkat SMFR yang diperhitungkan dalam pengukuran SLA di UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda adalah sebagai berikut.

Tabel 3.27.
Perangkat SMFR yang diperhitungkan dalam pengukuran SLA di UPT Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda

No	Nama Stasiun	Jenis Stasiun	Nama Barang	Merk/Tipe	Jenis Perangkat	Kondisi	Tahun Perolehan
1071	Balikipapan	Transportable	All Band Receiver	LStelcom FMU306	Utama	Baik	2016
1072	Balikipapan	Transportable	Antena	NTI GA3005	Utama	Baik	2016
1073	Balikipapan	Transportable	Antena	A-info PZ-1001800/P	Utama	Baik	2016
1074	Balikipapan	Transportable	Router	Mikrotik RB1100AHx2	Pendukung	Baik	2016
1075	Balikipapan	Transportable	UPS	APC	Pendukung	Baik	2016
1076	Berau	Transportable	All Band Receiver	LStelcom FMU306	Utama	Baik	2016
1077	BerauY	Transportable	Antena	NTI GA3005	Utama	Baik	2016
1078	Berau	Transportable	Antena	A-info PZ-1001800/P	Utama	Baik	2016
1079	Berau	Transportable	Router	Mikrotik RB1100AHx2	Pendukung	Baik	2016
1080	Berau	Transportable	UPS	APC	Pendukung	Baik	2016
1081	Kutai Timur	Transportable	All Band Receiver	LStelcom FMU306	Utama	Baik	2016
1082	Kutai Timur	Transportable	Antena	NTI GA3005	Utama	Baik	2016

No	Nama Stasiun	Jenis Stasiun	Nama Barang	Merk/Tipe	Jenis Perangkat	Kondisi	Tahun Perolehan
1083	Kutai Timur	Transportable	Antena	A-info PZ-1001800/P	Utama	Baik	2016
1084	Kutai Timur	Transportable	Router	Mikrotik RB1100AHx2	Pendukung	Baik	2016
1085	Kutai Timur	Transportable	UPS	APC	Pendukung	Baik	2016
1086	Mobil Mon DF	Bergerak	Antena	HE010	Utama	Baik	2023
1087	Mobil Mon DF	Bergerak	Antena	HE600	Utama	Baik	2023
1088	Mobil Mon DF	Bergerak	Antena	HF907OM	Utama	Baik	2023
1089	Mobil Mon DF	Bergerak	Antena DF	ADD295	Utama	Baik	2023
1090	Mobil Mon DF	Bergerak	Laptop	Laptop	Pendukung	Baik	2023
1091	Mobil Mon DF	Bergerak	Mast Tower	Telescopic Mast	Pendukung	Baik	2023
1092	Mobil Mon DF	Bergerak	Mobil Monitoring Frekuensi	Toyota Hilux	Pendukung	Baik	2023
1093	Mobil Mon DF	Bergerak	Radio Direction Finder	ESMD with DF (Front Panel)	Utama	Rusak	2023
1094	Mobil Mon DF	Bergerak	Software	Argus 6.1	Utama	Baik	2023
1095	Samarinda	Tetap VUHF	Antena	HE010	Utama	Baik	2010
1096	Samarinda	Tetap VUHF	Antena	HE500	Utama	Baik	2010
1097	Samarinda	Tetap VUHF	Antena DF	ADD295	Utama	Baik	2010
1098	Samarinda	Tetap VUHF	Radio Direction Finder	DDF255	Utama	Rusak	2010
1099	Samarinda	Tetap VUHF	Router	Router	Pendukung	Baik	2010
1100	Samarinda	Tetap VUHF	UPS	APC	Pendukung	Baik	2010



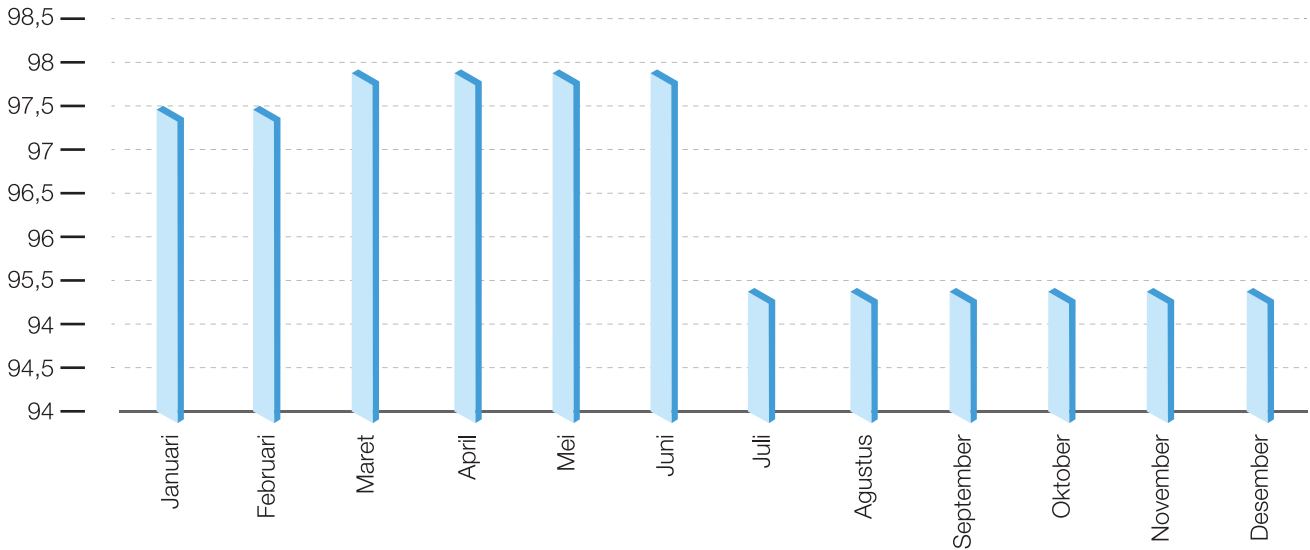
pemenuhan SLA perangkat monitoring, khususnya dalam penyampaian data monitoring secara berkala yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio.

Dengan capaian tersebut, Balmon Samarinda dapat dikatakan memiliki kinerja yang sangat baik serta berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan



UPT pembanding dalam indikator terjaganya operasional dan fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio. Hasil benchmark ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai sekaligus menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan monitoring spektrum frekuensi radio pada periode selanjutnya.

Grafik 3.3.
Capaian Berfungsinya Perangkat SMFR dalam Perhitungan Service Level Agreement (SLA)



BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Berdasarkan data pada tabel benchmark, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda menunjukkan capaian kinerja sebesar 95,42%, yang merupakan capaian tertinggi dibandingkan dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta sebesar 91,75% dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan sebesar 94%. Seluruh UPT pembanding tersebut berhasil melampaui

target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebesar 85%, yang menunjukkan bahwa operasional dan fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio di masing-masing UPT telah berjalan dengan baik.

Capaian kinerja Balmon Samarinda yang berada di atas UPT pembanding menunjukkan bahwa pengelolaan, pengoperasian, serta pemeliharaan perangkat monitoring telah dilaksanakan secara efektif. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam

Tabel 3.28 .
Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	Balmon Samarinda	85	95.42	Capaian kinerja seluruh UPT berada di atas target, menunjukkan operasional dan fungsi monitoring berjalan baik
	Balmon Jakarta	85	91.75	
	Balmon Medan	85	94	

d. Analisis Pencapaian Target

Dalam rangka menjaga operasional serta fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan perangkat sepanjang tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh perangkat monitoring dapat beroperasi secara optimal serta sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

- ❖ **Faktor Keberhasilan pada Pencapaian Target**
Pencapaian indikator kinerja didukung oleh operasional stasiun monitor yang berfungsi dengan baik, pemeliharaan perangkat secara berkala, kepatuhan penyampaian data sesuai standar layanan, serta koordinasi internal yang

efektif dan pemanfaatan sistem ROL dan SMSN secara optimal.

Optimalisasi kinerja didukung oleh seluruh jenis stasiun monitor (tetap, bergerak, portable, dan transportable) yang memungkinkan pemantauan spektrum secara luas dan real time. Pada tahun 2025, perbaikan perangkat transportable di wilayah Sangatta yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat sambaran petir berhasil diperbaiki, sehingga meningkatkan cakupan pemantauan spektrum frekuensi radio.

Keberhasilan ini juga ditopang oleh penerapan pemeliharaan preventif dan korektif, modernisasi perangkat, serta kerja sama dengan

pihak ketiga yang kompeten sehingga menjamin pemeliharaan perangkat sesuai dengan standar teknis,

❖ **Faktor Kendala pada Pencapaian Target**

Dalam pelaksanaan upaya menjaga operasional dan fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio di UPT, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama, yaitu teknis, Sumber Daya Manusia (SDM), dan infrastruktur.

1). Faktor Teknis

Sebagian perangkat monitoring yang telah beroperasi lebih dari lima tahun memerlukan pemeliharaan yang lebih intensif. Selain itu, keterbatasan fitur pada beberapa perangkat menyebabkan efektivitas monitoring spektrum belum optimal, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi terbaru seperti 5G dan Internet of Things (IoT).

2). Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah tenaga teknis menyebabkan kegiatan pengawasan serta pemeliharaan perangkat belum dapat dilaksanakan secara maksimal, khususnya ketika terjadi kerusakan pada lebih dari satu perangkat dalam waktu yang bersamaan.

3). Faktor Infrastruktur

Beberapa lokasi stasiun monitor transportable masih mengalami kendala jaringan internet yang mempengaruhi kelancaran operasional perangkat monitoring yang dioperasikan secara jarak jauh.

❖ **Upaya Percepatan dalam Mencapai Target/ Upaya Perbaikan (Solusi)**

Upaya yang dilakukan terkait dengan indikator kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio, meliputi:

Modernisasi perangkat pemantauan frekuensi radio dilakukan melalui penerapan teknologi yang lebih canggih, fleksibel, dan efisien. Salah satunya melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan machine learning dalam analisis spektrum frekuensi, otomatisasi penyusunan laporan, serta sistem peringatan dini. Dengan teknologi tersebut, sistem dapat menghasilkan laporan secara otomatis ketika

terjadi penyimpangan spektrum maupun gangguan pada perangkat, sehingga proses pemeliharaan dan perbaikan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

Peningkatan SDM teknis juga menjadi perhatian utama. Hal ini dilakukan melalui penambahan tenaga teknis serta penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi terkait pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR), baik pada tingkat nasional maupun internasional melalui lembaga seperti ITU dan IEEE.

Penyediaan sistem redundansi dan backup dilakukan menggunakan skema multi-provider. Sistem ini memanfaatkan dua atau lebih penyedia layanan internet (ISP) yang berbeda guna meminimalkan risiko terputusnya koneksi apabila salah satu jaringan mengalami gangguan. Selain itu, penggunaan teknologi dual SIM atau multi-network memungkinkan perangkat secara otomatis beralih ke jaringan yang lebih stabil.



Dengan penerapan berbagai langkah tersebut, kendala jaringan internet pada sistem remote monitoring dapat diminimalkan secara efektif. Hal ini diharapkan mampu memastikan operasional perangkat monitoring tetap berjalan optimal serta mendukung tercapainya sasaran kinerja meskipun berada pada wilayah dengan keterbatasan infrastruktur jaringan.

e. **Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Untuk menjaga konsistensi serta meningkatkan kinerja operasional dan fungsi pemantauan Stasiun Monitor Frekuensi Radio, diperlukan pemeliharaan dan perbaikan perangkat secara berkelanjutan. Setiap kendala yang muncul perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi pemeliharaan atau perbaikan perangkat pendukung SMFR, alat monitoring, serta pengambilan kebijakan yang mendukung optimalisasi pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan evaluasi pengoperasian dan pemanfaatan stasiun monitor transportable pada tahun sebelumnya, Balmon Samarinda berhasil memperbaiki perangkat *Transportable* pada tahun 2025. Langkah ini bertujuan agar Stasiun Monitor Transportable dapat beroperasi lebih efektif dan optimal dalam mendukung pemantauan spektrum frekuensi radio di Kabupaten Kutai Timur.

f. **Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya**

Untuk meningkatkan efektivitas operasional serta fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala serta meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang. Rekomendasi yang dapat diterapkan meliputi optimalisasi infrastruktur dan teknologi monitoring khususnya peningkatan kualitas jaringan internet, penguatan infrastruktur listrik khususnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai alternatif pasokan listrik, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan peningkatan mobilitas dan efisiensi stasiun monitor transportable. Melalui penerapan langkah tersebut, monitoring spektrum frekuensi radio diharapkan dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan efisien dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

g. **Efisiensi**

PAGU ANGGARAN

100 %

Rp. 135.612.000,00



Realisasi anggaran pemeliharaan perangkat monitoring yang mencapai 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 135.612.000,00 menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam program kerja dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional. Penyerapan anggaran secara penuh ini mencerminkan bahwa perencanaan kegiatan dan alokasi anggaran telah disusun secara realistis dan tepat sasaran untuk mendukung terjaganya operasional serta fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio di UPT.

Di sisi lain, efektivitas pemanfaatan anggaran tersebut juga didukung oleh pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang efisien. Optimalisasi peran pejabat fungsional Pengendali Frekuensi Radio dalam kegiatan pemeliharaan, pengawasan kondisi perangkat, serta penanganan gangguan teknis memungkinkan sebagian kegiatan teknis dapat ditangani secara internal tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pihak ketiga. Hal ini meningkatkan efisiensi proses kerja sekaligus mempercepat respons terhadap kerusakan perangkat pendukung monitoring.

Dengan demikian, meskipun tingkat efisiensi anggaran tercatat 0% karena seluruh anggaran terserap sesuai perencanaan, efisiensi tetap tercermin dari aspek pengelolaan SDM dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Optimalisasi SDM internal memungkinkan penggunaan anggaran lebih terarah pada kebutuhan teknis yang bersifat prioritas, sehingga kegiatan pemeliharaan perangkat monitoring dapat terlaksana secara efektif serta mendukung tercapainya sasaran kinerja organisasi.

h. **Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK**

Pada sasaran kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT, Balmon Samarinda telah mengimplementasikan budaya nilai BerAKHLAK sebagai berikut :

- a. **Berorientasi Pelayanan.** Berkomitmen untuk memaksimalkan kinerja perangkat guna memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan serta optimalisasi dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, sehingga tercipta sistem komunikasi yang tertib, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- b. **Akuntabel.** Dalam melaksanakan pemeliharaan perangkat serta penyampaian data, selalu bertindak dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
- c. **Kompeten.** Untuk mewujudkan capaian kinerja dalam memastikan terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT perlu didukung oleh tim kerja yang terdiri dari Tim Pengendali Frekuensi Radio yang kompeten serta senantiasa meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta workshop atau sosialisasi yang relevan dengan tugasnya.
- d. **Harmonis.** Menunjukkan sikap ramah, santun, dan peduli dalam setiap interaksi, serta saling tolong-menolong untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, berkomunikasi dengan baik di lingkungan internal maupun eksternal untuk membangun hubungan yang positif dan mendukung tercapainya tujuan bersama.

- e. **Loyal.** Menunjukkan dedikasi tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan, senantiasa menjaga nama baik instansi dan pimpinan melalui sikap profesional, integritas, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta berkomitmen untuk mendukung visi dan misi organisasi dengan memberikan kontribusi terbaik demi kepentingan bersama.
- f. **Adaptif.** Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berkembang, termasuk mengikuti kemajuan teknologi dan menghadapi permasalahan yang timbul, khususnya dalam hal pemeliharaan perangkat SMFR, senantiasa terbuka terhadap perubahan dan siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dan pemeliharaan perangkat.
- g. **Kolaboratif.** Bekerja sama dengan penuh rasa saling menghargai, terbuka terhadap masukan yang konstruktif, berkomitmen untuk bersama-sama mencapai kemajuan serta menjalin hubungan yang harmonis dan produktif baik di lingkungan internal maupun eksternal guna mendukung pencapaian tujuan organisasi.



Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Dengan adanya regulasi tersebut, proses penanganan sanksi denda administratif dilaksanakan secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Indikator kinerja penanganan sanksi denda administratif menjadi penting sebagai alat ukur efektivitas pengawasan serta tingkat kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di wilayah kerja. Tujuan dilakukannya penanganan sanksi denda administratif adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepatuhan pengguna ISR, IPFR, serta alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penegakan hukum administratif di bidang spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.

b. Sasaran Kegiatan

Target Indikator Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif Sasaran kegiatan ini adalah semua pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi yang akan dikenakan denda administratif di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Target indikator kinerja ini ditetapkan sebesar 80%.

c. Capaian Target

Berdasarkan Perjanjian Kinerja UPT di Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital tahun 2025, target untuk IK-6 adalah 80%. Untuk perhitungan Persentase

pengenaan sanksi denda administratif adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\Sigma \text{ Inv. Denda yang terbayar} + (\text{Bobot} \times \text{Tindak Lanjut Inv. Denda Belum terbayar}) + \text{Inv. Baru Belum Jatuh Tempo}}{\Sigma \text{ Inv. Denda Administratif}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Total Invoice Denda Administratif:
 - Invoice aktif
 - Exclude Invoice Expires dan Canceled
2. Tindak Lanjut Invoice Denda Belum Terbayar berupa:
 - Penyampaian Surat Reminder
 - Hasil Klarifikasi dengan UPT untuk Denda Belum Terbayar
 - Bobot Tindak Lanjut Invoice Berdasarkan Surat Reminder
 - a. Reminder 1 : 0.9
 - b. Reminder 2 : 0.8
 - c. Reminder 3 : 0.7
 - d. Pelimpahan KPKNL : 0.6

Target kegiatan penanganan sanksi denda administratif adalah semua pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi yang akan dikenakan denda administratif. Target Pengenaan Denda Jumlah invoice denda yang menjadi target di suatu bulan adalah akumulasi dari invoice bulan sebelumnya dalam tahun yang sama dan untuk target bulanan di setiap UPT adalah sebagai berikut:

1. Target Persentase pengenaan sanksi denda administratif triwulan pertama (Januari, Februari, Maret) minimal 60%.
2. Target Persentase pengenaan sanksi denda administratif triwulan kedua (April, Mei, Juni) minimal 65%.
3. Target Persentase pengenaan sanksi denda administratif triwulan ketiga (Juli, Agustus, September) minimal 70%.
4. Target Persentase pengenaan sanksi denda administratif triwulan keempat (Oktober, November) minimal 75%.
5. Target Persentase Bulan Desember 80%.

Pada pelaksanaannya selama tahun 2025, jumlah invoice yang diterbitkan dalam rangka penanganan sanksi denda administratif di Balai Monitor Samarinda tercatat sebanyak 32 invoice. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 invoice telah diselesaikan melalui pembayaran oleh pihak yang dikenakan

6. INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE (%) PENANGANAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF



Target indikator kinerja ini adalah 80%. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada bagan di sebelah kiri, kemudian diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan dalam rangka capaian indikator kinerja ini.

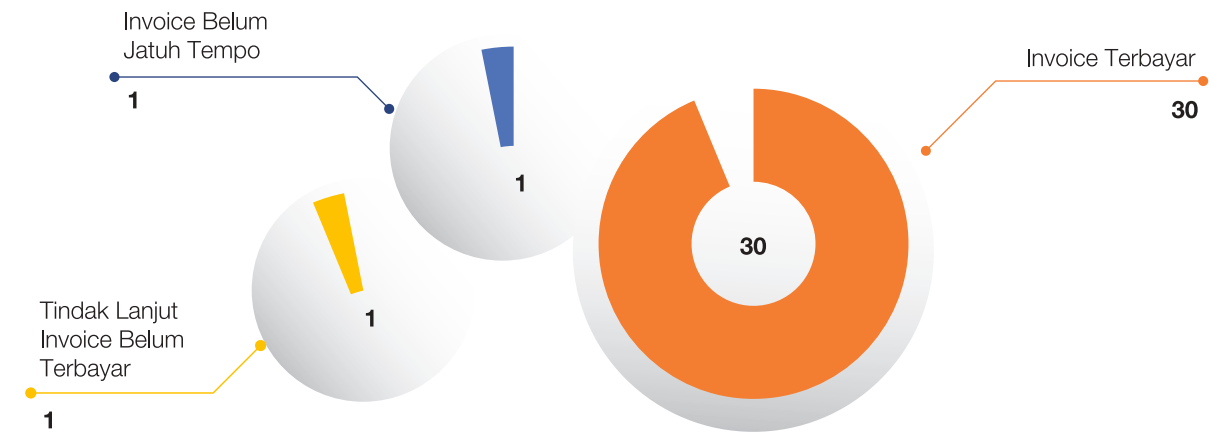
a. Latar Belakang

Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio serta penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya terbatas yang harus dilaksanakan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, dilaksanakan kegiatan monitoring dan penertiban Spektrum Frekuensi Radio serta pengawasan terhadap penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi.

Berdasarkan hasil monitoring dan penertiban, masih ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan Izin Stasiun Radio maupun penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan. Terhadap pelanggaran tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagai bentuk pembinaan dan penegakan hukum administratif. Pelaksanaan pengenaan sanksi denda administratif mengacu pada ketentuan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, serta Peraturan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan

sanksi. Sementara itu, terdapat 1 invoice yang masih dalam proses tindak lanjut penagihan dan telah mencapai tahap pengiriman pengingat ketiga (reminder 3), serta 1 invoice lainnya belum jatuh tempo

Bagan 3.1.
Penanganan Sanksi Administratif



Perhitungan persentase capaian untuk indikator ini adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\Sigma \text{ Inv. Denda yang terbayar} + (\text{Bobot} \times \text{Tindak Lanjut Inv. Denda Belum terbayar}) + \text{Inv. Baru Belum Jatuh Tempo}}{\Sigma \text{ Inv. Denda Administratif}} \times 100\%$$

sehingga

$$= \frac{30 + 0,7 + 1}{30} \times 100\% = 0.9906 \times 100\% = 99.06\%$$

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa target pada indikator kinerja tersebut telah melampaui capaian target yang ditentukan yaitu sebesar 80%.

CAPAIAN KOMULATIF TIAP BULAN

Tabel 3.29.
Capaian Kumulatif Tiap Bulan Penanganan Sanksi Denda Administratif

Penanganan Sanksi Denda Administratif	
Bulan	%Capaian
Januari	86.67%
Februari	83.33%
Maret	90.00%
April	90.00%
Mei	100.00%
Juni	100.00%
Juli	99.00%
Agustus	98.00%
September	98.00%
Oktober	98.23%
November	99.00%
Desember	99.06%



BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Dalam rangka melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi, dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru, dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta. Ketiga unit kerja tersebut memiliki kesamaan klasifikasi organisasi sebagai Balai Monitor Kelas I, sehingga memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang relatif sebanding dalam pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio.

Selain itu, ketiga unit kerja tersebut juga memiliki cakupan wilayah kerja yang relatif sama. Balmon SFR Kelas I Samarinda memiliki wilayah kerja yang mencakup 10 Kab/Kota. Balmon SFR Kelas I Yogyakarta juga memiliki wilayah kerja sekitar 10 Kab/Kota yang mencakup wilayah Daerah Istimewa

Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Di sisi lain, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 12 Kab/Kota yang mencakup wilayah Provinsi Riau. Oleh karena itu, Balmon Pekanbaru dan Balmon Yogyakarta dapat dijadikan benchmark yang tepat untuk menilai capaian kinerja karena struktur organisasi dan cakupan wilayah kerja yang sebanding dengan Balmon Samarinda.

Hasil benchmarking tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Praktik-praktik kinerja yang dinilai efektif dari unit kerja pembanding dapat dijadikan referensi dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, hasil benchmark ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas serta mendukung pencapaian target kinerja yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.30 .
Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%)Penanganan Sanksi Denda Administratif	Balmon Samarinda	80	99.06	Persentase capaian kinerja Balmon Samarinda sebesar 99.06%, Balmon Pekanbaru sebesar 100% dan Balmon Yogyakarta sebesar 99.09%
	Balmon Pekanbaru	80	100	
	Balmon Yogyakarta	80	99.09	

d. Analisis Pencapaian Target

Penanganan sanksi denda administratif merupakan salah satu indikator kinerja yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas temuan pelanggaran yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan penertiban di lapangan, baik terkait penggunaan Izin Stasiun Radio (ISR), Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), maupun penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada pelaksanaan tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Samarinda telah menerbitkan sebanyak 32 invoice penanganan sanksi denda administratif sebagai tindak lanjut dari pelanggaran yang ditemukan selama kegiatan pengawasan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 invoice telah diselesaikan melalui pembayaran oleh pihak yang dikenakan sanksi, sementara 1 invoice masih dalam proses tindak lanjut penagihan dan telah mencapai tahap pengiriman pengingat ketiga (reminder 3), serta 1 invoice masih belum jatuh tempo. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar proses penanganan sanksi denda administratif dapat diselesaikan secara efektif, sehingga capaian indikator kinerja dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dalam pencapaian target indikator ini tidak terlepas dari beberapa strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penanganan pelanggaran. Salah satu strategi utama adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio secara rutin dan terencana sehingga potensi pelanggaran dapat teridentifikasi secara lebih dini. Selain itu, koordinasi yang baik antara tim monitoring dan penertiban dengan unit kerja terkait dalam proses administrasi pengenaan sanksi juga turut mendukung kelancaran proses penerbitan dan penagihan invoice sanksi administratif. Pemanfaatan sistem administrasi dan pengelolaan data yang terstruktur juga membantu mempercepat proses verifikasi pelanggaran, penerbitan dokumen sanksi, serta pemantauan status pembayaran.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kecepatan penyelesaian penanganan sanksi administratif. Kendala tersebut antara lain



keterlambatan pembayaran dari pihak yang dikenakan sanksi. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya percepatan dan perbaikan dalam proses penanganan sanksi administratif, antara lain melalui peningkatan intensitas koordinasi dengan pihak yang dikenakan sanksi, penyampaian pengingat pembayaran secara berkala, serta optimalisasi pemantauan status penyelesaian invoice melalui sistem administrasi yang tersedia. Di samping itu, kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pengguna spektrum frekuensi radio juga terus dilakukan guna meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban perizinan serta ketentuan penggunaan frekuensi radio yang berlaku.

Pencapaian indikator penanganan sanksi denda administratif memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio dalam memenuhi ketentuan perizinan dan penggunaan frekuensi radio secara tertib. Selain itu, pelaksanaan sanksi administratif juga berperan sebagai bentuk pembinaan dan penegakan aturan yang mendorong terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan penanganan pelanggaran, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengawasan spektrum frekuensi radio secara keseluruhan.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator penanganan sanksi denda administratif dimanfaatkan sebagai salah satu bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan penegakan ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio serta alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Hasil capaian kinerja yang telah diperoleh digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio serta mengidentifikasi pola pelanggaran yang masih sering terjadi di wilayah kerja.

Pemanfaatan laporan kinerja tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk tindak lanjut kegiatan. Pertama, hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan perencanaan kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio pada periode berikutnya, khususnya dalam menentukan wilayah prioritas pengawasan yang memiliki potensi pelanggaran lebih tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Kedua, laporan kinerja juga dimanfaatkan sebagai

bahan evaluasi terhadap proses administrasi penanganan sanksi denda administratif, termasuk dalam proses klarifikasi pelanggaran, penerbitan invoice, serta pemantauan status penyelesaian pembayaran. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penanganan sanksi administratif dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Selain itu, hasil laporan kinerja juga dimanfaatkan sebagai bahan pembinaan dan sosialisasi kepada para pengguna spektrum frekuensi radio. Informasi mengenai jenis pelanggaran yang ditemukan dan tindak lanjut yang diberikan dapat menjadi bahan edukasi bagi pengguna agar lebih memahami ketentuan penggunaan frekuensi radio serta kewajiban perizinan yang harus dipenuhi. Melalui kegiatan pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pengguna serta mengurangi potensi pelanggaran pada masa yang akan datang.

Di samping itu, laporan kinerja juga digunakan sebagai bahan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio. Hasil evaluasi yang diperoleh dari laporan kinerja menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan serta penguatan mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Samarinda.

Dengan pemanfaatan laporan kinerja secara optimal, diharapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penanganan sanksi administratif dapat terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga mampu mendukung terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio serta meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap ketentuan yang berlaku.

f. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator penanganan sanksi denda administratif pada periode selanjutnya, diperlukan beberapa langkah perbaikan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas pengawasan serta percepatan proses penanganan pelanggaran. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, khususnya terkait kendala yang masih ditemui dalam



proses identifikasi dan klarifikasi hasil pelanggaran, penerbitan sanksi administratif, serta penyelesaian pembayaran denda administratif.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan intensitas kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio secara lebih terencana dan terarah, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penggunaan frekuensi radio yang tinggi atau berpotensi menimbulkan gangguan. Dengan peningkatan kegiatan

pengawasan tersebut, potensi pelanggaran dapat teridentifikasi lebih dini sehingga proses penanganan sanksi administratif dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Rekomendasi lainnya adalah peningkatan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pengguna spektrum frekuensi radio terkait kewajiban perizinan serta ketentuan penggunaan frekuensi radio yang berlaku. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman pengguna sehingga dapat mendorong peningkatan tingkat kepatuhan serta meminimalkan potensi pelanggaran yang berulang di masa mendatang.

Di samping itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung kelancaran proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sanksi administratif. Sinergi antar pihak diharapkan dapat mempercepat proses tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio.

Dengan penerapan berbagai langkah perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif pada periode mendatang dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja.

g. Efisiensi

Efisiensi penanganan denda administratif diukur melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui penerapan sistem pengenaan dan pembayaran denda yang telah berbasis *online*. Digitalisasi proses ini memungkinkan seluruh tahapan penanganan pelanggaran, mulai dari penetapan sanksi hingga penyelesaian pembayaran, dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan minim proses manual.

Efisiensi tersebut tercermin dari percepatan waktu penyelesaian penanganan kasus serta peningkatan produktivitas petugas melalui pengurangan beban administrasi. Selain itu, sistem berbasis online juga meningkatkan akurasi data, transparansi, serta kemudahan dalam pemantauan status penyelesaian denda secara *real-time*.

Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, proses penanganan denda administratif dapat dilaksanakan

secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio terhadap ketentuan yang berlaku.

h. Implementasi Budaya Nilai Berakhlak

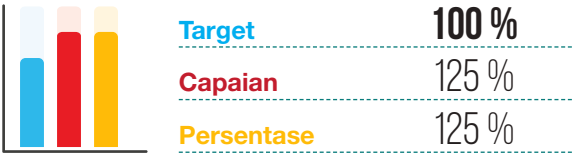
1. **Berorientasi Pelayanan** : diwujudkan melalui pelaksanaan penanganan sanksi administratif secara profesional dan responsif, dengan memberikan informasi yang jelas kepada pengguna spektrum frekuensi radio mengenai ketentuan perizinan serta mekanisme penyelesaian sanksi yang harus dipenuhi.
2. **Akuntabel** : tercermin dalam pelaksanaan proses penanganan sanksi denda administratif yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahapan penanganan pelanggaran, mulai dari identifikasi pelanggaran, verifikasi dan klarifikasi data, hingga penerbitan invoice sanksi administratif dilakukan secara tertib administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
3. **Kompeten** : diwujudkan melalui peningkatan kemampuan dan pemahaman teknis petugas dalam melaksanakan kegiatan monitoring, identifikasi pelanggaran, serta proses administrasi penanganan sanksi administratif.
4. **Harmonis** : tercermin melalui upaya menjaga hubungan kerja yang baik antara petugas Balai Monitor dengan para pengguna spektrum frekuensi radio maupun instansi terkait. Pendekatan yang komunikatif dan persuasif dalam proses pembinaan kepada pengguna frekuensi radio diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
5. **Loyal** : diwujudkan melalui komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
6. **Adaptif** : tercermin dalam kemampuan petugas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi telekomunikasi serta dinamika penggunaan spektrum frekuensi radio yang terus berkembang. Selain itu, petugas juga dituntut untuk senantiasa memperbarui pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi terbaru.



7. **Kolaboratif** : diwujudkan melalui penguatan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik dengan unit kerja internal maupun dengan instansi eksternal, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan penanganan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio.

7. INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE (%) TERSEDIAINYA DATA HASIL PENGUKURAN KUALITAS LAYANAN



Target indikator kinerja pengukuran kualitas layanan jaringan bergerak seluler di Kabupaten/Kota pada tahun 2025 adalah **100%** dari jumlah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja.

a. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi bergerak telah menjadi pilar utama dalam infrastruktur digital nasional. Jaringan bergerak seluler tidak hanya mendukung komunikasi suara dan pesan singkat, tetapi juga menjadi pusat layanan data, transaksi digital, layanan public berbasis elektronik, ekonomi digital, hingga transformasi industri.

Dengan meningkatnya penetrasi smartphone dan kebutuhan akses internet berkecepatan tinggi, kualitas layanan jaringan seluler menjadi faktor strategis dalam menjamin konektivitas yang andal, cepat, dan aman. Dalam peningkatan mutu layanan diharapkan dapat memenuhi standar kualitas layanan (Quality of Service/QoS) serta memberikan pengalaman pengguna (Quality of Experience/QoE) yang optimal.

Variasi kondisi geografis, kepadatan pengguna, kapasitas jaringan, serta faktor teknis lainnya dapat mempengaruhi kualitas layanan yang dirasakan oleh pelanggan. Parameter seperti kekuatan sinyal (signal strength), kecepatan unduh dan unggah (throughput), latensi, tingkat keberhasilan panggilan (call success rate), dan tingkat kegagalan panggilan (drop call rate) menjadi indikator penting dalam menilai performa jaringan.

Pengukuran kualitas layanan jaringan bergerak seluler secara sistematis dan terstandar, guna memastikan layanan telekomunikasi memenuhi standar mutu yang ditetapkan, menjaga kepuasan pelanggan, serta mendukung pembangunan infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di wilayah kerja Balmon Samarinda.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah pengukuran standar kualitas layanan jaringan bergerak seluler kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri dari 7 kabupaten dan 3 kota, selama tahun anggaran 2025. Balmon Samarinda telah menyelesaikan target IK-7 mengenai tersedianya data pengukuran kualitas

jaringan bergerak seluler yaitu 100% di Kabupaten/Kota termonitor.

c. Capaian Target

Perhitungan capaian Indikator Kinerja ini menggunakan formula berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah kabupaten / kota yang sudah diukur}}{\text{Jumlah 100\% kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Target : Pengukuran kualitas layanan dilaksanakan di 80% kabupaten/kota wilayah kerja UPT.

Pelaporan:

- Hasil pengukuran kualitas layanan akan disampaikan kepada Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital untuk ditindaklanjuti melalui pengolahan data (post-processing) Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT).
- Hasil pengolahan data (post-processing) disampaikan kembali oleh Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) kepada Balmon Samarinda untuk dilakukan analisis atau pelaporan.

Berdasarkan formula tersebut, untuk memperoleh capaian hasil pengukuran kualitas layanan maka Balmon Samarinda melakukan pengukuran sebanyak 10x di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data selama bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dinyatakan bahwa capaian kinerja kualitas layanan mencapai 125%, hal tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% atau kegiatan sebanyak 8 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja.

CAPAIAN KUMULATIF TIAP BULAN

Tabel 3.31.
Tabel Capaian Kumulatif Tiap Bulan Pengukuran Kualitas Layanan

Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan		
Bulan	Kabupaten/Kota	%Capaian
Januari	-	0.0%
Februari	-	0.0%
Maret	-	0.0%
April	-	0.0%
Mei	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara	25.0%
Juni	Kota Samarinda	37.5%
Juli	-	0.0%
Agustus	Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang	62.5%
September	Kabupaten Berau	87.5%
Oktober	Kabupaten Kutai Timur	87.5%
November	Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda	112.5%
Desember	Kota Balikpapan	125.0%

PROSEDUR PENUGASAN

a). Static Test

Static test merupakan pengambilan pengukuran parameter standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler secara tetap di titik-titik yang ditentukan pada 1 (satu) kota atau kabupaten yang berfokus di pusat pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, pemukiman, dan point of interest lain yang diperlukan.



Tabel 3.32.
Prosedur Penugasan Static Test

Jenis Pengukuran	
1.	Point of interest pengukuran reguler
2.	Point of interest pengukuran insidentil (sesuai kebutuhan)
Jenis Layanan yang Diukur	
1.	Youtube Streaming
2.	Browsing
3.	Speedtest Crowdsourcing
4.	File Transfer Protocol DL & UL Test
5.	Http DL & UL Test
6.	Ping Test
7.	Whatsapp Call
8.	Whatsapp Message

b). Drive Test

Drive Test merupakan pengambilan pengukuran parameter standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dengan mengikuti rute yang telah ditetapkan. Rute tersebut meliputi jalan protokol, wilayah bisnis dan pemukiman, sarana transportasi umum, dan rute lain yang diperlukan. Metode ini dapat menjadi acuan kualitas layanan telekomunikasi di suatu lokasi kota atau kabupaten. Penyelenggara jaringan bergerak seluler harus memenuhi parameter dan tolok ukur kualitas kinerja jaringannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



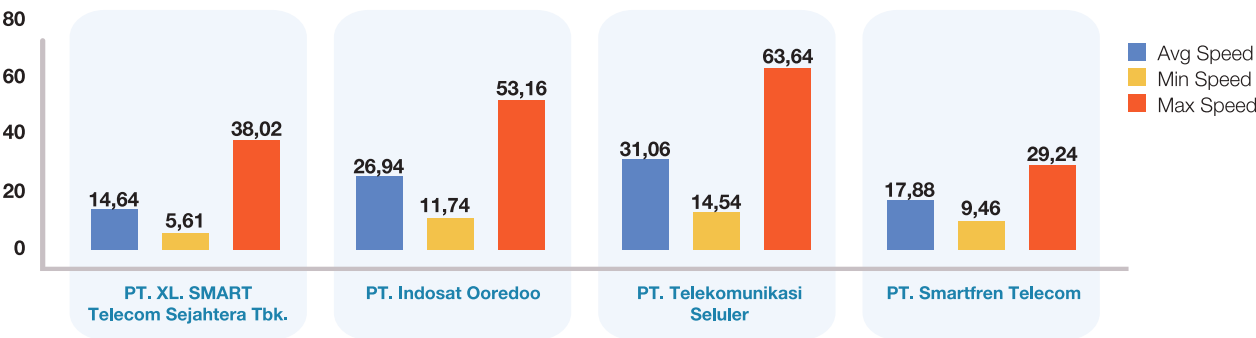
IDENTIFIKASI HASIL

Tingkat keberhasilan capaian kinerja pengukuran kualitas layanan jaringan bergerak seluler selama tahun 2025 dapat dilihat dari hasil berikut:

Tabel 3.33.
Identifikasi Hasil Unduh Data (Downlink)

No	Kategori	Avg Speed	Min Speed	Max Speed
1.	PT. XLSMART Telecom Sejahtera Tbk	14.64	5.61	38.02
2.	PT. Indosat Ooredoo	26.94	11.74	53.15
3.	PT. Telekomunikasi Seluler	31.06	14.54	63.64
4.	PT. Smartfren Telecom	17.88	9.46	29.24

Grafik 3.4.
Identifikasi Hasil Unduh Data (Downlink)

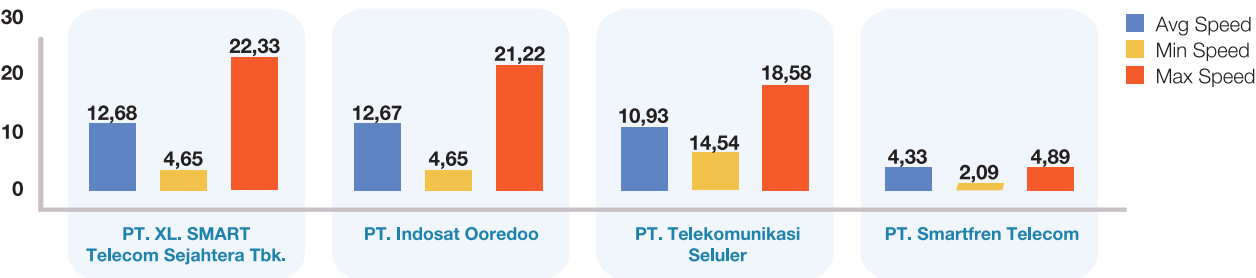


Berdasarkan identifikasi hasil unduh data (Downlink) kecepatan jaringan dari empat operator telekomunikasi, dapat disimpulkan bahwa PT. Telekomunikasi Seluler memiliki performa jaringan paling baik karena mencatat rata-rata kecepatan tertinggi sebesar 31,06 Mbps, nilai kecepatan minimum 14,54 Mbps dan maksimum 63,64 Mbps, yang menunjukkan kecepatan sekaligus kestabilan jaringan yang lebih unggul dibandingkan operator lainnya. Di posisi kedua terdapat PT. Indosat Ooredoo, diikuti oleh PT. Smartfren Telecom, sedangkan PT. XLSMART Telecom Sejahtera Tbk memiliki rata-rata kecepatan paling rendah yaitu 14,64 Mbps. Secara umum, data ini menunjukkan adanya perbedaan performa jaringan antar operator, dengan Telkomsel sebagai operator dengan kualitas kecepatan paling unggul dalam pengujian tersebut.

Tabel 3.34.
Identifikasi Hasil Upload Data (Uplink)

No	Kategori	Avg Speed	Min Speed	Max Speed
1.	PT. XLSMART Telecom Sejahtera Tbk	12.68	4.65	22.33
2.	PT. Indosat Ooredoo	12.67	4.65	21.22
3.	PT. Telekomunikasi Seluler	10.93	4.17	18.58
4.	PT. Smartfren Telecom	4.33	2.09	4.89

Grafik 3.5.
Identifikasi Hasil Unduh Data (Uplink)

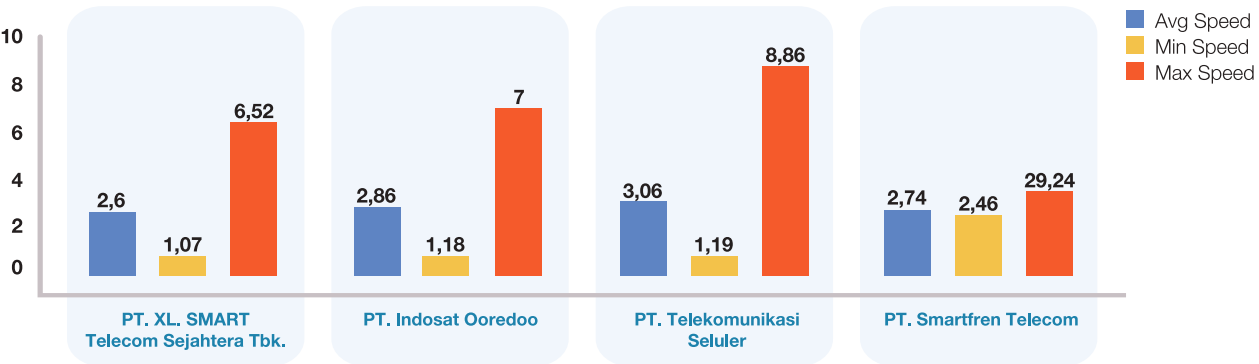


Berdasarkan hasil pengukuran kecepatan unggah data (uplink) pada beberapa operator telekomunikasi, terlihat bahwa PT. XLSMART Telecom Sejahtera Tbk memiliki rata-rata kecepatan unggah tertinggi yaitu 12,68 Mbps dengan kecepatan maksimum mencapai 22,33 Mbps. Posisi kedua ditempati oleh PT. Indosat Ooredoo Hutchison Tbk dengan rata-rata 12,67 Mbps dan maksimum 21,22 Mbps, yang menunjukkan performa hampir setara dengan XLSMART. Sementara itu, PT. Telekomunikasi Seluler memiliki rata-rata kecepatan unggah 10,93 Mbps dengan maksimum 18,58 Mbps, sedikit lebih rendah dibanding dua operator sebelumnya. Di sisi lain, PT. Smartfren Telecom Tbk menunjukkan performa paling rendah dengan rata-rata kecepatan unggah 4,33 Mbps dan maksimum 4,89 Mbps. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa XLSMART dan Indosat memiliki kinerja uplink yang lebih baik dibandingkan operator lainnya pada data pengukuran tersebut

Tabel 3.35.
Identifikasi Hasil Web Test Browsing Speed (Mbps)

No	Kategori	Avg Speed	Min Speed	Max Speed
1.	PT. XLSMART Telecom Sejahtera Tbk	2.6	1.07	6.52
2.	PT. Indosat Ooredoo	2.86	1.18	7
3.	PT. Telekomunikasi Seluler	3.06	1.19	8.86
4.	PT. Smartfren Telecom	2.74	2.46	4.76

Grafik 3.6.
Identifikasi Hasil Web Test Browsing Speed (Mbps)

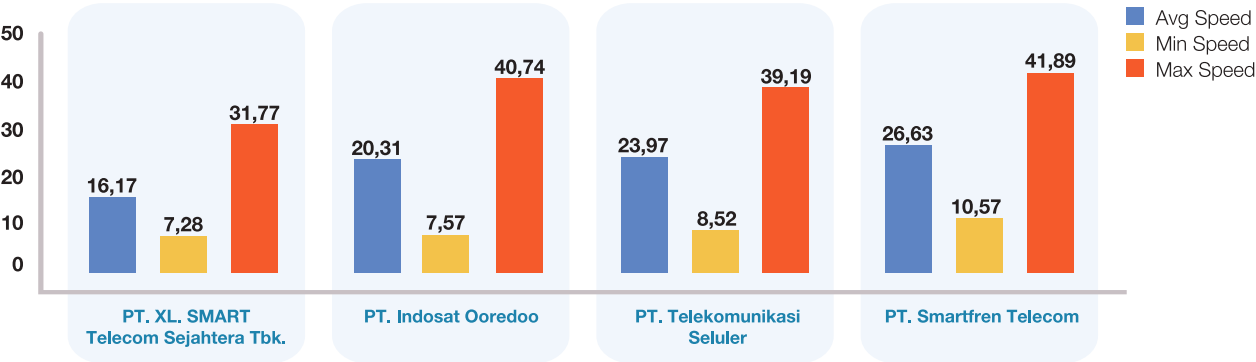


Berdasarkan hasil *Web Test Browsing Speed*, terlihat bahwa PT. Telekomunikasi Seluler memiliki performa *browsing* terbaik dengan rata-rata kecepatan 3,06 Mbps dan kecepatan maksimum 8,86 Mbps, sehingga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memuat halaman web dibanding operator lainnya. Selanjutnya, PT. Indosat Ooredoo Hutchison Tbk menempati posisi kedua dengan rata-rata 2,86 Mbps dan maksimum 7 Mbps. PT. Smartfren Telecom Tbk berada di posisi berikutnya dengan rata-rata 2,74 Mbps, sementara PT. XLSMART Telecom Sejahtera Tbk memiliki rata-rata kecepatan *browsing* paling rendah yaitu 2,6 Mbps. Secara keseluruhan, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Telkomsel memberikan performa *browsing web* yang paling baik dibandingkan operator lainnya pada data pengukuran tersebut.

Tabel 3.36.
Identifikasi Hasil Capacity Speed Test Downlink

No	Kategori	Avg Speed	Min Speed	Max Speed
1.	PT. XLSMART Telecom Sejahtera Tbk	16.17	7.28	31.77
2.	PT. Indosat Ooredoo	20.31	7.57	40.74
3.	PT. Telekomunikasi Seluler	23.97	8.52	39.19
4.	PT. Smartfren Telecom	26.63	10.57	41.89

Grafik 3.7.
Identifikasi Hasil Capacity Speed Test Downlink

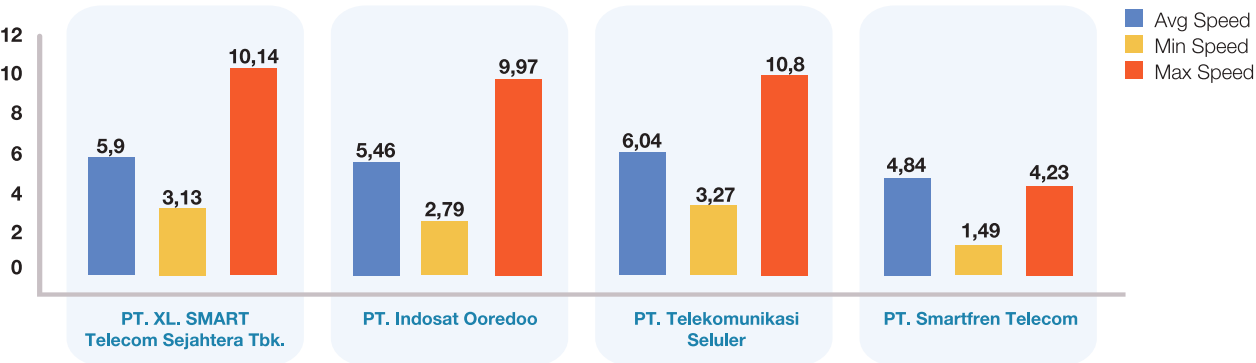


Berdasarkan hasil Capacity Speed Test Downlink, terlihat bahwa PT. Smartfren Telecom Tbk memiliki rata-rata kecepatan unduh tertinggi yaitu 26,63 Mbps dengan kecepatan maksimum 41,89 Mbps, sehingga menunjukkan kapasitas jaringan yang paling baik dalam pengujian ini. Posisi berikutnya ditempati oleh PT. Telekomunikasi Seluler dengan rata-rata 23,97 Mbps dan maksimum 39,19 Mbps. Selanjutnya, PT. Indosat Ooredoo Hutchison Tbk memiliki rata-rata kecepatan 20,31 Mbps dengan maksimum 40,74 Mbps. Sementara itu, PT. XLSMART Telecom Sejahtera Tbk menunjukkan rata-rata kecepatan paling rendah yaitu 16,17 Mbps dengan maksimum 31,77 Mbps. Secara keseluruhan, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Smartfren memiliki kapasitas kecepatan unduh yang paling tinggi dibandingkan operator lainnya pada data pengukuran tersebut.

Tabel 3.37.
Identifikasi Hasil Capacity Speed Test Uplink

No	Kategori	Avg Speed	Min Speed	Max Speed
1.	PT. XLSMART Telecom Sejahtera Tbk	5.9	3.13	10.14
2.	PT. Indosat Ooredoo	5.46	2.79	9.97
3.	PT. Telekomunikasi Seluler	6.04	3.27	10.8
4.	PT. Smartfren Telecom	4.84	1.49	4.23

Grafik 3.8.
Identifikasi Hasil Capacity Speed Test Uplink



Berdasarkan hasil Capacity Speed Test Uplink, PT. Telekomunikasi Seluler memiliki rata-rata kecepatan unggah tertinggi yaitu 6,04 Mbps, diikuti oleh PT. XLSMART Telecom Sejahtera Tbk sebesar 5,9 Mbps dan PT. Indosat Ooredoo Hutchison Tbk sebesar 5,46 Mbps. Sementara itu, PT. Smartfren Telecom Tbk menunjukkan rata-rata kecepatan uplink paling rendah yaitu 4,84 Mbps. Secara keseluruhan, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Telkomsel memiliki performa uplink terbaik dibandingkan operator lainnya pada pengukuran tersebut.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Dalam rangka melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi, dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru, dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta. Ketiga unit kerja tersebut memiliki kesamaan klasifikasi organisasi sebagai Balai Monitor Kelas I, sehingga memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang relatif sebanding dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan jaringan bergerak seluler.

Selain itu, ketiga unit kerja tersebut juga memiliki cakupan wilayah kerja yang relatif sama. Balmon SFR Kelas I Samarinda memiliki wilayah kerja yang mencakup 10 Kab/Kota. Balmon SFR Kelas I Yogyakarta juga memiliki wilayah kerja sekitar 10 Kab/Kota yang mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Di sisi lain, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memiliki

wilayah kerja yang terdiri dari 12 Kab/Kota akan tetapi untuk cakupan luas wilayah masih dibawah Balmon Samarinda sehingga relatif sebanding.

Oleh karena itu, Balmon Pekanbaru dan Balmon Yogyakarta dapat dijadikan benchmark yang tepat untuk menilai capaian kinerja karena struktur organisasi dan cakupan wilayah kerja yang sebanding dengan Balmon Samarinda.

Hasil benchmarking tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan jaringan bergerak seluler. Praktik-praktik kinerja yang dinilai efektif dari unit kerja pembanding dapat dijadikan referensi dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, hasil benchmark ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kualitas layanan jaringan bergerak seluler setiap operator seluler terutama area wilayah kerja serta bisa mendukung pencapaian target kinerja yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.38 .
Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	Balmon Samarinda	100	125	Persentase capaian kinerja Balmon Samarinda, Balmon Pekanbaru dan Balmon Yogyakarta, masing-masing telah mencapai 100%
	Balmon Pekanbaru	100	100	
	Balmon Yogyakarta	100	125	

d. Analisis Pencapaian Target

Dalam menjaga kualitas layanan jaringan bergerak seluler, Balmon Samarinda telah melakukan serangkaian kegiatan pengukuran selama tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan telekomunikasi yang diberikan oleh operator seluler memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, mengetahui seberapa baik performa jaringan seluler dan meningkatkan layanan sehingga kepuasan pengguna terpenuhi, serta untuk mengidentifikasi atau mendeteksi gangguan atau penurunan performa jaringan secara dini sehingga dapat segera ditangani.

Pada pelaksanaan pengukuran kualitas layanan menghadapi beberapa kendala yang dapat memengaruhi akurasi dan hasil evaluasi kualitas jaringan, terutama kondisi geografis di wilayah Kalimantan Timur menyulitkan akses pengukuran serta memengaruhi kekuatan dan stabilitas sinyal.

Selain itu interferensi sinyal setiap operator seluler, tingkat kepadatan pengguna dapat menurunkan kualitas layanan serta keterbatasan metode dan alat pengukuran yang dilakukan hanya pada titik point tertentu tidak dapat mewakili seluruh area jaringan.

Strategi pemeliharaan dan perbaikan perangkat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencapaian target kualitas layanan bergerak seluler, agar perangkat jaringan berfungsi optimal sehingga kualitas tetap stabil. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain melakukan pembaruan software secara berkala agar mendukung fitur baru pada jaringan seluler, pemeliharaan rutin terhadap perangkat/probe untuk meminimalkan risiko kerusakan, serta pelatihan dan kompetensi yang memadai agar membantu mencapai target kualitas layanan jaringan bergerak seluler.

e. **Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Dalam meningkatkan efektivitas kualitas layanan jaringan bergerak seluler, bukan hanya sebagai dokumen evaluasi tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan teknis. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

Upaya perbaikan difokuskan pada evaluasi kinerja jaringan sudah memenuhi standar kualitas dan mengetahui performa jaringan secara nyata di lapangan. Hal tersebut, sebagai dasar mengidentifikasi masalah jaringan seperti sinyal lemah, interferensi atau kapasitas yang kurang. Upaya perbaikan yang biasanya dilakukan adalah perencanaan pengembangan jaringan atau peningkatan teknologi jaringan sesuai kebutuhan trafik dan pertumbuhan pengguna serta peningkatan pelayanan pelanggan secara berkelanjutan. Selain itu, sebagai pertanggungjawaban atas standar kualitas layanan (*Quality of Service/QoS*) yang telah ditetapkan sesuai regulasi dan target kinerja tercapai.

f. **Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya**

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengukuran kualitas layanan jaringan bergerak seluler, diperlukan beberapa rekomendasi strategis agar proses pengukuran lebih akurat dan mampu menggambarkan kondisi jaringan secara menyeluruh. Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan secara berkala kepada tim teknis terkait pengambilan dan pengolahan data agar proses pengukuran lebih akurat dan sesuai standar teknis. Selain itu, diperlukan optimalisasi peralatan pengukuran seperti kondisi probe/perangkat yang support dengan aplikasi serta melakukan evaluasi rutin terhadap hasil pengukuran dan menjadikannya sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan jaringan.

g. **Efisiensi**

Target Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan merupakan indikator baru di Tahun 2025, sehingga untuk efisiensi pada pelaksanaan indikator ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia. Pengukuran *Quality Of Service* (QoS) menggunakan probe dan aplikasi pendukung Qualipoc serta Smartmonitor sehingga memungkinkan pelaksanaan pengukuran lebih efektif tanpa penambahan sumber daya yang signifikan. Perencanaan rute pengukuran kualitas layanan dan pembagian tugas tim dilakukan

secara optimal sehingga seluruh target wilayah dapat tercapai tanpa pemborosan sumber daya.

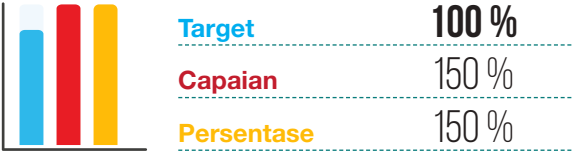
h. **Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK**

Dalam upaya mencapai target indikator kinerja, implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini antara lain:

- 1) **Berorientasi Pelayanan:** Balmon Samarinda berkomitmen memberikan pelayanan prima dengan melakukan pengukuran QoS (*Quality of Service*) secara rutin dan mengutamakan kebutuhan pengguna layanan, termasuk memastikan kualitas jaringan yang baik dan stabil, sehingga pengguna tidak mengalami gangguan panggilan atau internet.
- 2) **Akuntabel:** Integritas tim kualitas layanan Balmon Samarinda dapat dibuktikan melalui pencapaian kinerja yang melampaui target, yakni 100% Kabupaten/Kota dari target 80%. Kegiatan pengukuran dilaksanakan sesuai standar teknis yang jelas dan terdokumentasi, serta menyusun laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) **Kompeten:** Meningkatkan keterampilan petugas melalui pelatihan dan penggunaan aplikasi Smartmonitor dan Qualipoc agar hasil pengukuran lebih akurat.
- 4) **Harmonis:** Membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja, operator telekomunikasi dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan pengukuran.
- 5) **Loyal:** Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mendukung kebijakan Direktorat Infrastruktur Digital dalam peningkatan kualitas layanan telekomunikasi.
- 6) **Adaptif:** Mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan metode pengukuran jaringan bergerak seluler.
- 7) **Kolaboratif:** Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan sesuai standar teknis yang berlaku.

8. **INDIKATOR KINERJA**

PERSENTASE (%) PENYELENGGARAAN LAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (UNAR, MOTS-IKRAN)



Penyelenggaraan layanan sertifikasi dilaksanakan melalui dua kegiatan utama, yaitu Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan MOTS-IKRAN. Target indikator kinerja ini adalah **100%**. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada bagan disebelah kiri, kemudian diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan dalam rangka capaian indikator kinerja ini.

Target indikator kinerja dalam bagan di atas mengacu pada Perjanjian Kinerja masing-masing tahun, yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMN. Perbandingan capaian dilakukan terhadap periode 2021–2025 untuk melihat perkembangan kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 3.39 .
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Program	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	193%	100%	253,33%	100%	212,73%	100%	111,36%	100%	150%

a. **Latar Belakang**

Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR,MOTS-IKRAN)dilaksanakanuntukmemastikan bahwa setiap operator memiliki kompetensi dan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio, serta mendukung tertib administrasi dan keselamatan komunikasi. Sertifikasi menjadi hal penting dalam memastikan bahwa operator radio amatir dan radio maritim memiliki kemampuan teknis yang memadai dan legalitas yang sah. Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) merupakan ujian yang diselenggarakan untuk mengukur kemampuan teknis dan pengetahuan

calon amatir radio. Ujian ini bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memenuhi persyaratan memperoleh Izin Amatir Radio (IAR) tingkat Siaga, sekaligus menjadi sarana bagi amatir radio untuk meningkatkan tingkat kecakapannya ke jenjang Penggalang dan Penegak. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, seperti calon amatir radio, ORARI di tingkat lokal dan daerah, serta instansi pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab atas pengawasan ujian dan penerapan regulasi.



Di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam penerapan regulasi penggunaan perangkat radio komunikasi di sektor maritim, khususnya pada operator radio kapal nelayan. Keterbatasan pemahaman mengenai ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran serta efektivitas komunikasi di laut. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada operator radio kapal nelayan mengenai penggunaan perangkat radio komunikasi yang tertib, legal, dan sesuai dengan peruntukannya, sekaligus meningkatkan pemahaman terkait prosedur komunikasi darurat (*distress communication*) di wilayah maritim.

Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis SRC/LRC IKRAN dilaksanakan secara berkelanjutan agar para operator radio kapal nelayan dapat terus memperoleh informasi yang mutakhir mengenai regulasi dan tata kelola penggunaan spektrum frekuensi radio.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah terselenggaranya Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN) di Balmon Samarinda. Indikator kinerja kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) ditetapkan sebanyak 6 kali pelaksanaan dengan target capaian 100%. Pada tahun 2025, kegiatan UNAR berbasis CAT terealisasi sebanyak 12 kali pelaksanaan, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 200% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sangat optimal

dan mampu melampaui target yang direncanakan. Peningkatan jumlah pelaksanaan UNAR tersebut dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan sertifikasi amatir radio serta upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna spektrum frekuensi radio.

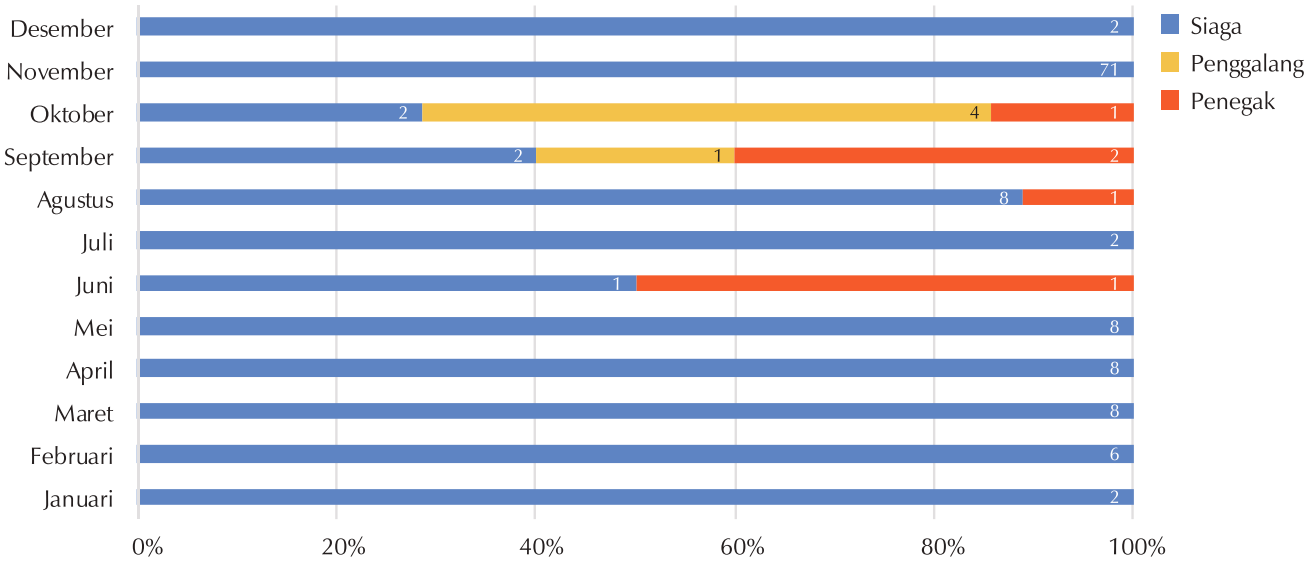
Sementara itu, indikator kinerja kegiatan sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN ditetapkan sebanyak 1 kali pelaksanaan dengan target capaian 100%. Pada tahun 2025, kegiatan sertifikasi LRC dan IKRAN terealisasi sebanyak 1 kali pelaksanaan, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan sertifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mendukung peningkatan kompetensi operator radio, khususnya dalam mendukung keselamatan komunikasi di sektor maritim.

c. Capaian Target

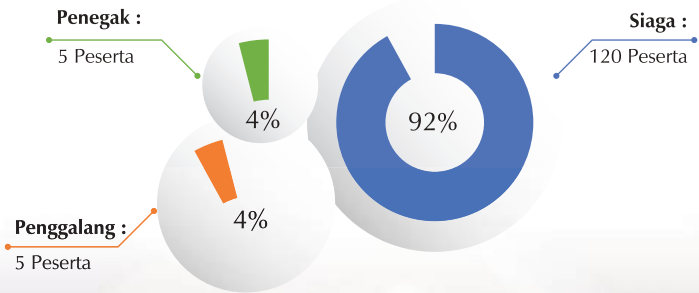
Sepanjang tahun 2025, telah dilaksanakan 12 kali kegiatan UNAR yang seluruh pelaksanaannya menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT). Pada periode yang sama, juga telah diselenggarakan 1 kali kegiatan sertifikasi *Short Range Certificate* (SRC)/*Long Range Certificate* (LRC) dan Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN). Berdasarkan realisasi tersebut, capaian kinerja mencapai 150% dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan melampaui target yang direncanakan.

Adapun rincian pelaksanaan UNAR Non-Reguler dan Reguler yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

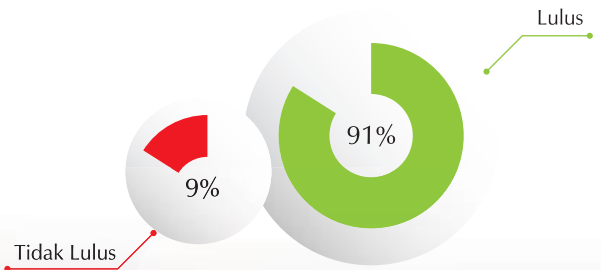
Grafik 3.9.
Rekapitulasi Peserta UNAR Tahun 2025



Bagan 3.2.
Persentase Peserta UNAR Tahun 2025



Bagan 3.3.
Persentase Kelulusan Peserta UNAR Tahun 2025



Tabel 3.40.
Rekapitulasi Total Peserta UNAR Tahun 2025

No	Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Januari	22 Januari 2025	2	UNAR Reguler
2	Februari	25 Februari 2025	6	UNAR Reguler
3	Maret	17 Maret 2025	8	UNAR Reguler
4	April	23 April 2025	8	UNAR Reguler
5	Mei	26 Mei 2025	8	UNAR Reguler
6	Juni	23 Juni 2025	2	UNAR Reguler
7	Juli	21 Juli 2025	2	UNAR Reguler
8	Agustus	25 Agustus 2025	9	UNAR Reguler
9	September	22 September 2025	5	UNAR Reguler
10	Oktober	13 Oktober 2025	7	UNAR Reguler
11	November	15 November 2025	71	UNAR Non Reguler di Kab. Paser
12	Desember	15 Desember 2025	2	UNAR Reguler
Total Peserta			130	



BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balai Monitor Samarinda, Balmon Medan, dan Balmon Tangerang. Hasil analisis menunjukkan bahwa Balmon Samarinda berhasil mencapai 150% dari target yang ditetapkan melebihi dari capaian Balmon Medan dan Balmon Tangerang.

Berdasarkan hasil perbandingan capaian indikator Persentase Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN), ketiga UPT pembanding yaitu Balmon Samarinda, Balmon Medan dan Balmon Tangerang memiliki target kinerja yang sama sebesar

100%. Target tersebut merupakan standar minimal yang ditetapkan dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio.

Hasil realisasi menunjukkan bahwa Balmon Samarinda memperoleh capaian kinerja sebesar 150%, sedangkan Balmon Medan dan Balmon Tangerang masing-masing mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh UPT telah mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian Balmon Samarinda yang melebihi target menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan UPT pembanding.

Tabel 3.41 .
Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	Balmon Samarinda	100	150	Persentase Capaian Balmon Samarinda lebih tinggi dibanding Balmon Medan dan Balmon Tangerang
	Balmon Medan	100	100	
	Balmon Tangerang	100	100	

d. Analisis Pencapaian Target

Dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio (UNAR, SRC/LRC - IKRAN), Balmon Samarinda telah melaksanakan 12 kali kegiatan UNAR pada tahun 2025, melampaui target yang awalnya ditetapkan sebanyak 6 kali kegiatan. Dan telah dilaksanakan juga bimbingan teknis sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN sebanyak 1 kali pelaksanaan sehingga memenuhi target capaian sebesar 150%.

Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio di Balmon Samarinda berjalan secara optimal serta mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan sertifikasi amatir radio. Keberhasilan penyelenggaraan Layanan UNAR berbasis Computer Assisted Test (CAT) didukung oleh peningkatan koordinasi dengan Organisasi Amatir Radio, penyebaran informasi terkait jadwal pelaksanaan UNAR melalui media sosial UPT, serta menginformasikan kepada calon peserta untuk melakukan latihan dan simulasi ujian melalui aplikasi SeeNow agar peserta lebih familiar dengan soal dan sistem ujian. Selain itu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, program sosialisasi yang dilaksanakan secara efektif turut meningkatkan kesadaran nelayan dan pemilik kapal mengenai pentingnya kepemilikan Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim. Kegiatan ini diselenggarakan secara terpadu dengan Bimbingan Teknis SRC/LRC, sehingga menciptakan efisiensi pelaksanaan kegiatan sekaligus mendukung pencapaian target kinerja. Dukungan dan kolaborasi



dengan instansi terkait, seperti Dinas Perikanan dan Distrik Navigasi setempat, juga berkontribusi terhadap keberhasilan program. Melalui kerja sama tersebut, nelayan memperoleh dukungan teknis serta informasi yang diperlukan dalam proses pengurusan ISR dan pelaksanaan bimbingan teknis untuk memperoleh IKRAN.

Dengan capaian yang melebihi target, Balmon Samarinda tidak hanya memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang sertifikasi operator radio. Hal ini sekaligus mendukung peningkatan kompetensi operator radio serta mendorong penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1). Faktor Keberhasilan pada Pencapaian Target

- ♦ Keterlibatan dan sinergi yang baik
Keberhasilan pencapaian target didukung oleh keterlibatan dan sinergi yang baik dengan organisasi amatir radio di tingkat lokal dan daerah, yang berperan dalam meningkatkan partisipasi calon peserta UNAR. Dukungan tersebut antara lain melalui penyediaan fasilitas pendukung, seperti komputer/laptop dan akses internet, dengan menggandeng institusi pendidikan maupun instansi pemerintah.
- ♦ Inovasi pelaksanaan UNAR Non-Reguler
Inovasi dalam pelaksanaan UNAR non-reguler turut meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan. Penambahan jumlah pelaksanaan UNAR non-reguler di wilayah tertentu menjadi strategi yang tepat, terutama apabila didasarkan pada kebutuhan dan permintaan dari organisasi amatir radio setempat.

2). Faktor Kendala pada Pencapaian Target

Salah satu kendala utama dalam pencapaian target adalah keterbatasan perangkat PC/laptop, khususnya pada pelaksanaan UNAR CAT non-reguler, ketika jumlah peserta melebihi kapasitas perangkat yang tersedia. Sebagai solusi jangka pendek, pelaksanaan ujian dilakukan secara bergantian sesuai ketersediaan perangkat. Adapun solusi jangka panjang dilakukan melalui penambahan jumlah PC/laptop guna meningkatkan kapasitas pelaksanaan ujian.

Selain itu, keterbatasan fasilitas di wilayah tertentu, terutama di daerah terpencil dan terluar, juga menjadi hambatan. Permasalahan yang sering dihadapi meliputi keterbatasan sarana pendukung serta jaringan internet yang belum stabil, padahal koneksi yang andal sangat diperlukan dalam pelaksanaan ujian berbasis komputer.

Di sisi lain, tingkat pemahaman nelayan dan pemilik kapal terhadap prosedur pengurusan ISR Maritim masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan informasi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami serta pendekatan edukasi yang lebih interaktif, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program dan kepatuhan terhadap regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio di sektor maritim.

3). Upaya Percepatan dalam Mencapai Target/ Upaya Perbaikan (Solusi)

- ♦ Pengadaan Perangkat Tambahan:
Upaya peningkatan kapasitas pelaksanaan UNAR dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, seperti sekolah negeri yang memiliki ketersediaan perangkat memadai. Melalui kolaborasi ini, penyelenggara dapat memperoleh tambahan akses terhadap komputer/laptop, sehingga kapasitas pelaksanaan ujian meningkat dan keterbatasan sarana dapat diatasi.



- ♦ Penguatan Kerjasama dengan ORARI Lokal:

Penguatan sinergi dengan ORARI lokal merupakan langkah strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan, mengingat organisasi tersebut memiliki jaringan serta pengalaman yang luas di tingkat komunitas dalam menyelenggarakan kegiatan sejenis. Melalui kerjasama ini, penyebaran informasi mengenai pelaksanaan ujian, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, dapat dilakukan lebih efektif kepada calon peserta. Selain itu, organisasi amatir radio lokal juga dapat memberi dukungan teknis atau Sumber Daya Manusia guna memastikan pelaksanaan ujian berjalan sesuai rencana.

- ♦ Pengembangan Model Pelaksanaan yang Efisien:

Penerapan pengelolaan perangkat secara bergantian antar peserta menjadi solusi efektif dalam kondisi keterbatasan sarana. Melalui upaya ini, keterbatasan jumlah perangkat tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan ujian. Penerapan model ini telah dilaksanakan dengan baik oleh Balmon Samarinda melalui aturan penggunaan perangkat secara bergantian, sehingga seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan lancar.

Dengan memperhatikan faktor pendukung keberhasilan serta kendala yang dihadapi, dan disertai perumusan langkah strategis yang tepat, pelaksanaan UNAR berbasis CAT, SRC/LRC, dan IKRAN di Balmon Samarinda maupun di daerah lain

dapat berjalan lebih efisien. Pemantauan indikator kinerja secara berkala menjadi penting untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan serta sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian strategi apabila diperlukan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 2025, indikator kinerja telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan, sekaligus mencerminkan komitmen Balmon Samarinda dalam menjalankan tugas secara optimal sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Dalam rangka mencapai target Perjanjian Kinerja, Balmon Samarinda menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada pola pencapaian target tahun sebelumnya. Strategi ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan ORARI tingkat lokal dan daerah di wilayah kerja Kalimantan Timur, serta dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR). Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara optimal. Selain itu, penerapan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai budaya kerja ASN menjadi landasan dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam mendukung peningkatan kepatuhan dan kualitas pelayanan di sektor maritim, Balmon Samarinda secara aktif memberikan layanan konsultasi dan asistensi kepada nelayan serta pemilik kapal dalam proses pendampingan pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim. Layanan ini dilakukan melalui pertemuan langsung, pemanfaatan media komunikasi seperti WhatsApp, surat elektronik, dan telepon, serta pendampingan administratif guna memastikan proses pengurusan ISR dapat diselesaikan dengan lebih mudah, cepat, dan tertib.

Selain itu, Balmon Samarinda berkomitmen untuk melanjutkan program penerbitan IKRAN pada tahun berikutnya. Dalam pelaksanaannya, nelayan yang akan mengajukan IKRAN diwajibkan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) LRC sebagai salah satu persyaratan utama. Melalui program ini, diharapkan jumlah nelayan yang memiliki izin komunikasi resmi semakin meningkat, sehingga dapat mendukung

keselamatan pelayaran, efektivitas komunikasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio di sektor maritim.

f. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Berikut beberapa rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi serta identifikasi kekurangan dalam pencapaian target pada tahun berjalan:

1). Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas Sekolah atau Instansi Pemerintah Setempat dalam pelaksanaan UNAR

Dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan sekolah negeri atau instansi pemerintah yang memiliki ketersediaan perangkat PC/laptop serta jaringan internet yang memadai. Pemanfaatan fasilitas tersebut dapat dioptimalkan di luar jam operasional, seperti di luar jam belajar atau jam kerja, sehingga tidak mengganggu kegiatan utama. Langkah ini umumnya didukung oleh peran aktif organisasi amatir radio di daerah dalam memfasilitasi koordinasi dan pemanfaatan sarana secara efektif.

2). Pengembangan Program Pelatihan untuk Calon Amatir Radio

Dilaksanakan melalui penyelenggaraan program pelatihan bagi peserta UNAR berbasis CAT, khususnya terkait penggunaan perangkat dan aplikasi yang digunakan dalam ujian. Program ini difasilitasi oleh Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI melalui aplikasi tryout berbasis web, yaitu SEENOW, yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama peserta sertifikasi operator radio, guna meningkatkan kesiapan dan pemahaman sebelum mengikuti ujian.

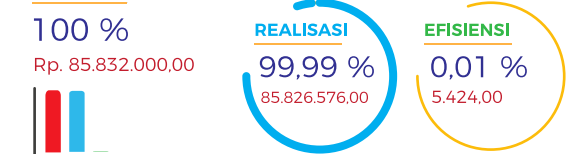
3). Penguatan Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan UNAR

Dilakukan melalui peningkatan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan UNAR guna mengukur perkembangan pencapaian target. Dengan pengawasan yang lebih sistematis, potensi kendala maupun keberhasilan dapat diidentifikasi lebih dini, sehingga langkah perbaikan dan optimalisasi dapat segera dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan.



g. Efisiensi

PAGU ANGGARAN



Indikator ini merealisasikan anggaran sebesar **Rp.85.826.576 (99.99%)** dari pagu anggaran non-blokir sebesar **Rp. 85.832.000** yang menunjukkan pemanfaatan anggaran secara efisien. Optimalisasi pelaksanaan UNAR reguler yang dilaksanakan setiap bulan memungkinkan peningkatan frekuensi layanan tanpa penambahan anggaran signifikan, sehingga kinerja dapat melampaui dua kali lipat target secara efektif dan terukur.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan UNAR, sosialisasi, dan bimbingan teknis MOTS-IKRAN dilakukan dengan melibatkan tim yang kompeten dan proporsional. Pengelolaan SDM dilaksanakan melalui pembagian tugas yang jelas serta pemanfaatan keahlian sesuai kompetensi masing-masing personel. Selain itu, penempatan petugas di Kantor Dinas Kelautan & Perikanan Kota Samarinda dan Provinsi Kaltim memungkinkan jangkauan layanan kepada nelayan secara lebih langsung, termasuk pemberian asistensi pengajuan ISR Maritim melalui aplikasi WhatsApp.

Efisiensi waktu juga dijaga melalui perencanaan yang matang dan penjadwalan yang fleksibel agar tidak mengganggu aktivitas utama peserta. Materi pelatihan difokuskan pada substansi yang paling relevan sehingga penyampaian dapat dilakukan secara ringkas namun tetap efektif tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

1. **Berorientasi Pelayanan.** Pelaksanaan kegiatan UNAR mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang optimal melalui fasilitasi dua jenis ujian, yaitu UNAR reguler dan non-reguler. Pada setiap pelaksanaan, dilakukan sosialisasi tata cara pendaftaran kepada peserta serta penerapan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) untuk menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam proses penilaian.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan melalui perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan pada setiap aspek layanan amatir radio, guna memberikan pengalaman layanan yang lebih baik pada periode berikutnya. Selain itu, penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami terkait bimbingan teknis SRC/LRC menjadi prioritas utama, dengan pendekatan pelayanan yang ramah, responsif, dan solutif dalam memenuhi kebutuhan nelayan dan pemilik kapal untuk memperoleh IKRAN secara lebih mudah dan efektif.

2. **Akuntabel.** Pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas melalui pemberian masukan kepada calon amatir radio maupun peserta yang akan naik tingkat secara santun, objektif, dan konstruktif. Selain itu, ditegakkan komitmen untuk tidak mentoleransi praktik percaloan maupun perjkokian dalam bentuk apa pun, guna menjaga integritas dan kredibilitas pelaksanaan ujian.

Seluruh pelayanan di bidang amatir radio dilaksanakan secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas agar proses berjalan transparan serta sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis SRC/LRC dan IKRAN, setiap tahapan, mulai dari pengajuan, verifikasi, pelaksanaan Bimtek, hingga penerbitan sertifikat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

3. **Kompeten.** Dalam penyelenggaraan layanan UNAR yang berkualitas, peningkatan profesionalisme dan kompetensi petugas pelayanan amatir radio serta panitia pelaksana menjadi prioritas. Upaya ini dilakukan melalui pembaruan dan diseminasi informasi terkait regulasi terbaru, serta penguatan pemahaman terhadap ketentuan teknis pelaksanaan ujian,



sehingga UNAR dapat diselenggarakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada pelaksanaan Bimtek SRC/LRC dan IKRAN, peningkatan kompetensi juga menjadi fokus utama. Petugas secara berkelanjutan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas teknis dan administratif. Dengan kompetensi yang memadai, pelaksanaan Bimtek dapat diberikan secara profesional, responsif, dan solutif bagi nelayan serta pemilik kapal.

4. **Harmonis.** Dalam pelaksanaan pelayanan amatir radio, senantiasa dikedepankan sikap ramah, santun, peduli, serta semangat tolong-menolong dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Hubungan yang baik dibangun antara narasumber, nelayan, dan pemilik kapal melalui komunikasi yang terbuka serta pendekatan yang persuasif. Suasana kerja yang harmonis dan kondusif tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung kelancaran proses pengurusan layanan secara tertib dan efektif.
5. **Loyal.** Pelaksanaan tugas dilakukan dengan dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi, serta senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen dalam mendukung visi dan misi organisasi diwujudkan melalui kontribusi optimal pada setiap program kerja, termasuk pelaksanaan UNAR dan Bimtek SRC/LRC.

6. **Adaptif.** Dalam menghadapi dinamika regulasi dan perkembangan teknologi, Balmon Samarinda mampu beradaptasi secara cepat guna memastikan pelayanan di bidang Amatir Radio tetap relevan dan efektif. Upaya inovasi dilakukan secara berkelanjutan, antara lain melalui pemanfaatan aplikasi perizinan daring, penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi, serta penerapan mekanisme pelayanan yang fleksibel untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Pendekatan adaptif ini memungkinkan pelayanan tetap optimal meskipun menghadapi perubahan kebutuhan dan kondisi lapangan.

7. **Kolaboratif.** Pelaksanaan program dilaksanakan secara kolaboratif dengan mengedepankan sikap saling menghargai, keterbukaan terhadap

masukan yang konstruktif, serta komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Sinergi dibangun baik secara internal maupun eksternal, termasuk dengan ORARI Daerah dan ORARI Lokal, guna mendukung kelancaran pelaksanaan UNAR dan program lainnya. Selain itu, program Sosialisasi SRC/LRC dan Bimtek bagi nelayan dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Distrik Navigasi, serta komunitas nelayan. Kolaborasi tersebut memastikan dukungan yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan sehingga program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

9. INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE (%) PENANGANAN PIUTANG BHP FREKUENSI RADIO



Target indikator kinerja ini adalah **100%**. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada bagan di sebelah kiri, kemudian diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan dalam rangka capaian indikator kinerja ini.

Target indikator kinerja dalam bagan di atas mengacu pada Perjanjian Kinerja masing-masing tahun, yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMN. Perbandingan capaian dilakukan terhadap periode 2021–2025 untuk melihat perkembangan kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 3.42.
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Program	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

a. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pembayaran SPP BHP Frekuensi Radio, dilaksanakan kegiatan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib bayar serta meminimalkan potensi timbulnya piutang, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Upaya yang dilakukan meliputi penyampaian

dokumen SPP atau rincian tagihan secara rutin kepada wajib bayar serta koordinasi pelimpahan piutang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini mencakup unit pelaksana teknis, pengguna frekuensi radio dari sektor swasta maupun instansi pemerintah,

serta KPKNL sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan piutang negara dengan nilai tertentu. Penanganan piutang dilaksanakan secara berkala sepanjang tahun, terutama setelah batas waktu pembayaran terlewati dan kewajiban belum dipenuhi meskipun telah diberikan peringatan secara bertahap. Koordinasi pelimpahan piutang kepada KPKNL dilakukan secara periodik, yaitu setiap triwulan.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penanganan piutang BHP Frekuensi Radio secara optimal melalui upaya pencegahan piutang dan koordinasi penanganan piutang dengan KPKNL disertai pengumpulan dokumen penghapusan mutlak dan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO).

c. Capaian Target

Indikator kinerja pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio ditetapkan dengan target capaian sebesar 100%, yang terdiri atas dua komponen. Komponen pertama adalah penanganan pencegahan dan pengurangan piutang dengan target minimal 80%. Komponen kedua adalah koordinasi penanganan piutang dengan KPKNL, termasuk pengumpulan dokumen penghapusan mutlak dan PPNTO dengan target capaian sebesar 100%. Capaian kinerja dihitung berdasarkan persentase piutang yang telah dihubungi dibandingkan dengan

target yang ditetapkan, serta pelaksanaan koordinasi dengan KPKNL yang dilakukan minimal satu kali dalam periode tiga bulan.

Dalam rangka pencapaian target tersebut, kegiatan penanganan piutang telah dilaksanakan melalui penyampaian dokumen SPP atau rincian tagihan kepada wajib bayar secara rutin melalui berbagai metode, antara lain E-Licensing, surat elektronik, telepon, WhatsApp, pengiriman melalui jasa ekspedisi, serta penyampaian langsung. Sepanjang tahun 2025, jumlah penanganan piutang yang telah dihubungi mencapai 704 tagihan atau 100% dari target yang ditetapkan. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi dan pendampingan penagihan piutang yang dilimpahkan kepada KPKNL dan pengumpulan dokumen PPNTO. Hasil pelaksanaan kegiatan ini telah dilaporkan secara berkala setiap bulan, dengan total 12 laporan hingga Desember 2025.

Berdasarkan capaian tersebut, persentase realisasi terhadap target mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. **Capaian ini sesuai target yang ditetapkan dengan persentase terhadap target sebesar 100%.**

Berikut data penyampaian dokumen SPP/Rincian Tagihan Tahun 2025.

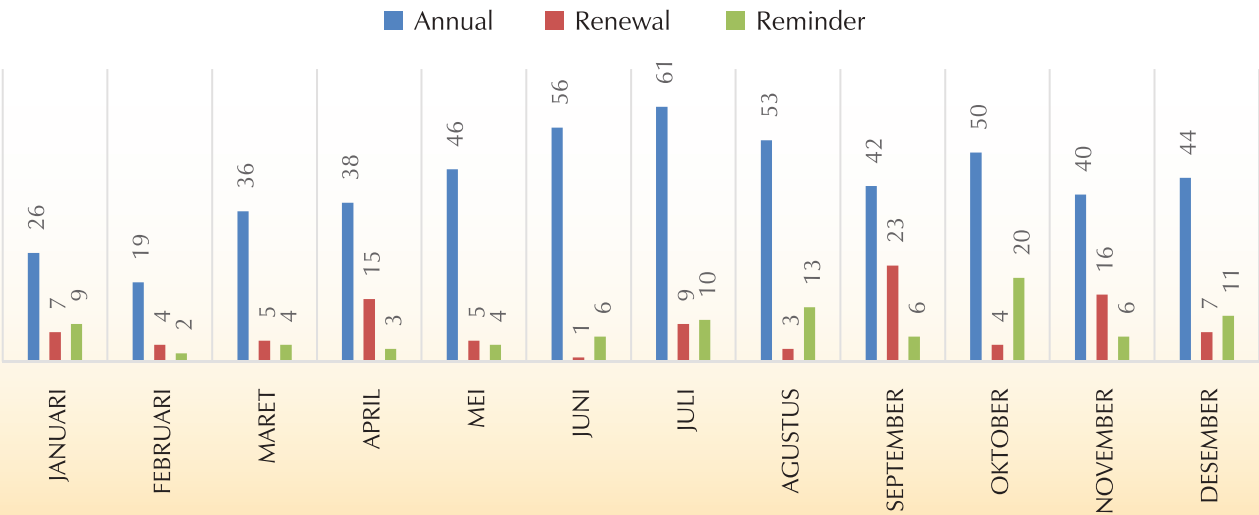
Tabel 3.43.
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja

Bulan	Annual	Renewal	Reminder	Total	Jumlah BHP Frekuensi (Rp)
Januari	26	7	9	42	166,013,617
Februari	19	4	2	25	94,453,619
Maret	36	5	4	45	61,824,711
April	38	15	3	56	287,170,648
Mei	46	5	4	55	229,716,497
Juni	56	1	6	63	183,663,618
Juli	61	9	10	80	226,474,174
Agustus	53	3	13	69	206,099,525
September	42	23	6	71	150,113,430
Oktober	50	4	20	74	313,004,620
November	40	16	6	62	206,151,224
Desember	44	7	11	62	323,243,014
Jumlah	511	99	94	704	2,447,928,697



Secara keseluruhan, jumlah tagihan sebanyak 704 SPP dengan BHP Frekuensi Radio Balmon Samarinda mencapai total Rp. 2.447.928.697,-. Capaian ini menunjukkan komitmen dalam menjaga tertib administrasi pembayaran BHP Frekuensi serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan penagihan guna meminimalisir potensi piutang yang tertunggak.

Grafik 3.10.
Pendistribusian SPP/RT Tahun 2025



Adapun kegiatan pencegahan dan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 5 (lima) kali kegiatan, yaitu:

Tabel 3.44.

Rekapitulasi Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Piutang

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	28 s.d 30 April 2025 dan 02 s.d 03 Mei 2025	Kota Balikpapan
2	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	09 s.d 13 September 2025	Kota Balikpapan
3	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	01 s.d 04 Oktober 2025	Kab. Kutai Kartanegara
4	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	24 s.d 27 November 2025	Kota Balikpapan
5	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	26 s.d 28 November 2025	Kota Bontang

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balmon Samarinda dan Balmon Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa Balmon Samarinda sama dengan Balmon Yogyakarta berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Balmon Yogyakarta, yang berstatus sebagai Balai Monitor Kelas I, memiliki wilayah kerja yang mencakup 10 kabupaten/kota, jumlah yang

sebanding dengan Balmon Kelas I Samarinda yang mencakup 10 kabupaten/kota. Oleh karena itu, Balmon Yogyakarta dapat dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark) yang relevan dalam menilai capaian kinerja.

Benchmark ini akan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas kinerja serta menjadi acuan dalam upaya perbaikan guna mencapai hasil yang lebih optimal di tahun mendatang.

Tabel 3.45 .

Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	Balmon Samarinda	100	100	Persentase Capaian Balmon Samarinda sama dengan Balmon Yogyakarta sebesar 100%
	Balmon Yogyakarta	100	100	



Berdasarkan rekapitulasi distribusi Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Tagihan (ST) tahun 2025, diperoleh beberapa analisis sebagai berikut:

- Pada Tahun 2025, jumlah SPP yang didistribusikan sebanyak 704 invoice.
- Persentase capaian distribusi setiap bulan mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh SPP dan ST telah didistribusikan dengan efisien tanpa adanya keterlambatan atau penumpukan.
- Distribusi SPP dan ST berlangsung secara konsisten setiap bulan, mencerminkan kestabilan dalam proses pendistribusian.
- Sebagian besar klien telah memanfaatkan platform e-billing melalui website <https://billing-isr.komdigi.go.id/>, yang memungkinkan untuk mengunduh invoice secara langsung tanpa memerlukan pendistribusian manual.

1). Faktor Keberhasilan dalam Pencapaian Target

- Konsistensi dalam distribusi setiap bulan melalui berbagai metode seperti penyampaian langsung, pengiriman melalui media sosial (WhatsApp), Email serta layanan pos.

- Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pengguna, sehingga kendala dalam penerimaan SPP dan ST dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat.
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara rutin memungkinkan deteksi dini terhadap potensi permasalahan, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan.

2). Faktor Kendala dalam Pencapaian Target

- Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan sebagian pengguna frekuensi dalam memenuhi kewajiban pembayaran, yang berdampak pada keterlambatan atau tunggakan piutang.
- Kendala finansial yang dialami oleh sebagian pengguna, terutama perusahaan kecil atau instansi tertentu, sehingga menghambat pembayaran tepat waktu.
- Ketidaksesuaian atau perubahan data pengguna, seperti perubahan alamat, kontak, atau penanggung

d. Analisis Pencapaian Target

Penanganan piutang BHP Frekuensi Radio merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Indikator ini mencerminkan tingkat efektivitas dalam proses penagihan dan penyelesaian kewajiban pembayaran oleh pengguna spektrum frekuensi radio.

Secara nasional, penanganan piutang dilaksanakan secara sistematis, antara lain melalui mekanisme koordinasi pelimpahan piutang kepada KPKNL sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan piutang negara. Dalam mekanisme tersebut, piutang dengan nilai di atas Rp. 8.000.000 yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan akan dilimpahkan kepada KPKNL untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.



jawab pembayaran, yang dapat menghambat komunikasi dan distribusi tagihan.

- Keterbatasan opsi penyelesaian piutang, seperti belum adanya skema pembayaran bertahap, yang dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan kewajiban secara lebih fleksibel.

3). Upaya Percepatan dalam Mencapai Target/Upaya Perbaikan (Solusi)

- Melakukan penguatan pengawasan serta optimalisasi mekanisme distribusi melalui evaluasi yang lebih komprehensif, guna mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu dan efisiensi penyaluran.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pengguna layanan, guna memastikan klien memahami prosedur pembayaran, batas waktu, serta langkah yang harus dilakukan dalam menerima dan menyelesaikan tagihan. Menyediakan saluran komunikasi yang lebih responsif, seperti layanan konsultasi via WhatsApp, email, atau call center, sehingga klien dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait tagihan.
- Memastikan bahwa tim yang bertanggung jawab atas pendistribusian memiliki pemahaman mengenai data klien, termasuk alamat perusahaan, instansi terkait, serta penanggung jawab pembayaran. Memperbarui dan memverifikasi data klien secara berkala, guna memastikan akurasi informasi dan meminimalisir kesalahan dalam proses pendistribusian SPP dan ST.

Dengan penerapan strategi tersebut, efektivitas distribusi dokumen SPP dan ST dapat ditingkatkan, sekaligus memperkuat kepatuhan pengguna dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan spektrum frekuensi radio.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 2025, seluruh capaian telah terpenuhi sesuai target yang ditentukan berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai indikator parameter keberhasilan capaian. Tindak lanjut atas capaian tersebut dilakukan melalui:

- 1). Peningkatan intensitas komunikasi dengan wajib bayar
Dilaksanakan secara berkelanjutan guna memastikan kepatuhan pembayaran dan percepatan penyelesaian piutang.
- 2). Optimalisasi metode penagihan piutang
Melalui pemanfaatan media daring serta kunjungan langsung (on-site visit) untuk meningkatkan efektivitas penagihan.
- 3). Penguatan koordinasi dengan KPKNL
Dilakukan secara berkala dalam rangka penanganan lanjutan piutang, termasuk proses pelimpahan dan pengurusan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4). Peningkatan Efisiensi dalam Proses Pembayaran
Implementasi sistem pembayaran berbasis *Host to Host*, yang merupakan hasil kerja sama antara DJID dan beberapa bank, telah meningkatkan efisiensi pencatatan serta pemantauan pembayaran piutang SPP BHP. Dengan sistem ini, laporan pembayaran langsung terintegrasi ke dalam sistem informasi DJID, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi potensi kesalahan pencatatan.



- 5). Meningkatkan Kepatuhan Waba
Melalui kegiatan pemantauan dan penanganan piutang secara berkala oleh Balmon Samarinda, kepatuhan Waba terhadap kewajiban pembayaran semakin meningkat, sehingga lebih banyak pembayaran dilakukan tepat waktu.

f. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan piutang BHP Frekuensi Radio serta koordinasi pelimpahan ke KPKNL, beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:

- 1). Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Piutang
 - Meningkatkan pemantauan piutang secara real-time melalui pemanfaatan sistem berbasis teknologi untuk mendeteksi potensi piutang sejak dini sebelum jatuh tempo.
 - Melaksanakan evaluasi berkala terhadap tren piutang guna mengidentifikasi pola keterlambatan pembayaran serta merumuskan langkah antisipatif yang lebih efektif.
- 2). Optimalisasi Proses Penagihan dan Pelimpahan Piutang ke KPKNL
 - Mempercepat tindak lanjut terhadap piutang yang belum diselesaikan melalui optimalisasi penyampaian surat tagihan

(ST) dan notifikasi kepada wajib bayar sebelum jatuh tempo.

- Meningkatkan koordinasi dengan KPKNL dalam proses pelimpahan piutang khususnya untuk tagihan di atas 8 juta rupiah.
 - Menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyelesaian piutang, termasuk opsi pembayaran bertahap sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya untuk piutang yang telah dilimpahkan..
- 3). Peningkatan Komunikasi dan Edukasi kepada Klien
 - Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio serta konsekuensi atas keterlambatan atau ketidakpatuhan.
 - Memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, seperti surat elektronik, WhatsApp, dan media sosial, untuk penyampaian pengingat serta panduan proses pembayaran.
 - 4). Penerapan Inovasi Digital untuk Efisiensi Penagihan
 - Mengembangkan sistem monitoring piutang berbasis dashboard yang memungkinkan wajib bayar memantau status pembayaran secara mandiri serta mempercepat proses tindak lanjut oleh tim terkait.
 - 5). Peningkatan Koordinasi Internal dan Kapasitas SDM
 - Memperkuat koordinasi antar unit kerja guna memastikan konsistensi pelaksanaan prosedur penagihan dan pelimpahan piutang, sehingga meminimalkan potensi kesalahan administratif.
 - Memberikan pelatihan bagi petugas untuk meningkatkan kompetensi dalam negosiasi, analisis piutang, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut secara berkelanjutan, diharapkan kinerja penanganan piutang BHP Frekuensi Radio dapat semakin optimal, meningkatkan efisiensi operasional, serta meminimalkan potensi piutang yang belum terselesaikan.

g. Efisiensi

PAGU ANGGARAN



Pada tahun 2025, realisasi anggaran untuk Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio mencapai 97,21%, yang menunjukkan kinerja sangat baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran. Pagu anggaran tersebut dialokasikan secara khusus untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja berupa persentase pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio.

Melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang cermat serta efisien, kami berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran, yang ditunjukkan oleh tingkat efisiensi sebesar 2,79%. Capaian ini mencerminkan komitmen dalam memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, efektif, dan memberikan hasil yang optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

Upaya efisiensi yang dilakukan antara lain melalui penerapan sistem pembayaran berbasis host to host (H2H) hasil kerja sama antara DJID dan perbankan. Sistem ini meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pemantauan piutang SPP BHP karena data pembayaran terintegrasi secara otomatis ke dalam sistem informasi, sehingga mempercepat proses administrasi.

Selain itu, sistem pembayaran tersebut juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi secara daring melalui perangkat digital maupun fasilitas perbankan yang tersedia. Pemantauan status pembayaran juga semakin mudah dilakukan melalui aplikasi billing ISR, yang telah mendukung proses pembayaran dan pengelolaan piutang secara lebih efektif dan efisien.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio, nilai-nilai BerAKHLAK diimplementasikan sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas, yang mencerminkan budaya kerja profesional serta berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.

1. Berorientasi Pelayanan

Pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan yang optimal kepada pengguna. Seluruh proses pendistribusian SPP BHP Frekuensi telah terdokumentasi secara sistematis melalui 12 laporan sepanjang tahun 2025. Upaya pelayanan tetap dilakukan secara proaktif untuk memastikan informasi tagihan dapat diterima secara tepat waktu, sehingga mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban pembayaran.

2. Akuntabel

Integritas menjadi prioritas dalam penanganan piutang, dengan menegakkan standar profesionalisme tinggi. Tim Penanganan Piutang SPP BHP Frekuensi beroperasi secara transparan dan tidak terlibat dalam praktik percaloan pembayaran. Pelayanan diberikan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, serta integritas tinggi, guna memastikan proses pembayaran berjalan sesuai prosedur.

3. Kompeten

Dalam rangka memastikan kualitas layanan, pengembangan kompetensi petugas terus dilakukan melalui peningkatan pemahaman terhadap regulasi terbaru. Tim penanganan piutang secara aktif mengikuti diskusi dan pelatihan guna mendukung pelaksanaan proses pembayaran dan penanganan piutang yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Harmonis

Lingkungan kerja yang kondusif dan kolaboratif terus dibangun melalui kerja sama tim yang solid dalam pelaksanaan penanganan piutang. Setiap anggota tim saling mendukung, menunjukkan kepedulian, serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan saling menghargai. Budaya kerja yang harmonis ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja.

5. Loyal

Dedikasi tinggi ditunjukkan oleh petugas layanan dan tim penanganan piutang dalam menjalankan tugasnya. Mereka menjaga nama baik instansi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, serta selalu berpegang pada prinsip profesionalisme sebagai ASN.

6. Adaptif

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika organisasi, pelaksanaan penanganan piutang dilakukan secara adaptif melalui penerapan inovasi dan penyesuaian terhadap perubahan. Implementasi sistem pembayaran yang lebih modern dan efisien, seperti e-licensing dan host to host

(H2H), menjadi wujud upaya peningkatan efektivitas serta kualitas layanan secara berkelanjutan.

7. Kolaboratif

Keberhasilan penanganan piutang turut didukung oleh sinergi yang baik antar berbagai pihak. Kerja sama yang terjalin, baik secara internal maupun eksternal dengan KPKNL, berperan penting dalam memastikan proses koordinasi pelimpahan piutang dapat berjalan secara optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE (%) PENANGANAN PIUTANG BHP FREKUENSI RADIO



Target indikator kinerja ini adalah **100%**. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada bagan di sebelah kiri ini, kemudian diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan dalam rangka capaian indikator kinerja.

Perbandingan capaian indikator kinerja pada tahun 2021 – 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.46 .
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Program	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	80%	125%	100%	266.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

a. Latar Belakang

Pelaksanaan pelayanan publik di bidang Layanan Infrastruktur Digital mencakup layanan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) serta Sertifikasi Operator Radio (SOR). Dalam penyelenggaraannya, layanan tersebut wajib dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, pelaksanaan pelayanan publik turut melibatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam sistem pelayanan pemerintah. Keterlibatan masyarakat berperan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memastikan kebijakan pelayanan yang diterapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.



Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan efisien, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui penguatan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi guna meningkatkan kepercayaan publik.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, dilaksanakan kegiatan sosialisasi pelayanan publik terkait penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai regulasi dan prosedur perizinan penggunaan frekuensi, sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan serta penggunaan frekuensi secara ilegal.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Publik dengan target capaian sebesar 100%. Indikator kinerja terdiri atas dua komponen, yaitu: (1) pelaksanaan kegiatan sosialisasi minimal 1 kali, baik secara tatap muka maupun daring, dan (2) jumlah peserta minimal sebanyak 30 orang. Capaian kinerja dihitung berdasarkan pemenuhan kedua komponen tersebut, di mana pemenuhan komponen pertama bernilai 50%, sedangkan pemenuhan kedua komponen secara keseluruhan bernilai 100%.

c. Capaian Target

Dalam upaya mewujudkan target kinerja tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pelayanan publik secara *hybrid* (*luring* dan *daring*) sebanyak 1 (satu) kali kegiatan. Kegiatan tersebut diikuti oleh 144 peserta yang terdiri atas 75 peserta hadir secara *luring* dan 69 peserta mengikuti secara *daring*.

Sosialisasi Perizinan dan Pengenaan Sanksi Denda Administrasi atas Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2025 di Kota Balikpapan, serta melibatkan peserta dari berbagai sektor, antara lain instansi pemerintah, badan usaha, dan lembaga penyiaran radio FM yang berasal dari 10 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran para pengguna spektrum frekuensi radio mengenai pentingnya kepatuhan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio, sehingga dapat menekan potensi pelanggaran dan mendukung terwujudnya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut, capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Indikator Sosialisasi Pelayanan Publik tidak secara eksplisit tercantum sebagai indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja lebih relevan dilakukan dengan unit pelaksana teknis Balai Monitor lainnya yang memiliki karakteristik tugas dan fungsi sejenis.

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balmon Samarinda dan Balmon Yogyakarta, yang menunjukkan Balmon Samarinda dan Balmon Yogyakarta berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Balmon Yogyakarta, yang berstatus sebagai Balai Monitor Kelas I, memiliki wilayah kerja yang mencakup 10 kabupaten/kota, jumlah yang sebanding dengan Balmon Kelas I Samarinda



Kesetaraan karakteristik wilayah kerja tersebut menjadikan unit tersebut sebagai tolok ukur (*benchmark*) yang tepat dalam menilai capaian kinerja.

Benchmark ini akan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas kinerja serta menjadi acuan dalam upaya perbaikan guna mencapai hasil yang lebih optimal di tahun mendatang.

Tabel 3.47 .
Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	Balmon Samarinda	100	100	Persentase Capaian Balmon Samarinda sama dengan Balmon Yogyakarta sebesar 100%
	Balmon Yogyakarta	100	100	

d. Analisis Pencapaian Target

Berdasarkan realisasi tahun 2025 capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara optimal serta mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target didukung oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan kegiatan yang matang, pemilihan metode pelaksanaan secara *hybrid* (*luring* dan *daring*) yang mampu menjangkau peserta lebih luas, serta koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan website pelayanan turut berperan dalam meningkatkan partisipasi peserta dari berbagai sektor.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, seperti keterbatasan jangkauan sosialisasi secara langsung di wilayah tertentu serta variasi tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan metode penyampaian materi yang lebih interaktif serta peningkatan frekuensi kegiatan agar dampak sosialisasi dapat lebih merata.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja tahun sebelumnya, berbagai rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik tahun 2025. Pemanfaatan laporan kinerja tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas perencanaan,

pelaksanaan, serta metode penyampaian informasi kepada masyarakat.

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan antara lain penerapan metode pelaksanaan secara *hybrid* (*luring* dan *daring*) sebagai upaya memperluas jangkauan peserta. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah partisipasi serta memungkinkan keterlibatan peserta dari berbagai wilayah. Selain itu, materi sosialisasi juga telah disempurnakan dengan menambahkan aspek perizinan, teknis penggunaan spektrum frekuensi radio, serta ketentuan terkait sanksi administratif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta.

Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan juga menjadi bagian dari



tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Di sisi lain, pemanfaatan media digital dalam penyebaran informasi kegiatan semakin dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas komunikasi kepada masyarakat.

Selain itu, monitoring dan evaluasi kegiatan telah dilakukan secara lebih terstruktur, termasuk melalui pengukuran tingkat kepuasan peserta yang digunakan sebagai dasar dalam perbaikan berkelanjutan. Dengan dilaksanakannya berbagai tindak lanjut tersebut, kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan kualitas dan efektivitas. Ke depan, hasil evaluasi ini akan terus dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan.

f. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

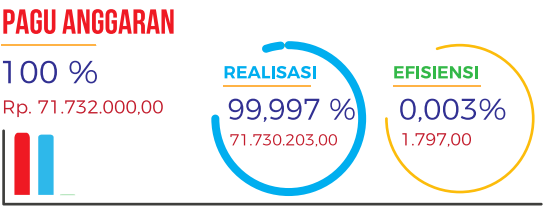
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik di masa mendatang, diperlukan beberapa langkah perbaikan yang berkelanjutan. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 serta tantangan yang dihadapi selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan terus mengangkat isu terkini yang berkaitan dengan perkembangan penggunaan spektrum frekuensi radio. Langkah ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mewujudkan ketertiban dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi hal yang penting untuk ditingkatkan, baik dalam penyelenggaraan kegiatan secara daring maupun dalam penyebaran materi sosialisasi melalui platform digital. Hal ini diharapkan dapat mempermudah akses informasi serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Dengan menerapkan berbagai rekomendasi tersebut, diharapkan pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik pada tahun berikutnya dapat memberikan dampak yang lebih luas, meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat, serta mendukung tercapainya kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan.

g. Efisiensi



Pada tahun 2025, realisasi anggaran untuk kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik mencapai 99,997% dari pagu yang telah ditetapkan, yang menunjukkan pengelolaan dan pemanfaatan anggaran berjalan secara optimal. Pagu anggaran tersebut dialokasikan secara spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja berupa persentase pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik. Melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang cermat, tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 0,003%, mencerminkan penggunaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Upaya efisiensi dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi secara *hybrid* (*luring* dan *daring*), yang memungkinkan peningkatan jangkauan peserta tanpa memerlukan tambahan biaya yang signifikan. Metode ini menjadi solusi efektif dalam menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas. Pemanfaatan media elektronik, seperti radio dan televisi, turut dioptimalkan untuk memperluas diseminasi informasi kepada masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara lebih efisien sekaligus tetap menjaga kualitas dan efektivitas penyampaian informasi.

h. **Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK**

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik, nilai-nilai BerAKHLAK telah diimplementasikan sebagai landasan dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penerapan nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai aspek sebagai berikut:

- 1. **Berorientasi Pelayanan**, Pelaksanaan sosialisasi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat terkait penggunaan spektrum frekuensi radio. Hal ini diwujudkan melalui penyampaian materi yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami, serta pemberian ruang interaksi yang responsif melalui sesi tanya jawab dan diskusi.
- 2. **Akuntabel**, Seluruh proses pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Materi yang disampaikan mengacu pada regulasi yang berlaku dan disajikan secara objektif.
- 3. **Kompeten**, Pegawai dan narasumber yang terlibat memiliki kompetensi sesuai bidangnya, serta terus meningkatkan kapasitas melalui pembaruan informasi dan pemahaman

terhadap regulasi terbaru, sehingga materi yang disampaikan akurat dan relevan.

- 4. **Harmonis**, Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan sikap ramah, santun, dan komunikatif dalam berinteraksi dengan peserta. Suasana kegiatan yang kondusif dan terbuka mendorong partisipasi aktif serta membangun kepercayaan masyarakat.
- 5. **Loyal**, Pelaksanaan sosialisasi menunjukkan dedikasi dalam mendukung program pemerintah serta menjaga nama baik instansi melalui pelayanan yang profesional, konsisten, dan berintegritas.
- 6. **Adaptif**, Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui metode hybrid (luring dan daring), sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
- 7. **Kolaboratif**, Keberhasilan pelaksanaan kegiatan didukung oleh kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau peserta yang lebih luas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan. Partisipasi masyarakat tersebut menjadi penting untuk mewujudkan sistem pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.

Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, disusun Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Regulasi ini menjadi acuan dalam mengukur kualitas pelayanan melalui penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang meliputi standar layanan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan pengaduan.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam pengukuran kualitas pelayanan adalah Survei Kepuasan Pelayanan Publik yang menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP). Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sehingga menghasilkan data yang akurat dan komprehensif.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, dan transparan, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik perlu dilakukan secara konsisten dan berkala. Hasil survei

tersebut dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam penyusunan langkah perbaikan layanan secara berkelanjutan, guna mewujudkan pelayanan prima serta memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

b. **Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya Survei Kepuasan Pelayanan Publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM/IPKP) ditetapkan sebesar 100%, dengan ketentuan minimal 1 kali pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun, jumlah responden minimal 30 orang, serta target nilai capaian sebesar 3.2 pada skala survei 4.0. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

c. **Capaian Target**

Dalam rangka pelaksanaan capaian maka tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda telah melaksanakan kegiatan Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP).

Pelaksanaan survei dilakukan secara berkala sepanjang periode Januari hingga Desember 2025 dengan memanfaatkan aplikasi survei pelayanan publik. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Partisipasi responden dalam survei ini menjadi dasar dalam memperoleh gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan, dengan rincian hasil yang disajikan pada tabel dan bagan pendukung sebagai berikut:

11. **INDIKATOR KINERJA**

PERSENTASE (%) SURVEY KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK (IKM/IPKP)



Target indikator kinerja ini adalah **100%**. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada bagan disebelah kiri ini, kemudian diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan dalam rangka capaian indikator kinerja.

Perbandingan capaian indikator kinerja pada tahun 2021 – 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.48 .
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Program	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	80%	125%	100%	266.67%	100%	100%	100%	100%	100%	122.19%

a. **Latar Belakang**

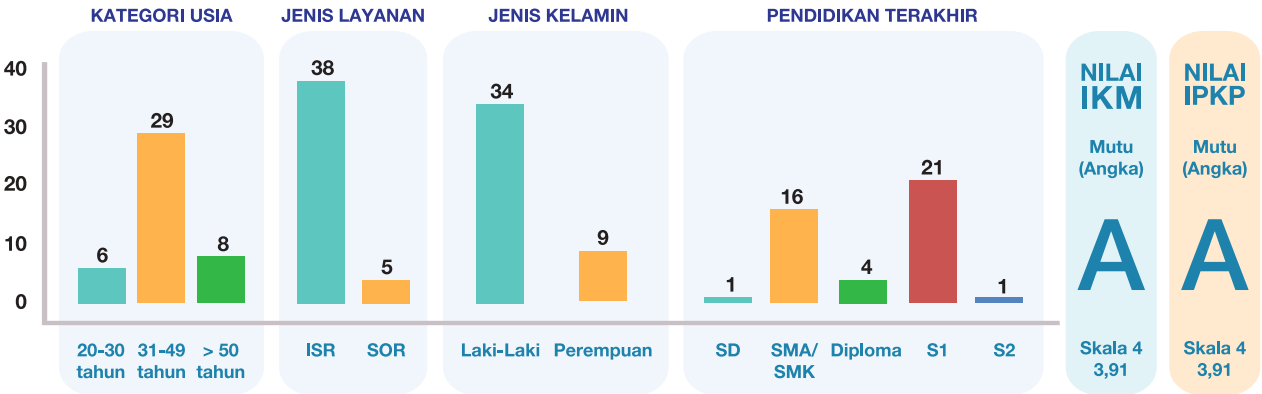
Sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, penyelenggara layanan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi kinerja pelayanan.

Tabel 3.49 .
Detail Nilai Survei Pelayanan Publik per Unsur

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM/IPKP)	Kategori	Indeks
	Biaya/Tarif	3.86
	Kompetensi Pelaksana	3.95
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.93
	Perilaku Pelaksana	3.91
	Persyaratan	3.93
	Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	3.88
	Sarana dan Prasarana	3.91
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.86
	Waktu Penyelesaian	3.93

Catatan:
Hasil survei di atas merupakan **hasil konversi data** yang dihasilkan melalui **proses pengolahan data** dari **Aplikasi Survei Pelayanan Publik** milik **Direktorat Layanan Infrastuktur Digital**.

Grafik 3.11.
Rincian Responden Survei Kepuasan Masyarakat (IKM/IPKP)



Sepanjang tahun 2025, kinerja pelayanan publik menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, yang tercermin dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Evaluasi mutu pelayanan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) menunjukkan capaian yang sangat baik, yang mengindikasikan bahwa kualitas layanan telah memenuhi ekspektasi pengguna layanan, dengan nilai capaian sebesar 3,91 pada skala 4,0 dan jumlah responden sebanyak 43 orang. Berdasarkan hasil tersebut, **capaian kinerja** mencapai **122,19%** dari target yang telah ditetapkan.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Tabel 3.50 .
Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target	Capaian	Capaian %
Persentase (%) Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	Balmon Samarinda	3.2	3.91	122.19
	Balmon Tangerang	3.2	3.89	121.56

Berdasarkan data kinerja yang tersedia, seluruh UPT memiliki target yang sama, yaitu sebesar 100%. Dalam hal realisasi, Balmon Samarinda mampu mencapai nilai sebesar 122,19%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Balmon Tangerang yang memperoleh capaian sebesar 121,56%.

Selisih capaian tersebut menunjukkan bahwa secara relatif Balmon Samarinda menempati posisi tertinggi di antara UPT yang dibandingkan. Meskipun demikian, perbedaan nilai yang tidak signifikan dengan Balmon Tangerang mencerminkan bahwa kedua UPT memiliki tingkat kinerja yang hampir seimbang serta sama-sama mampu mencapai hasil yang optimal.

d. Analisis Pencapaian Target

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan instrumen penting dalam menilai kualitas layanan serta tingkat kepuasan pengguna layanan secara objektif. Indikator ini mengukur keberhasilan

penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan persepsi masyarakat terhadap aspek pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil capaian tahun 2025, nilai indeks yang diperoleh berada di atas target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian mencapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan, serta mampu memberikan kepuasan yang tinggi kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, kemudahan akses layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, serta penyederhanaan prosedur pelayanan. Selain itu, pelaksanaan survei secara berkala dan berbasis digital juga memberikan kemudahan bagi responden dalam memberikan penilaian, sehingga meningkatkan partisipasi serta akurasi data yang diperoleh.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, seperti peningkatan jumlah responden agar hasil survei semakin representatif serta penguatan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Upaya perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan serta meningkatkan kepuasan pengguna layanan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

- 1). Faktor Keberhasilan pada Pencapaian Target**
- Keberhasilan dalam pencapaian target indikator Survei Pelayanan Publik (IKM/IPKP) tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain sebagai berikut:
- **Komitmen Pimpinan terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan**
Pimpinan secara konsisten memberikan arahan strategis dan dukungan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
 - **Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM**

Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan pegawai secara berkelanjutan mendorong peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan profesional.

- **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan**
Ketersediaan fasilitas layanan yang memadai, nyaman, dan ramah pengguna turut mendukung terciptanya pengalaman layanan yang positif bagi masyarakat.

2). Faktor Kendala pada Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan upaya pencapaian target indikator Survei Pelayanan Publik (IKM/IPKP), masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi hasil capaian. Adapun faktor-faktor kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

- **Tingkat Partisipasi Responden yang Belum Optimal**
Partisipasi masyarakat dalam pengisian survei kepuasan masih belum maksimal, sehingga mempengaruhi representativitas hasil penilaian yang diperoleh.
- **Variasi Persepsi dan Ekspektasi Masyarakat**
Perbedaan latar belakang, kebutuhan, dan harapan pengguna layanan menyebabkan adanya variasi penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
- **Pemanfaatan Kanal Pengaduan yang Masih Terbatas**
Meskipun kanal pengaduan telah tersedia, tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat masih rendah sehingga potensi umpan balik belum tergalai secara optimal.

3. Upaya percepatan dalam mencapai target / upaya perbaikan (Solusi)

Untuk mengoptimalkan pencapaian target dan mengatasi kendala yang dihadapi, beberapa Langkah strategis telah dilakukan:

- **Peningkatan Partisipasi Responden Survei**
Dilakukan optimalisasi partisipasi masyarakat melalui penyediaan akses survei yang lebih mudah dan cepat, antara lain dengan pemanfaatan media digital (*QR code/link survei*), pemberian pengingat kepada pengguna layanan setelah memperoleh layanan, serta pendampingan langsung bagi responden dalam pengisian survei.





- ♦ Standarisasi Persepsi Layanan melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan
Mengurangi variasi persepsi masyarakat dengan memastikan konsistensi penerapan standar pelayanan (SOP), peningkatan kualitas interaksi petugas layanan, serta penyamaan pemahaman pegawai dalam memberikan layanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pengguna.
- ♦ Optimalisasi Pengelolaan Kanal Pengaduan Masyarakat
Meningkatkan pemanfaatan kanal pengaduan melalui integrasi dengan sistem layanan, penyederhanaan mekanisme pengaduan, serta penyampaian informasi secara aktif kepada masyarakat terkait keberadaan dan manfaat kanal pengaduan.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) tahun 2025, capaian kinerja yang telah melampaui target dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan langkah strategis untuk peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Hasil survei tidak hanya berfungsi sebagai indikator keberhasilan kinerja, tetapi juga menjadi sumber data utama dalam mengidentifikasi kekuatan serta area yang masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tindak lanjut dari pemanfaatan laporan kinerja dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, hasil survei digunakan sebagai bahan evaluasi internal untuk melakukan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, khususnya pada aspek yang berkaitan dengan kecepatan layanan, kejelasan informasi, dan kemudahan akses. Kedua, data hasil survei dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan rencana aksi peningkatan kualitas

layanan, termasuk penguatan sistem pelayanan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Selanjutnya, hasil evaluasi juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan, dan penguatan kompetensi petugas pelayanan agar lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu, umpan balik dari masyarakat dimanfaatkan untuk menyempurnakan metode penyampaian informasi layanan agar lebih mudah dipahami dan menjangkau lebih luas.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tahun sebelumnya, telah dilakukan optimalisasi pelaksanaan survei berbasis online guna meningkatkan kemudahan akses bagi responden serta efisiensi dalam pengolahan data. Pelaksanaan survei secara berkala sepanjang tahun juga menjadi langkah konkret dalam memastikan proses evaluasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pemanfaatan laporan kinerja IKM/IPKP telah diimplementasikan secara optimal dalam bentuk kebijakan perbaikan layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem pelayanan. Upaya ini diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada periode berikutnya.

f. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Berdasarkan hasil capaian kinerja Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) tahun 2025 yang telah melampaui target, diperlukan langkah-langkah strategis guna mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya. Rekomendasi perbaikan disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi, umpan balik responden, serta perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang semakin cepat, mudah, dan transparan.

Salah satu fokus perbaikan pada aspek pelayanan adalah peningkatan kualitas unsur sistem, mekanisme, dan prosedur yang masih memiliki potensi untuk disempurnakan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap prosedur layanan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan penguatan penyampaian informasi terkait alur dan prosedur layanan secara jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh masyarakat, baik melalui layanan langsung di

unit pelayanan maupun melalui media digital seperti website, media sosial, dan aplikasi komunikasi.

Pengembangan layanan berbasis digital, termasuk penyediaan platform informasi dan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio, juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kemudahan akses serta transparansi layanan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat serta memahami proses layanan secara menyeluruh.

Dengan menerapkan berbagai rekomendasi tersebut secara konsisten, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan, tingkat kepuasan masyarakat tetap terjaga, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggara layanan semakin meningkat.

g. Efisiensi

Pada tahun 2025, pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dari sisi waktu, proses kerja, dan pemanfaatan sumber daya manusia. Kegiatan survei dilaksanakan secara terencana dan terjadwal sepanjang tahun, sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan penumpukan pekerjaan pada periode tertentu.

Pemanfaatan sistem survei berbasis digital memungkinkan proses pengisian kuesioner dilakukan secara *online* melalui link <https://s.komdigi.go.id/surveisamarinda2025> maupun dengan memindai barcode yang dikirimkan kepada pengguna layanan melalui email maupun media komunikasi lainnya, seperti WhatsApp oleh responden dengan lebih cepat dan fleksibel. Hal ini berdampak pada percepatan pengumpulan data serta meminimalkan kendala administratif yang biasanya terjadi pada metode konvensional. Selain itu, data yang diperoleh dapat langsung diolah dan dianalisis secara real-time, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif.

Dari sisi proses, pelaksanaan survei dilakukan dengan mekanisme yang mudah, sehingga memudahkan baik bagi petugas maupun responden dalam memahami alur pelaksanaan. Penyederhanaan prosedur ini turut meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian dan pengolahan data.

Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan survei didukung oleh pembagian tugas

yang jelas serta pemanfaatan kompetensi petugas secara optimal. Keterlibatan tim yang proporsional dan terkoordinasi dengan baik memungkinkan seluruh tahapan kegiatan berjalan secara efisien tanpa mengganggu pelaksanaan tugas utama lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) dapat dilaksanakan secara efektif, cepat, dan terstruktur, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) tahun 2025, nilai-nilai BerAKHLAK telah diimplementasikan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kegiatan, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Implementasi tersebut tercermin dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. **Berorientasi Pelayanan**, Pelaksanaan survei dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi responden, melalui penyediaan instrumen yang sederhana, mudah dipahami, serta akses pengisian yang fleksibel baik secara langsung maupun melalui media digital. Hasil survei dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan layanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.
2. **Akuntabel**, Seluruh proses pelaksanaan survei dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari penyusunan instrumen, pengumpulan data, hingga pengolahan dan pelaporan hasil. Penggunaan sistem digital mendukung keakuratan data serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pengolahan.
3. **Kompeten**, Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan survei senantiasa meningkatkan kapasitas dan pemahaman terkait metode survei, pengolahan data, serta interpretasi hasil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan survei dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Harmonis**, Pelaksanaan survei dilakukan dengan mengedepankan komunikasi yang baik, ramah, dan persuasif kepada responden. Interaksi yang positif ini menciptakan suasana yang kondusif sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan..
5. **Loyal**, Seluruh petugas menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab dalam melaksanakan

kegiatan survei sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

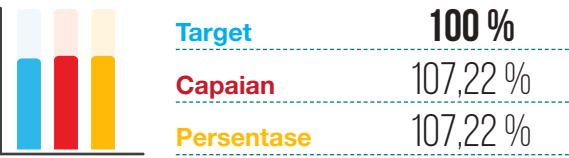
6. **Adaptif**, Pelaksanaan survei memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem berbasis digital yang memungkinkan proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Hal ini menunjukkan kemampuan

dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan modern.

7. **Kolaboratif**, Keberhasilan pelaksanaan survei didukung oleh kerja sama yang baik antar tim serta partisipasi aktif dari masyarakat sebagai responden. Sinergi ini menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang akurat dan relevan sebagai dasar evaluasi pelayanan.

12. INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE (%) PELAKSANAAN SURVEI INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK (IIPP/IPAK)



Target indikator kinerja ini adalah **100%**. Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada bagan disebelah ini, kemudian diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan dalam rangka capaian indikator kinerja berikut.

Perbandingan capaian indikator kinerja pada tahun 2021 – 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.51 .
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Program	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	80%	125%	100%	266.67%	100%	100%	100%	100%	100%	107.22%

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menerapkan prinsip integritas dalam seluruh proses layanan. Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, sekaligus menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola organisasi.

Sebagai unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, terdapat tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh layanan diberikan secara profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan KKN. Dalam rangka mengukur dan memastikan tingkat integritas dalam penyelenggaraan layanan tersebut, digunakan instrumen Survei Integritas

Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) sebagai alat evaluasi yang mampu memberikan gambaran objektif mengenai kualitas integritas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan layanan, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, potensi gratifikasi, dan perilaku petugas layanan. Hasil survei ini menjadi bagian penting dalam pengukuran kinerja organisasi serta sebagai dasar perumusan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang bersih dan berintegritas, Balmon Samarinda perlu secara konsisten melaksanakan Survei Integritas Pelayanan

Publik sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan Zona Integritas serta penguatan budaya anti-korupsi di lingkungan kerja.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya Survei Integritas Pelayanan Publik melalui Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) ditetapkan sebesar 100%, dengan ketentuan minimal 1 kali pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun, jumlah responden minimal 30 orang, serta target nilai capaian sebesar 3.6 pada skala survei 4.0. Pelaksanaan survei ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan

persyaratan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

c. Capaian Target

Pada tahun 2025, Balmon Samarinda telah melaksanakan kegiatan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dengan nilai capaian sebesar 3.86 pada skala survei 4.0 dan jumlah responden sebanyak 43 orang. Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja mencapai 107.22% dari target yang telah ditetapkan. **Capaian ini melebihi target capaian dengan persentase terhadap target sebesar 107.22%.**

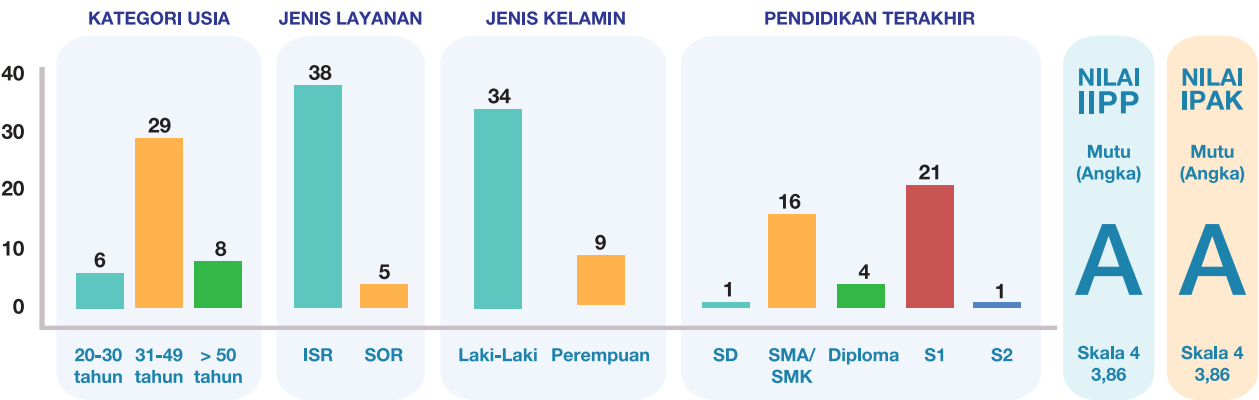
Tabel 3.52 .
Detail Nilai Survei Integritas Pelayanan Publik per Unsur

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)	Kategori	Indeks
	Diskriminasi Pelayanan	3.83
	Pelayanan Di Luar Prosedur	3.84
	Penerimaan Imbalan	3.88
	Percaloan/Perantara Tidak Resmi	3.88
	Pungutan Liar (Pungli)	3.88

Catatan:

Hasil survei di atas merupakan **hasil konversi data** yang dihasilkan melalui **proses pengolahan data** dari **Aplikasi Survei Pelayanan Publik** milik **Direktorat Layanan Infrastruktur Digital**.

Grafik 3.12.
Rincian Responden Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)



BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Indikator Survei Integritas Pelayanan Publik tidak secara langsung tercantum sebagai indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja lebih relevan dilakukan dengan unit pelaksana teknis lainnya yang memiliki karakteristik tugas dan fungsi sejenis, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih proporsional dalam menilai tingkat kinerja.

Tabel 3.53 .
Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik	Balmon Samarinda	100	107.22	Persentase Capaian Balmon Samarinda melebihi capaian Balmon Kupang sebesar 107.22%
	Balmon Kupang	100	104.7	

Pelaksanaan survey integritas pelayanan publik ditetapkan dengan target nilai capaian 3.6 dengan persentase 100%. Dalam pelaksanaan Balmon Samarinda berhasil mencapai realisasi sebesar 107.22% sehingga melampaui target yang ditetapkan, sedangkan Balmon Kupang mencapai 104.7%.

Berdasarkan hasil benchmark, capaian Balmon Samarinda menunjukkan kinerja yang relatif lebih tinggi dalam pelaksanaan survei integritas pelayanan publik. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan survei, serta komitmen yang kuat dalam menjaga dan meningkatkan integritas penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, capaian ini mengindikasikan bahwa upaya penguatan integritas dan transparansi layanan telah berjalan dengan baik. Selain itu, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepercayaan dan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

d. Analisis Pencapaian Target

Pencapaian target Indikator Survei Integritas Pelayanan Publik pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target nilai yang ditetapkan sebesar 3,6 dengan capaian 100% berhasil dilampaui dengan realisasi 3.86 pada skala 4.0 atau sebesar 107,22%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat integritas pelayanan publik yang diberikan telah berada di atas standar yang ditetapkan, serta mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan yang diterima.

Keberhasilan dalam mencapai dan melampaui target tersebut didukung oleh beberapa faktor. Pertama, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kedua, konsistensi dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur, sehingga pelayanan dapat diberikan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang memungkinkan proses layanan menjadi lebih transparan, mudah diakses, dan mencegah praktik KKN.



1). Faktor Keberhasilan pada Pencapaian Target

Keberhasilan dalam pencapaian target indikator Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Penguatan Komitmen Pimpinan dan Organisasi
Pimpinan secara konsisten memberikan arahan, dukungan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berintegritas, sehingga tercipta budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.
- Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pembinaan teknis telah mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih responsif, profesional, dan berintegritas.
- Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi Publik
Penyediaan informasi layanan yang lengkap, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital, turut mendukung terciptanya pelayanan yang transparan dan akuntabel.

2). Faktor Kendala pada Pencapaian Target

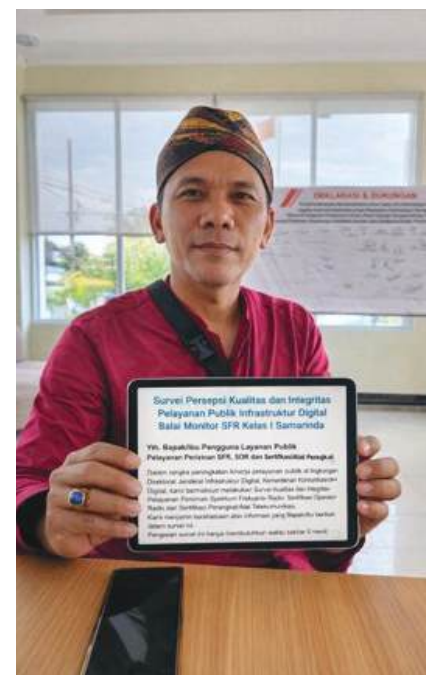
Dalam pelaksanaan upaya pencapaian target indikator Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK), masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi hasil capaian. Adapun faktor-faktor kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

- Keterbatasan Partisipasi Responden Survei
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengisian survei belum sepenuhnya optimal, sehingga berpengaruh terhadap representativitas hasil survei yang diperoleh.
- Pemahaman Masyarakat terhadap Mekanisme Survei yang Masih Terbatas
Sebagian pengguna layanan belum memahami tujuan dan tata cara pengisian survei integritas, yang berdampak pada kualitas dan validitas data yang dikumpulkan.
- Kendala Teknis dalam Pelaksanaan Layanan Berbasis Digital
Adanya gangguan teknis pada sistem layanan atau keterbatasan akses teknologi bagi sebagian pengguna layanan dapat mempengaruhi pengalaman layanan dan penilaian responden.

3). Upaya percepatan dalam mencapai target / upaya perbaikan (Solusi)

Untuk mengoptimalkan pencapaian target dan mengatasi kendala yang dihadapi, beberapa Langkah strategis telah dilakukan:

- Optimalisasi Tingkat Partisipasi Responden Survei
Mendorong partisipasi aktif pengguna layanan dengan memberikan pengingat (reminder) setelah layanan diberikan serta mempermudah akses pengisian survei melalui perangkat digital.
- Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
Melakukan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan terkait pentingnya survei integritas pelayanan publik, termasuk tata cara pengisian survei, melalui berbagai media komunikasi baik secara langsung maupun digital.



- Penyempurnaan dan Digitalisasi Sistem Layanan
Melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem layanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, serta transparansi pelayanan.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja Indikator Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Hasil survei yang telah diperoleh tidak hanya dijadikan sebagai bahan evaluasi, tetapi juga dimanfaatkan secara konkret dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan penguatan sistem pelayanan.

Salah satu bentuk pemanfaatan laporan kinerja adalah dengan melakukan identifikasi terhadap aspek-aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, khususnya pada unsur-unsur yang memiliki nilai relatif lebih rendah. Hasil identifikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), perbaikan mekanisme pelayanan, serta peningkatan kejelasan informasi layanan kepada masyarakat.

Selain itu, laporan kinerja juga dimanfaatkan sebagai dasar dalam penguatan integritas petugas pelayanan melalui pembinaan, internalisasi nilai-nilai integritas, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Pemanfaatan lainnya adalah dalam pengembangan sistem pelayanan berbasis digital, guna meningkatkan kemudahan akses, mempercepat proses layanan, serta meminimalisir potensi interaksi yang berisiko terhadap integritas pelayanan. Hasil survei juga digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja dan penetapan kebijakan pelayanan pada periode berikutnya, sehingga program yang dirancang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan pengguna layanan.

Di samping itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi tindak lanjut yang telah ditetapkan, guna memastikan efektivitas perbaikan yang dilakukan. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya menjadi dokumen administratif,

tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas dan integritas pelayanan publik secara berkelanjutan.

f. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Berdasarkan hasil capaian kinerja Indikator Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) yang telah melampaui target, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas integritas pelayanan pada tahun berikutnya. Rekomendasi perbaikan disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, umpan balik responden, serta dinamika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan sistem pengawasan internal melalui peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh proses pelayanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan layanan telah sesuai dengan standar operasional prosedur serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran integritas.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas pada aspek sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan, khususnya dalam penyederhanaan alur layanan dan kejelasan informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang transparan, mudah diakses, dan dipahami akan meningkatkan kepercayaan publik serta mengurangi potensi kesalahpahaman dalam proses pelayanan.

Penguatan budaya integritas juga menjadi fokus penting melalui kegiatan pembinaan dan internalisasi nilai-nilai integritas kepada seluruh petugas pelayanan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, serta penegakan kode etik secara konsisten guna membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas tinggi.

g. Efisiensi

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, khususnya dari aspek proses pelaksanaan, waktu, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Kegiatan survei dilaksanakan secara terencana dan terjadwal sepanjang tahun, sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan penumpukan pekerjaan pada periode tertentu.

Pemanfaatan sistem survei berbasis digital menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan efisiensi. Proses pengisian kuesioner yang dilakukan secara online melalui link <https://s.komdigi.go.id/surveisamarinda2025> memberikan kemudahan bagi responden untuk berpartisipasi secara fleksibel, tanpa dibatasi oleh waktu dan lokasi. Selain itu, sistem digital memungkinkan data yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis secara real-time, sehingga mempercepat proses penyusunan laporan dan pengambilan keputusan.

Dari sisi proses kerja, pelaksanaan survei dilakukan dengan mekanisme yang sederhana dan mudah dipahami, baik oleh petugas maupun responden. Penyederhanaan alur ini mampu mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian dan pengolahan data, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia, pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang baik antar petugas mendukung kelancaran seluruh tahapan pelaksanaan survei. Keterlibatan tim yang proporsional memungkinkan kegiatan berjalan optimal tanpa mengganggu pelaksanaan tugas utama lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dapat berjalan secara efektif, cepat, dan terstruktur. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mendukung kualitas hasil survei sebagai dasar dalam peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) mencerminkan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai fondasi dalam mewujudkan pelayanan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan secara konsisten dalam setiap tahapan kegiatan survei, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil tercermin dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. **Berorientasi Pelayanan**, diwujudkan melalui penyediaan mekanisme survei yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan responden, sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian secara nyaman dan objektif. Hasil survei juga dimanfaatkan sebagai

dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

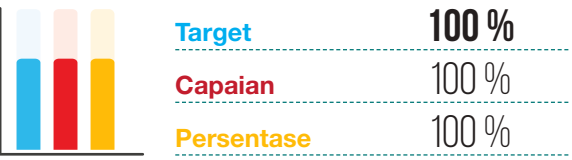
2. **Akuntabel**, tercermin dari proses pelaksanaan survei yang dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap data yang diperoleh dikelola secara objektif dan digunakan sebagai bahan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pengolahan.
3. **Kompeten**, ditunjukkan melalui kemampuan petugas dalam mengelola pelaksanaan survei secara profesional, termasuk dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Upaya peningkatan kapasitas terus dilakukan untuk menjaga kualitas hasil survei agar tetap valid dan reliabel.
4. **Harmonis**, diwujudkan melalui hubungan yang baik antara petugas dan responden, dengan mengedepankan sikap ramah, terbuka, dan menghargai setiap masukan yang diberikan

oleh masyarakat sebagai bagian dari proses perbaikan layanan.

5. **Loyal**, tercermin dari komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan survei sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan, serta menjaga integritas dan reputasi institusi melalui pelaksanaan tugas yang penuh tanggung jawab.
6. **Adaptif**, terlihat dari pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan survei, yang memungkinkan proses berjalan lebih efisien, cepat, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan modern.
7. **Kolaboratif**, diwujudkan melalui sinergi antar tim dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, sehingga seluruh tahapan pelaksanaan survei dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi.

13. INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE (%) VERIFIKASI SITE ISR MICROWAVE LINK YANG TIDAK SESUAI (PRIMAKSI)



Target indikator kinerja ini adalah **100%**. Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada bagan disebelah kiri ini, kemudian diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan dalam rangka capaian indikator kinerja ini.

Perbandingan capaian indikator kinerja pada tahun 2021 – 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.54 .
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Program	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimAksi)	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

a. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan spektrum frekuensi radio dan pelayanan perizinan, khususnya pada layanan microwave link, diperlukan data Izin Stasiun Radio (ISR) yang akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hasil pemeriksaan dan analisis yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah data site ISR yang tidak sesuai, baik dari aspek koordinat, lokasi, maupun parameter teknis lainnya.

Ketidaksesuaian data tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain gangguan interferensi frekuensi dan terhambatnya proses perizinan baru akibat keterbatasan kanal yang secara administratif terlihat padat namun tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah tindak lanjut yang terstruktur dan sistematis terhadap hasil verifikasi data site ISR yang tidak sesuai guna memastikan

akurasi dan optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

Melalui program PrimaAksi, dilakukan verifikasi site ISR Microwave link menjadi dua kategori, yaitu data site yang sesuai dan data site yang tidak sesuai. Terhadap data yang tidak sesuai, diperlukan proses tindak lanjut (TL) berupa klarifikasi, penyesuaian data, hingga pengajuan modifikasi ISR atau penggudangan oleh wajib bayar (waba). Tindak lanjut ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa data yang tercatat dalam sistem benar-benar mencerminkan kondisi aktual.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya tindak lanjut terhadap hasil verifikasi site ISR microwave link yang tidak sesuai (Prima Aksi) dengan target 100%. Tindak lanjut tersebut meliputi penyesuaian data koordinat site melalui pengajuan modifikasi ISR, serta penggudangan site oleh wajib bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

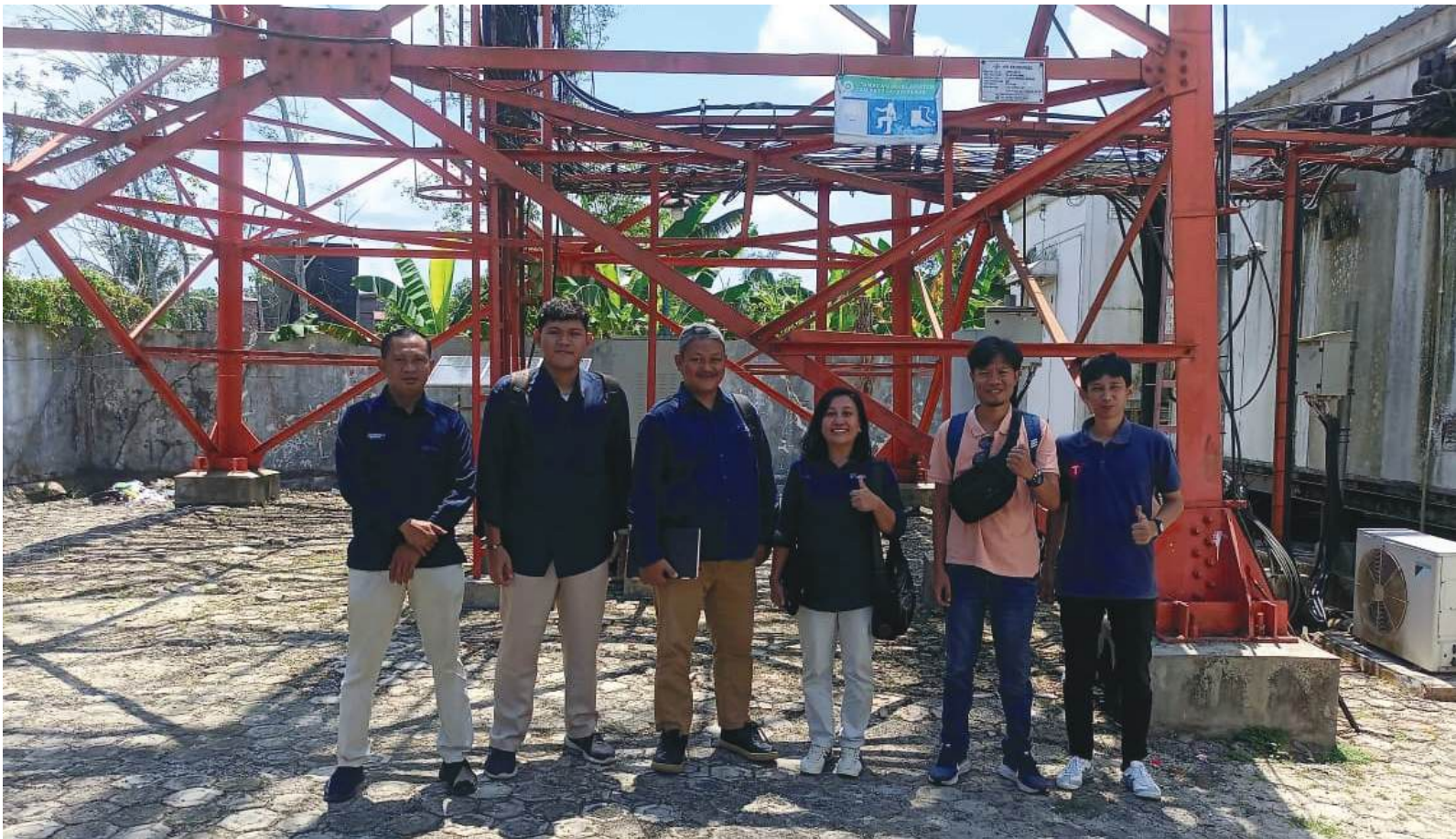
c. Capaian Target

Dalam rangka pelaksanaan capaian, pada tahun 2025 telah dilaksanakan Tindak Lanjut Verifikasi site ISR Microwave Link (Prima Aksi) untuk memastikan

seluruh temuan ketidaksesuaian hasil verifikasi koordinat site Microwave Link telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kegiatan diukur berdasarkan persentase jumlah site ISR yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan total site ISR yang teridentifikasi tidak sesuai hasil verifikasi. Dengan demikian, indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh temuan ketidaksesuaian data dapat diselesaikan secara efektif, sehingga meningkatkan akurasi database spektrum frekuensi radio, mendukung efisiensi penggunaan kanal, serta mempercepat proses pelayanan perizinan ISR secara berkelanjutan.

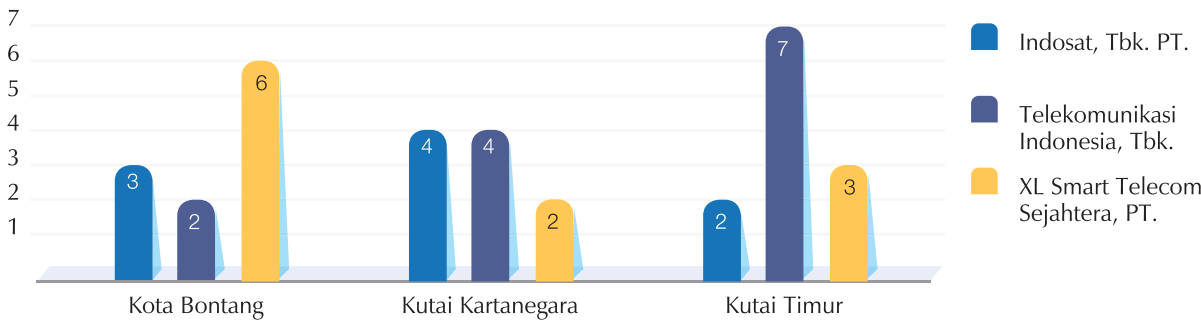
Berdasarkan hasil pelaksanaan, terdapat 33 link ISR yang tidak sesuai yang berasal dari 3 Operator Seluler di wilayah Kalimantan Timur. Seluruh link yang tidak sesuai tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga telah didukung dengan penyampaian laporan hasil evaluasi secara berkala setiap triwulan. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini melebihi target capaian dengan persentase terhadap target sebesar 100%.



Tabel 3.55.
Rekapitulasi Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link (Prima Aksi) Tahun 2025

No	Nama Pemegang ISR	Hasil Verifikasi Tidak Sesuai ISR (Target)		Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site Tidak Sesuai ISR				Capaian (% ISR)	Keterangan
				Sudah Ditindaklanjuti (Sesuai)		Belum Ditindaklanjuti (Belum Sesuai)			
		ISR	Site	ISR	Site	ISR	Site		
1	PT. INDOSAT	9	3	9	3	0	0	100.0%	
2	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	13	4	13	4	0	0	100.0%	
3	PT. XLSMART TELECOM SEJAHTERA	11	3	11	3	0	0	100.0%	

Grafik 3.13.
Data ISR Microwave Link (Prima Aksi) Tahun 2025 yang Telah ditindaklanjuti



BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Indikator Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimAksi) tidak secara langsung tercantum sebagai indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja lebih relevan dilakukan dengan unit pelaksana teknis lainnya yang memiliki karakteristik tugas dan fungsi sejenis, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih proporsional dalam menilai tingkat kinerja.

Tabel 3.56 .
Benchmark Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

Nama IKU	UPT Ditjen SDPPI	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimAksi)	Balmon Samarinda	100	100	Persentase Capaian Balmon Samarinda sama dengan capaian Balmon Yogyakarta sebesar 100%
	Balmon Yogyakarta	100	100	

Pelaksanaan Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimAksi) ditetapkan dengan target capaian dengan persentase 100%. Dalam pelaksanaan Balmon Samarinda sama dengan capaian Balmon Yogyakarta.

Berdasarkan hasil perbandingan, kedua unit pelaksana teknis telah mampu mencapai target tindak lanjut sebesar 100% terhadap Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimAksi).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum proses tindak lanjut hasil verifikasi telah dilaksanakan secara optimal, baik melalui mekanisme penyesuaian data seperti pengajuan modifikasi ISR maupun penggudangan ISR. Kesamaan capaian ini juga mencerminkan adanya standar operasional dan koordinasi yang berjalan dengan baik antar unit kerja dalam pelaksanaan program PrimaAksi.

Dengan demikian, hasil benchmarking ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mempertahankan kinerja yang telah dicapai serta mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tindak lanjut di masa mendatang, khususnya dalam memastikan akurasi data spektrum frekuensi radio dan optimalisasi pemanfaatan kanal microwave link.

d. Analisis Pencapaian Target

1). Faktor Keberhasilan pada Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target pada indikator Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang berperan secara signifikan dalam memastikan seluruh temuan dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Pertama, koordinasi yang efektif antara tim pelaksana dengan operator seluler (wajib bayar) menjadi kunci utama dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut. Komunikasi yang intensif memudahkan proses klarifikasi data serta percepatan pengajuan modifikasi atau penyesuaian ISR.

Kedua, ketersediaan data hasil verifikasi yang akurat dan terstruktur mendukung proses identifikasi permasalahan secara tepat, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ketiga, komitmen dan konsistensi tim dalam melaksanakan tindak lanjut secara berkelanjutan memastikan bahwa setiap temuan ketidaksesuaian tidak hanya diidentifikasi, tetapi juga diselesaikan hingga tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat, dukungan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data ISR, seperti Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), turut mempercepat proses pembaruan data dan monitoring status tindak lanjut secara real-time.

Kelima, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, termasuk penyusunan laporan triwulanan, memungkinkan pengawasan terhadap progres tindak lanjut serta identifikasi kendala yang dapat segera ditangani.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, pelaksanaan tindak lanjut verifikasi site ISR



yang tidak sesuai dapat berjalan secara efektif, sehingga mendukung peningkatan akurasi data spektrum frekuensi radio serta optimalisasi pemanfaatan kanal *microwave link*.

2. Faktor Kendala pada Pencapaian Target

Pencapaian indikator Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi yaitu, keterlambatan respons dari operator seluler dalam proses klarifikasi dan penyesuaian data ISR, adanya ketidaksesuaian atau perubahan data di lapangan yang memerlukan verifikasi ulang sehingga memperpanjang waktu penyelesaian, keterbatasan sumber daya manusia dan waktu dalam menangani seluruh temuan secara bersamaan, kendala teknis pada sistem informasi yang dapat mempengaruhi proses pembaruan data, faktor geografis dan aksesibilitas lokasi site yang menyulitkan proses verifikasi dan tindak lanjut secara langsung.

3. Upaya percepatan dalam mencapai target / upaya perbaikan (Solusi)

- Penetapan prioritas tindak lanjut berbasis tingkat ketidaksesuaian
Melakukan pengelompokan site untuk menentukan skala prioritas penanganan sehingga pelaksanaan tindak lanjut lebih efektif dan tepat sasaran.
- Penguatan koordinasi dengan pemegang ISR
Melaksanakan komunikasi intensif melalui pemberitahuan resmi dan reminder berkala guna mendorong percepatan penyelesaian ketidaksesuaian.
- Optimalisasi monitoring dan pengendalian kinerja
Memanfaatkan sistem pemantauan berbasis digital untuk mengawasi progres tindak lanjut secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- Pelaksanaan verifikasi ulang secara terencana
Menyusun dan melaksanakan jadwal verifikasi ulang secara sistematis untuk memastikan kesesuaian site dengan ketentuan yang berlaku



e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berikut adalah laporan kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimAksi) yang telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan spektrum frekuensi radio.

Salah satu hasil utama dari kegiatan verifikasi ini adalah peningkatan akurasi data. Akurasi yang lebih baik dalam database ini membantu dalam analisis teknis serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, termasuk dalam mitigasi potensi interferensi frekuensi di lapangan.

Selain itu, hasil tindak lanjut ini juga digunakan untuk pembaruan database SIMS secara menyeluruh. Data koordinat yang telah dikonfirmasi kesesuaiannya diintegrasikan ke dalam sistem pusat, yang berdampak langsung pada proses administrasi dan pengelolaan spektrum. Dengan demikian,



pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR) oleh stakeholder dapat dilakukan dengan lebih lancar, mengurangi kemungkinan penolakan akibat data yang tidak valid atau tidak akurat.

Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas proses verifikasi, Selanjutnya, dilakukan penguatan koordinasi dengan pemegang izin dan pemangku kepentingan terkait guna mempercepat penyelesaian atas ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses verifikasi. Data hasil verifikasi juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan serta sebagai dasar dalam penyempurnaan metode verifikasi di lapangan.

f. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Berdasarkan hasil pemanfaatan laporan kinerja pada kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi), diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan di tahun berikutnya. Beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

Meningkatkan frekuensi dan cakupan kegiatan verifikasi lapangan, khususnya pada wilayah dengan tingkat potensi ketidaksesuaian atau interferensi

yang tinggi, agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan preventif.

Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemegang izin serta pemangku kepentingan terkait melalui mekanisme yang lebih terstruktur, seperti forum koordinasi berkala atau notifikasi sistem, guna mempercepat tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian.

Mengembangkan metode verifikasi yang lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi pendukung, seperti tools pemetaan digital, sistem monitoring berbasis data, serta integrasi dengan aplikasi pengawasan lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses verifikasi.

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pembinaan berkelanjutan, khususnya dalam hal pemanfaatan sistem, analisis data, serta penanganan permasalahan teknis di lapangan.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan pelaksanaan verifikasi site ISR Microwave Link pada tahun selanjutnya dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan berkelanjutan dalam mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

g. Efisiensi

Dalam rangka mencapai target pada indikator Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi), telah diterapkan berbagai langkah efisiensi sumber daya yang mencakup aspek waktu, sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Penerapan efisiensi ini dilakukan secara terukur guna memastikan bahwa target kinerja dapat tercapai secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan tepat guna.

Dari aspek waktu, proses verifikasi dan pelaporan dilaksanakan secara *periodik* (triwulanan), sehingga memungkinkan penyusunan strategi pelaksanaan yang lebih terarah berdasarkan capaian pada setiap periode. Pendekatan ini mampu mengoptimalkan waktu kerja, menghindari penumpukan kegiatan, serta memastikan seluruh tahapan verifikasi dan tindak lanjut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dari sisi sumber daya manusia, efisiensi dicapai melalui pembagian tugas yang terstruktur berdasarkan wilayah kerja maupun kategori pemegang izin. Pembagian ini mendorong peningkatan fokus dan produktivitas tim dalam melaksanakan verifikasi dan tindak lanjut atas ketidaksesuaian, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih cepat, akurat, dan akuntabel.

Pemanfaatan teknologi juga berperan signifikan dalam mendukung efisiensi pelaksanaan, antara lain melalui penggunaan aplikasi pemetaan digital seperti *Google Earth* yang diperbarui secara berkala. Dengan dukungan visualisasi tersebut, proses identifikasi dan validasi koordinat site dapat dilakukan secara komprehensif tanpa harus selalu melakukan kunjungan langsung ke lapangan, sehingga mempercepat proses verifikasi.

Secara keseluruhan, penerapan strategi efisiensi tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target indikator tersebut. Optimalisasi pemanfaatan waktu, sumber daya manusia, dan teknologi mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan verifikasi serta tindak lanjut ketidaksesuaian, sekaligus mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih tertib, akurat, dan berkelanjutan.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

1. **Berorientasi Pelayanan**, memastikan bahwa seluruh proses verifikasi dilakukan secara akurat,

transparan, dan responsif terhadap kebutuhan stakeholder terkait, termasuk penyelenggara jaringan operator seluler. Selain memastikan ketepatan verifikasi data, tim juga proaktif dalam memahami dan menyesuaikan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi stakeholder.

2. **Akuntabel**, Setiap tahapan verifikasi dan tindak lanjut dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, didukung dengan dokumentasi yang lengkap serta pelaporan yang sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan.
3. **Kompeten**, Pelaksana kegiatan senantiasa meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman regulasi melalui pembelajaran berkelanjutan, sehingga mampu melaksanakan verifikasi dan analisis ketidaksesuaian secara tepat, akurat, dan profesional.
4. **Harmonis**, Dalam pelaksanaan kegiatan, dibangun hubungan kerja yang baik dan sinergis dengan sesama tim maupun pemangku kepentingan, guna menciptakan suasana kerja yang kondusif serta mendukung kelancaran proses tindak lanjut.
5. **Loyal**, Seluruh pelaksanaan tugas dilakukan dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta komitmen terhadap kebijakan organisasi dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio.
6. **Adaptif**, Pelaksanaan verifikasi dan tindak lanjut senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika lapangan, termasuk pemanfaatan sistem digital dan metode *deskwork analysis* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
7. **Kolaboratif**, Kegiatan verifikasi dan tindak lanjut dilakukan melalui kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, termasuk pemegang izin dan instansi terkait, guna mempercepat penyelesaian ketidaksesuaian serta meningkatkan kualitas data dan layanan.

SASARAN PROGRAM II

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DI TJEN INFRASTRUKTUR DIGITAL YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja, berikut penjelasan rinci pencapaian masing-masing indikator:

1. INDIKATOR KINERJA

NILAI KINERJA ANGGARAN BALAI/LOKA TAHUN 2025



Target indikator kinerja ini adalah **86.95**. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada bagan disebelah kiri, kemudian diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan dalam rangka capaian indikator kinerja ini.

Perbandingan capaian indikator kinerja pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.57.
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Program	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025	86	88.9	87	91.03	87	90.18	90.17	90.87	86.95	85.76

a. Latar Belakang

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan anggaran satuan kerja, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pencapaian output. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana anggaran yang dialokasikan dapat dikelola secara efektif, efisien, akuntabel, dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Dalam konteks Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda, pengelolaan anggaran memiliki peran strategis karena seluruh pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, pelayanan publik, pemeliharaan perangkat monitoring, serta dukungan tata kelola organisasi sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, capaian NKA tidak hanya menggambarkan kemampuan serapan anggaran, tetapi juga mencerminkan kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian antara realisasi anggaran dan output yang dihasilkan.

Selama periode 2021 sampai dengan 2024, Nilai Kinerja Anggaran Balmon Samarinda menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target. Pada tahun 2021, capaian NKA sebesar 88.90 dari target 86; tahun 2022 sebesar 91.03 dari target 87; tahun 2023 sebesar 90.18 dari target 87; dan tahun 2024 sebesar 90.87 dari target 90.17. Tren tersebut menunjukkan bahwa secara historis pengelolaan anggaran Balmon Samarinda telah berjalan baik dan mampu mendukung pelaksanaan program/kegiatan secara optimal.

Pada tahun 2025, pengukuran NKA menghadapi dinamika yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, yang berdampak pada peralihan DIPA dari **satker lama** dengan **kode 613420** ke **satker baru** dengan **kode 694698**. Perubahan tersebut turut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta metode perhitungan nilai kinerja anggaran. Meskipun demikian, pengelolaan anggaran

tetap dilaksanakan secara tertib dan akuntabel sebagai bentuk komitmen Balmon Samarinda dalam menjaga kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pada indikator ini adalah tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Balai/Loka Tahun 2025 sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 86.95. Pencapaian indikator ini diarahkan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran Balmon Samarinda dilaksanakan secara berkualitas, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, ketepatan administrasi keuangan, hingga pencapaian output kegiatan.

Melalui indikator ini, Balmon Samarinda berupaya menjaga agar pelaksanaan anggaran tetap mendukung pencapaian target kinerja organisasi, meskipun pada tahun 2025 terdapat dinamika berupa perubahan

nomenklatur, peralihan satker, pemisahan DIPA lama dan DIPA baru, serta penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Dengan demikian, sasaran kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada besaran nilai anggaran yang terserap, tetapi juga pada kualitas tata kelola anggaran yang tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Capaian Kinerja

Pada tahun 2025 terjadi perubahan nomenklatur yang menyebabkan perubahan dari DIPA Lama (nomor satker 613420) ke DIPA Baru (nomor satker 694698). Dengan adanya perubahan ini, maka terjadi perubahan pula pada cara perhitungan nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran Balmon SFR Kelas I Samarinda pada tahun 2025 adalah rata-rata nilai perencanaan DIPA baru dan rata-rata nilai IKPA. Nilai IKPA didapat dari rata-rata nilai IKPA Satker Lama dan nilai IKPA Satker Baru.

Rumus Perhitungan Capaian NKA 2025 :

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)
$$\frac{50\% \text{ *NK Perencanaan DIPA Baru} + 50\% \text{ *Nilai Pelaksanaan (Rata-Rata Baru + Lama)}}{2}$$

❖ Nilai Kinerja Perencanaan DIPA Baru : **75**
NK Perencanaan DIPA Baru = 75 * 50% = 37.5

❖ Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) **Satker Lama: 98,58**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konvers Total Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	059	613420	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SAMARINDA	Nilai	100.00	93.63	97.70	100.00	100.00	100.00	100.00	98.58	100%	0.00	96.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.04	19.54	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.82		99.43			100.00					

❖ Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) **Satker Baru: 94.46**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA													
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SAMARINDA													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Sampai Dengan : DESEMBER													
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total
1	046	059	694098	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SAMARINDA	Nilai	100.00	86.55	87.92	93.33	100.00	95.63	100.00	94.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	12.98	17.58	9.33	10.00	9.56	25.00	
					Nilai Aspek	93.28		94.22				100.00	

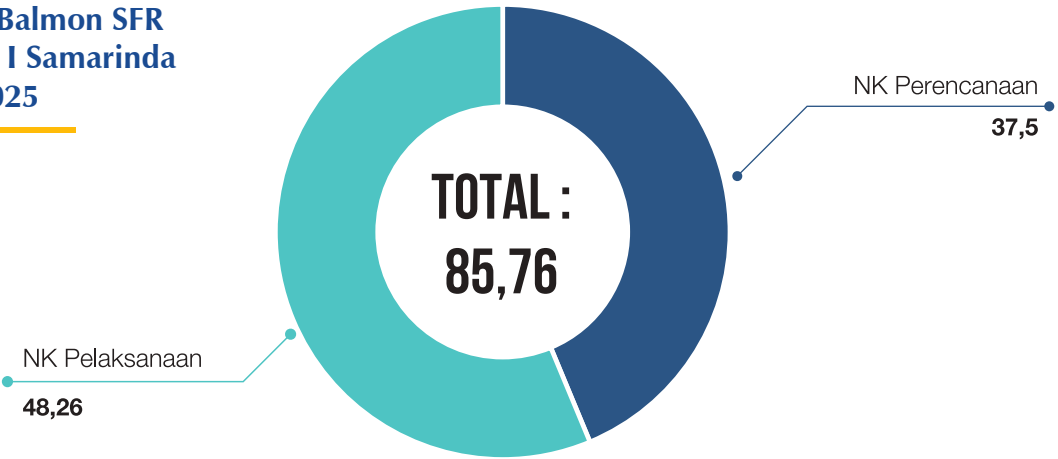
❖ Nilai Pelaksanaan = {(94.46+98.58)/2} * 50% = **48.26**

Total Nilai Kinerja Anggaran Bulan Desember 2025 = **37.5 + 48.26 = 85.76**

MONEY

Bagan 3.4.
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker pada Aplikasi Monev Kemenkeu

**NKA Balmon SFR
Kelas I Samarinda
TA 2025**



Pada tahun 2025, target dan capaian indikator mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Digital yang berdampak pada penyesuaian struktur organisasi serta peralihan satuan kerja (satker). Perubahan tersebut mempengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya dalam masa transisi pengelolaan DIPA dari satker lama ke satker baru, sehingga berimplikasi pada capaian nilai kinerja anggaran.

Meskipun demikian, capaian yang diperoleh masih berada dalam kategori baik dan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tetap berjalan secara efektif dan akuntabel di tengah proses transisi kelembagaan.

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

IKPA merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan value for money belanja Kementerian/Lembaga, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan Kementerian/Lembaga.

Penilaian IKPA pada Tahun 2025 meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu:

1). Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (Bobot 25%)

Aspek ini terdiri dari dua indikator, yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.

a) Revisi DIPA

Selama periode berjalan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 12 (dua belas) kali dari DIPA Lama dan DIPA Baru. Hal ini disebabkan oleh adanya pemotongan atau refocusing anggaran, serta pelaksanaan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Adapun Revisi yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda sebagai berikut:

- I. Revisi I tanggal 02 Desember 2024, revisi ini pertama dilakukan dalam rangka pemblokiran anggaran, sesuai dengan kebijakan pemerintah

dilakukan efisiensi anggaran (cek hal 4 dipa di blokir). Nilai Pagu DIPA Rp.15.335.140.000,-.

- II. Revisi II tanggal 14 April 2025, revisi ini dilakukan dalam rangka Pergeseran Anggaran Antar Belanja Pegawai dan Ralat Rencana Penarikan Halaman III DIPA. Nilai Pagu DIPA Rp. 14.632.437.000,-.
- III. Revisi Ke III tanggal 08 Juli 2025, revisi ini dilakukan karena adanya *cut off* DIPA menjadi **DIPA Kominfo** dan **DIPA Komdigi**, dengan semula PAGU Rp. 14.632.437.000,- menjadi Rp.4.888.348.000,-. Nilai Pagu DIPA Rp.4.888.348.000,-.
- IV. Revisi Ke IV tanggal 28 Juli 2025, revisi ini dilakukan dalam rangka mengisi kekurangan PAGU minus satker sebesar Rp. 1.910.000,- yang diambil dari Tenaga Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan. Nilai Pagu DIPA Rp. 4.886.438.000,-.
- V. Revisi Ke V tanggal 14 Juli 2025, revisi ini dilakukan dalam rangka Revisi Perbaikan Halaman III DIPA (Revisi RPD). Nilai Pagu DIPA Rp.9.744.089.000,-.
- VI. Revisi Ke VI tanggal 21 Agustus 2025, revisi ini dilakukan dalam rangka pergeseran antar belanja pegawai (51) dalam rangka memenuhi kekurangan tunjangan kinerja, uang makan, tunjangan umum PNS, gaji pokok PPPK, pembulatan, tunjangan suami, tunjangan anak, tunjangan beras dan tunjangan umum PPPK sebesar Rp.102.350.000,-. Nilai Pagu DIPA Rp. 9.744.089.000,-.
- VII. Revisi Ke VII tanggal 02 Oktober 2025, revisi ini dilakukan dalam rangka pergeseran Belanja Barang (002) ke Belanja Pegawai (51) seperti uang makan PPPK, tunjangan kinerja PNS, tunjangan kinerja PPPK dan lisensi aplikasi sebesar Rp. 421.625.000,- serta Revisi Perbaikan Halaman III DIPA (Revisi RPD). Nilai Pagu DIPA Rp. 9.744.089.000,-.
- VIII. Revisi Ke VIII tanggal 28 Oktober 2025, revisi ini dilakukan kewenangan DJA dalam rangka relaksasi anggaran ke-2 di lingkungan Kemenkomdigi TA

2025 untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai (51) sebesar Rp.780.220.000,-. Nilai Pagu DIPA Rp.10.524.309.000,-.

- IX. Revisi Ke IX 30 Oktober 2025, revisi ini dilakukan dalam rangka pergeseran sesama jenis belanja yaitu pengadaan pakaian seragam, pembinaan dan konsultasi meeting luar kota, inspeksi perangkat portable SMFR, inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio luar kota transportasi darat, inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio luar kota transportasi udara, inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio luar kota transportasi laut, Ujian Negara Amatir Radio luar kota, sosialisasi pengguna frekuensi, pencegahan dan pendampingan penanganan piutang BHP frekuensi radio, pelaksanaan perizinan Maritim on The Spot, pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio dalam kota, pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi darat, pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi udara, pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi laut, penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kota, penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi darat, penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi udara, daya tahan tubuh, langganan daya dan jasa, perawatan gedung kantor, pemeliharaan peralatan kantor, surveillance ISO, general medical check up. Nilai Pagu DIPA Rp 10.524.309.000,-.
- X. Revisi Ke X tanggal 20 November 2025, revisi ini dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal PAGU anggaran berubah dan

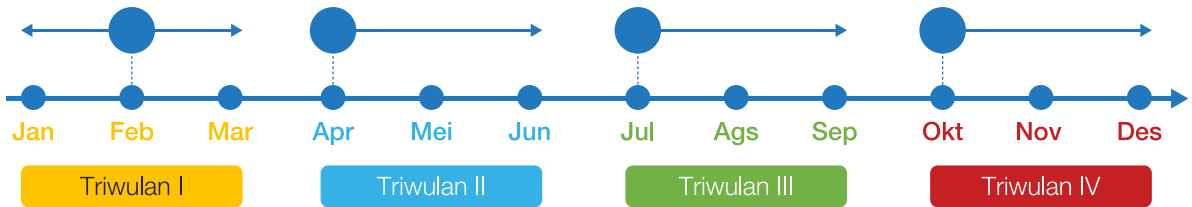
revisi administrasi. Nilai Pagu DIPA Rp. 7.906.565.000,-.

- XI. Revisi Ke XI tanggal 24 November 2025, revisi ini dilakukan dalam rangka pergeseran sesama jenis belanja untuk memenuhi kekurangan Belanja Pegawai (51) dan kebutuhan Belanja Barang (52). Nilai Pagu DIPA Rp. 7.906.565.000,-.
- XII. Revisi Ke XII tanggal 12 Desember 2025, revisi ini dilakukan dalam rangka penyesuaian anggaran dan revisi perbaikan halaman III DIPA yaitu operasional perkantoran dan pimpinan, iklan layanan masyarakat, pengelolaan SAP, pengurus/penyimpan BMN, inspeksi perangkat portable, inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio luar kota transportasi darat, inspeksi perangkat portable, inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio luar kota transportasi udara, pencegahan dan pendampingan penanganan piutang BHP frekuensi radio, pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi darat, pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi laut, penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi udara, langganan daya dan jasa operasional perkantoran dan pimpinan, perawatan gedung kantor, surveillance ISO, general medical check up, peningkatan kemampuan SDM, pengadaan alat pengolah data dan pengadaan elektronik. Nilai Pagu DIPA Rp 7.906.565.000,-.

b) Deviasi Halaman III DIPA

Dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja. pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan:

Bagan 3.5.
Jadwal Pemutakhiran RPD Hal III DIPA



Tabel 3.58.
Rekapitulasi Deviasi Hal III DIPA Tahun 2025 **Satker Lama (613420)**

Periode	Rencana (Rp)	Penyerapan (Rp)	Deviasi (Rp)	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
Januari	139.836.293	128.237.849	11.598.444	0	100
Februari	594.341.861	485.827.139	108.514.722	6,9	100
Maret	909.514.819	1.735.507.175	825.992.356	7,38	100
April	664.002.413	637.423.478	26.578.935	5,54	100
Mei	894.829.213	911.755.612	16.926.399	4,85	100
Juni	1.047.428.077	758.656.862	288.771.215	7,63	88,33
Juli	226.401.516	226.401.516	0	10,52	90
Agustus	0	0	0	8,75	91,25
September	0	0	0	7,78	92,22
Oktober	0	0	0	7	93
November	0	0	0	6,37	93,63
Desember	0	0	0	6,37	93,63

Tabel 3.59.
Rekapitulasi Deviasi Hal III DIPA Tahun 2025 **Satker Baru (694698)**

Periode	Rencana (Rp)	Penyerapan (Rp)	Deviasi (Rp)	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
Agustus	187.698.000	183.441.127	4.256.873	0,08	100
September	1.359.066.069	745.851.561	613.214.508	11,36	88,64
Oktober	1.045.223.069	1.198.081.386	152.858.317	11,5	88,5
November	1.297.509.533	1.223.236.309	74.273.224	13,7	86,3
Desember	1.256.950.422	1.441.398.978	184.448.556	13,45	86,55

2) Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Bobot 50%)

Aspek ini terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM.

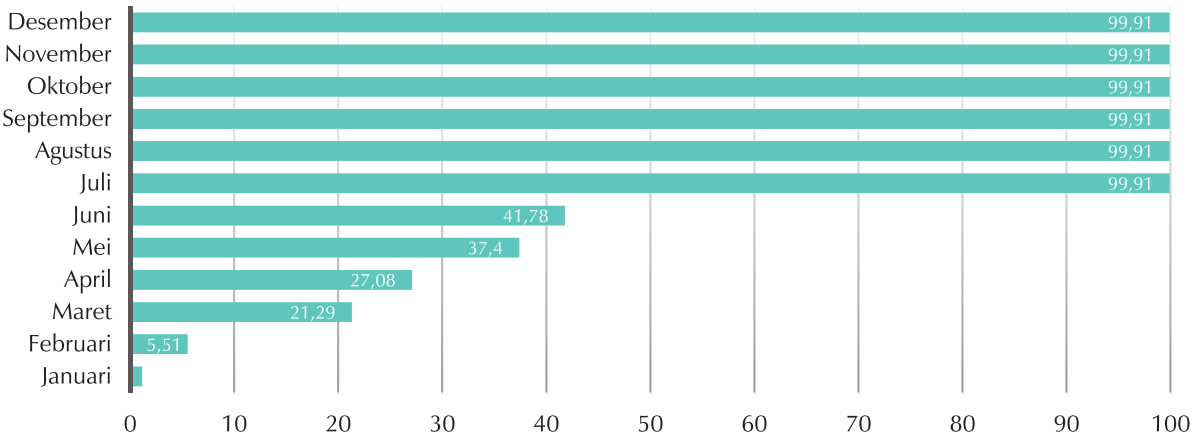
a) Penyerapan Anggaran

Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja, diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan. Pagu Anggaran pada akhir tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda terbagi menjadi dua, yaitu anggaran satker lama (613420) yang berjumlah sebesar Rp 4.886.438.000 dengan realisasi Rp 4.888.348.000 (99,91%) dan anggaran satker baru (694698) yang berjumlah sebesar Rp 7.503.865.000 dengan realisasi di akhir tahun sebesar Rp. 7.405.073.942 (98,68 %). Berikut persentase penyerapan anggaran 2025:

Tabel 3.60.
Rekapitulasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2025 **Satker Lama (613420)**

Periode	Pagu DIPA (Tanpa Blokir)		Realisasi	Persen (%)	Nilai IKPA
Januari	Rp.	11.146.539.000	Rp. 128.237.849	1,15%	100
Februari	Rp.	11.146.539.000	Rp. 614.064.988	5,51%	100
Maret	Rp.	11.146.539.000	Rp. 2.373.318.027	21,29%	100
April	Rp.	11.146.539.000	Rp. 3.018.084.236	27,08%	83,85
Mei	Rp.	11.146.539.000	Rp. 4.168.965.755	37,40%	93,7
Juni	Rp.	11.146.539.000	Rp. 4.657.408.115	41,78%	95,39
Juli	Rp.	4.888.348.000	Rp. 4.883.809.631	99,91%	96,93
Agustus	Rp.	4.888.348.000	Rp. 4.883.809.631	99,91%	96,93
September	Rp.	4.888.348.000	Rp. 4.883.809.631	99,91%	96,93
Oktober	Rp.	4.886.438.000	Rp. 4.883.809.631	99,91%	97,7
November	Rp.	4.886.438.000	Rp. 4.883.809.631	99,91%	97,7
Desember	Rp.	4.886.438.000	Rp. 4.883.809.631	99,91%	97,7

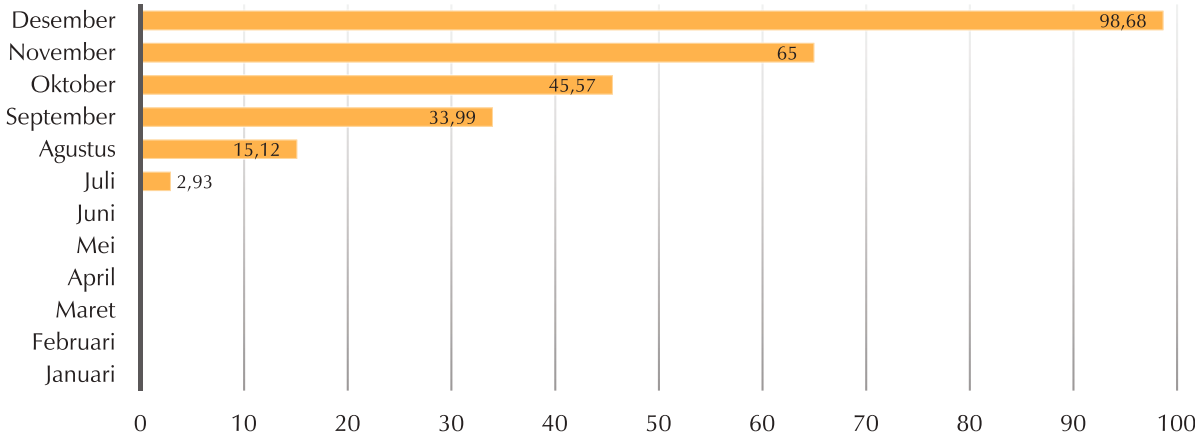
Grafik 3.14.
Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2025 **Satker Lama (613420)**



Tabel 3.61.
Rekapitulasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2025 **Satker Baru (694698)**

Periode	Pagu DIPA (Tanpa Blokir)		Realisasi	Persen (%)	Nilai IKPA
Januari	Rp.	-	Rp. -	0,00%	100
Februari	Rp.	-	Rp. -	0,00%	100
Maret	Rp.	-	Rp. -	0,00%	100
April	Rp.	-	Rp. -	0,00%	100
Mei	Rp.	-	Rp. -	0,00%	100
Juni	Rp.	-	Rp. -	0,00%	100
Juli	Rp.	6.258.191.000	Rp. 183.441.127	2,93%	68,17
Agustus	Rp.	6.258.191.000	Rp. 946.275.688	15,12%	74,42
September	Rp.	6.258.191.000	Rp. 2.127.374.074	33,99%	83,89
Oktober	Rp.	7.503.865.000	Rp. 3.419.365.833	45,57%	76,85
November	Rp.	7.503.865.000	Rp. 4.877.332.554	65,00%	82,81
Desember	Rp.	7.503.865.000	Rp. 7.405.073.942	98,68%	87,92

Grafik 3.15.
Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2025 **Satker Baru (694698)**



b) Belanja Kontraktual

Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada K/L/Unit Eselon I/Satker. Dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 40%), Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 40%) dan Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak (bobot 20%).

Tabel 3.62.
Rekapitulasi Belanja Kontraktual Tahun 2025 **Satker Lama (613420)**

Periode	Komponen Ketepatan Waktu		Komponen Akselerasi Kontrak Dini			Komponen Akselerasi Belanja 53			Nilai
	Jumlah Kontrak	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak Tw I	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak Belanja 53	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	
Januari	4	100	4	0	110	0	0	0	100
Pebruari	4	100	4	0	110	0	0	0	100
Maret	4	100	4	0	110	0	0	0	100
April	4	100	4	0	110	0	0	0	100
Mei	4	100	4	0	110	0	0	0	100
Juni	4	100	4	0	110	0	0	0	100
Juli	4	100	4	0	110	0	0	0	100
Agustus	4	100	4	0	110	0	0	0	100
September	4	100	4	0	110	0	0	0	100
Oktober	4	100	4	0	110	0	0	0	100
Nopember	4	100	4	0	110	0	0	0	100
Desember	4	100	4	0	110	0	0	0	100

Tabel 3.63.
Rekapitulasi Belanja Kontraktual Tahun 2025 **Satker Baru (694698)**

Periode	Komponen Ketepatan Waktu		Komponen Akselerasi Kontrak Dini			Komponen Akselerasi Belanja 53			Nilai
	Jumlah Kontrak	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak Tw I	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak Belanja 53	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	
Januari	1	100	1	0	110	0	0	0	100
Pebruari	1	100	1	0	110	0	0	0	100
Maret	1	100	1	0	110	0	0	0	100

Periode	Komponen Ketepatan Waktu		Komponen Akselerasi Kontrak Dini			Komponen Akselerasi Belanja 53			Nilai
	Jumlah Kontrak	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak Tw I	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	Jumlah Kontrak Belanja 53	Jumlah Kontrak Akselerasi	Nilai Komponen	
April	1	100	1	0	110	0	0	0	100
Mei	1	100	1	0	110	0	0	0	100
Juni	1	100	1	0	110	0	0	0	100
Juli	1	100	1	0	110	0	0	0	100
Agustus	2	100	1	0	110	0	0	0	100
September	2	100	1	0	110	0	0	0	100
Oktober	4	60	1	0	110	0	0	0	93,33
Nopember	6	60	1	0	110	0	0	0	93,33
Desember	6	60	1	0	110	0	0	0	93,33

c) **Penyelesaian Tagihan**

Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

Tabel 3.64.
*Rekapitulasi Penyelesaian Tagihan Tahun 2025 **Satker Lama (613420)***

No.	Periode	Tepat Waktu (akumulatif)	Terlambat (akumulatif)	Total (akumulatif)	Persen
1.	Januari	0	0	0	0
2.	Pebruari	1	0	1	100
3.	Maret	5	0	5	100
4.	April	6	0	6	100
5.	Mei	7	0	7	100
6.	Juni	8	0	8	100
7.	Juli	8	0	8	100
8.	Agustus	8	0	8	100
9.	September	8	0	8	100
10.	Oktober	8	0	8	100
11.	Nopember	8	0	8	100
12.	Desember	8	0	8	100

Tabel 3.65.
*Rekapitulasi Penyelesaian Tagihan Tahun 2025 **Satker Baru (694698)***

No.	Periode	Tepat Waktu (akumulatif)	Terlambat (akumulatif)	Total (akumulatif)	Persen
1.	Januari	0	0	0	0
2.	Pebruari	0	0	0	0
3.	Maret	0	0	0	0
4.	April	0	0	0	0
5.	Mei	0	0	0	0
6.	Juni	0	0	0	0
7.	Juli	0	0	0	0
8.	Agustus	1	0	1	100
9.	September	2	0	2	100
10.	Oktober	6	0	6	100
11.	Nopember	8	0	8	100
12.	Desember	18	0	18	100

Selama tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda pada kode satker lama (613420) terdapat 8 SPM dan pada kode satker baru (694698) terdapat 18 SPM penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) yang telah diselesaikan dengan ketepatan waktu dengan persentase penilaian 100% yang telah diajukan SPM ke KPPN.

d) **Pengelolaan UP dan TUP**

Bobot penilaian indikator pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dalam IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) memiliki total kontribusi 8% terhadap nilai total IKPA. Nilai ini merupakan hasil komposit dari tiga komponen utama: ketepatan waktu (50%): Menilai ketepatan waktu pertanggungjawaban GUP (Ganti Uang Persediaan) dan PTUP (Pertanggungjawaban TUP); persentase GUP (25%): Menilai rata-rata persentase GUP yang disebulankan terhadap total GUP ke KPPN; dan setoran TUP (25%): Menilai rasio setoran sisa TUP terhadap total nominal TUP yang dikelola dalam satu tahun anggaran.

Tabel 3.66.
*Rekapitulasi Detail Indikator Kinerja Pengelolaan UP dan TUP Tahun 2025 **Satker Lama (613420)***

Periode	Komponen Ketepatan Waktu			Komponen Persentase GUP		Komponen Setoran TUP			Nilai IKPA
	Jumlah Pertanggung jawaban	Tepat Waktu	Nilai Komponen	Jumlah GUP	Nilai Komponen	Jumlah TUP (Nominal)	Jumlah Setoran (Nominal)	Nilai Komponen	
Januari	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Pebruari	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Maret	2	2	100	2	100	0	0	100	100
April	3	3	100	3	100	0	0	100	100
Mei	4	4	100	3	100	0	0	100	100
Juni	4	4	100	3	100	0	0	100	100
Juli	4	4	100	3	100	0	0	100	100
Agustus	4	4	100	3	100	0	0	100	100
September	4	4	100	3	100	0	0	100	100
Oktober	4	4	100	3	100	0	0	100	100
Nopember	4	4	100	3	100	0	0	100	100
Desember	4	4	100	3	100	0	0	100	100

Tabel 3.67.
*Rekapitulasi Detail Indikator Kinerja Pengelolaan UP dan TUP Tahun 2025 **Satker Baru (694698)***

Periode	Komponen Ketepatan Waktu			Komponen Persentase GUP		Komponen Setoran TUP			Nilai Komponen UP dan TUP Tunai	Nilai Komponen UP KKP	Nilai IKPA
	Jumlah Pertanggung jawaban	Tepat Waktu	Nilai Komponen	Jumlah GUP	Nilai Komponen	Jumlah TUP (Nominal)	Jumlah Setoran (Nominal)	Nilai Komponen			
Januari	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
Pebruari	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
Maret	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
April	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
September	2	2	100	2	100	0	0	100	100	0	100
Oktober	5	5	100	5	94,33	0	0	100	98,58	100	98,72
Nopember	9	9	100	9	96,85	0	0	100	99,21	100	99,29
Desember	13	13	100	11	97,42	38.871.000	6.549.000	83,15	95,14	100	95,63

e) **Dispensasi SPM**

Dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV. Pada tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda telah berupaya semaksimal mungkin agar dalam pengajuan data kontrak sesuai dengan peraturan dan jadwal yang telah ditargetkan sehingga tidak ada pengajuan dispensasi terhadap pelaksanaan anggaran barang/jasa.

3) **Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Bobot 25%)**

Aspek ini terdiri dari 1 indikator, yaitu Capaian Output.

a) **Capaian Output**

Dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 30%) dan capaian RO (bobot 70%)

Tabel 3.68.
*Rekapitulasi Capaian Output Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 DIPA **Satker Lama (613420)***

Bulan	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
Januari	13	1300	100	100	100
Pebruari	11	1300	100	100	100
Maret	11	1300	100	100	100
April	11	1216,67	100	100	100
Mei	11	1091,67	99,24	100	99,47
Juni	11	903,64	82,15	100	87,51
Juli	6	600	100	100	100
Agustus	6	600	100	100	100
September	6	600	100	100	100
Oktober	6	600	100	100	100
Nopember	6	600	100	100	100
Desember	6	600	100	100	100

Tabel 3.69.
*Rekapitulasi Capaian Output Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 DIPA **Satker Baru (694698)***

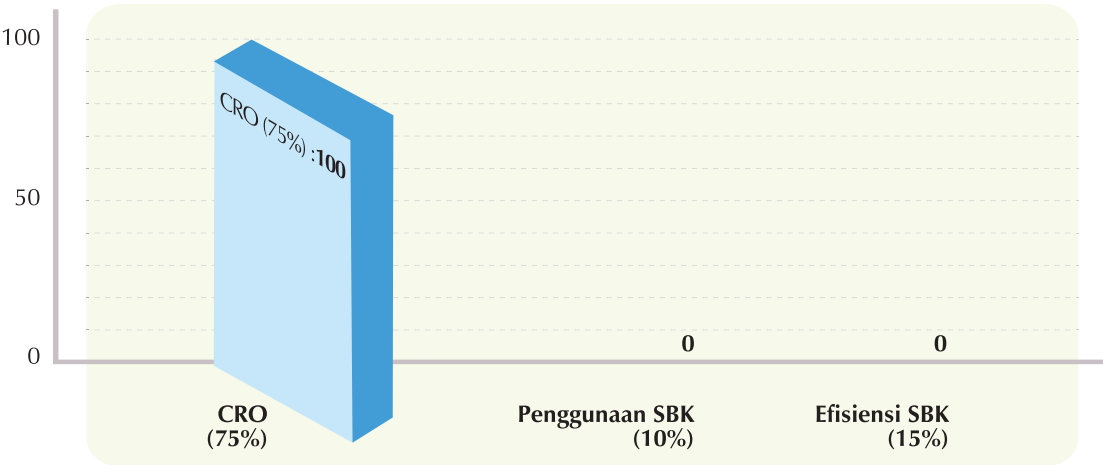
Bulan	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
Januari	0	0	0	100	0
Pebruari	0	0	0	100	0
Maret	0	0	0	100	0
April	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0
Juli	11	1200	100	100	100
Agustus	11	877,01	79,73	100	85,81
September	11	1212	100	100	100
Oktober	11	1101,01	100	100	100
Nopember	11	1156	100	100	100
Desember	11	1100	100	100	100

b) **E-Monev Smart DJA**

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- 1) Capaian output Variabel ini terdiri atas Capaian Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan capaian RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target Indikator Output Program dan Capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 75 persen.
- 2) Penggunaan SBK dari e-Monev SMART DJA akan melakukan pemetaan atas RO yang memenuhi kriteria SBKU terlebih dahulu sebelum menilai penggunaan SBKU. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 10 persen.
- 3) Efisiensi SBK ini terdiri atas efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tingkat satuan kerja. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah tercapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 15 persen.

Grafik 3.16.
Capaian Nilai Smart pada aplikasi E-Monev Smart



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

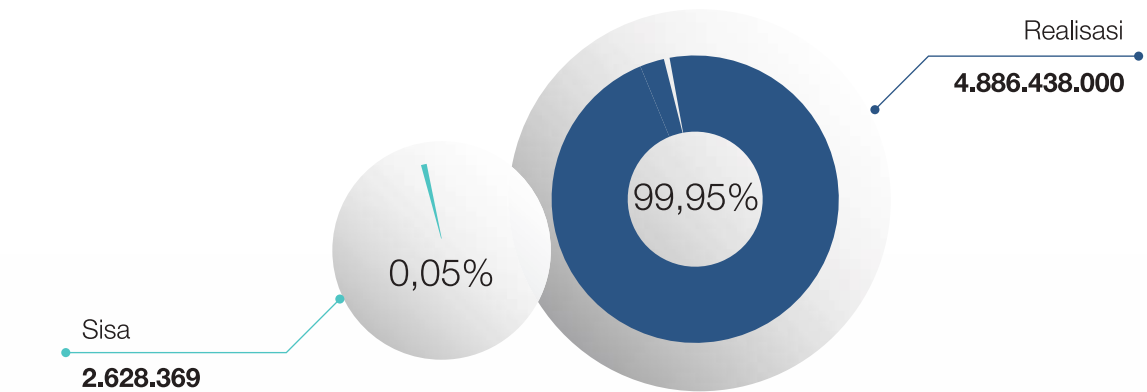
“Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi”

REALISASI ANGGARAN

Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 terbagi menjadi dua:

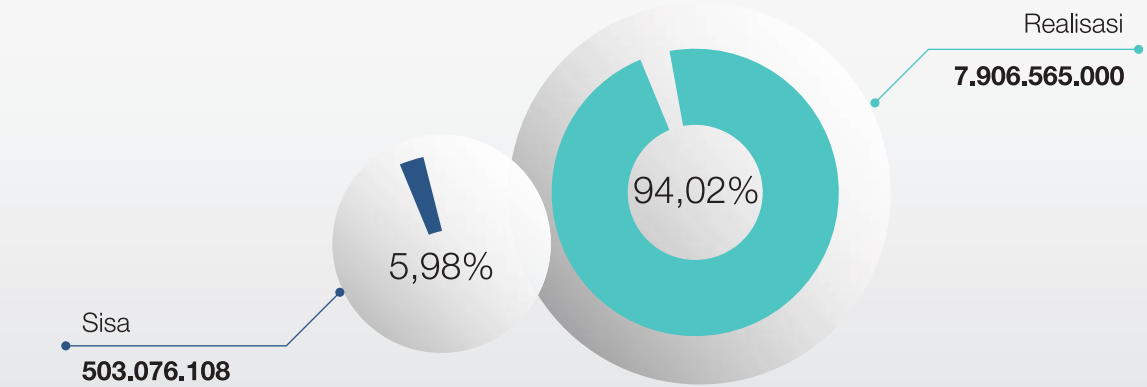
- 1). **Pagu DIPA Satker Lama (613420)** sebesar Rp. 4.886.438.000. Pagu dana tersebut berasal dari 2 sumber dana yaitu Rupiah Murni sebesar Rp. 4.101.138.000,- dan PNPB sebesar Rp. 785.300.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp. 4.883.809.631,-.

Bagan 3.6.
Persentase Realisasi Anggaran 2025 DIPA Satker Lama (613420)



- 2). **Pagu DIPA Satker Baru (694698)** sebesar Rp. 9.744.089.000, kemudian seiring berjalannya waktu terjadi revisi/refocusing sehingga pagu akhir yang digunakan untuk realisasi adalah sebesar Rp. 7.906.565.000,-. Pagu dana tersebut berasal dari 2 sumber dana yaitu Rupiah Murni sebesar Rp. 4.461.171.000,- dan PNPB sebesar Rp. 3.445.394.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp. 7.403.488.892,-.

Bagan 3.7.
Persentase Realisasi Anggaran 2025 DIPA Satker Baru (694698)



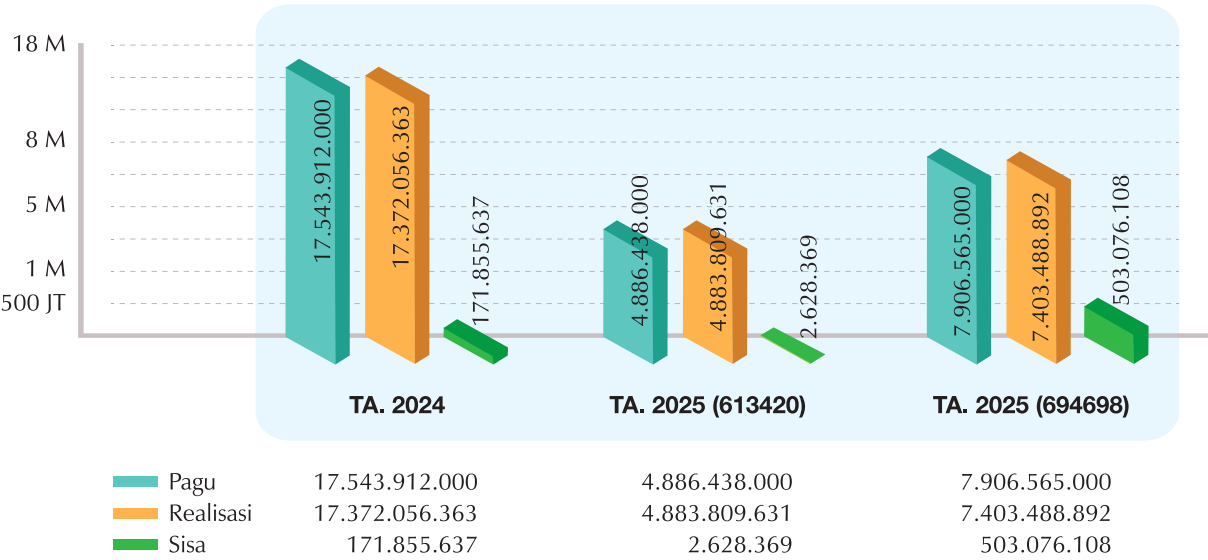
Pelaksanaan program kerja pada Tahun Anggaran 2025 secara umum berjalan dengan baik dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan negara, termasuk kebijakan terbaru terkait perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan anggaran.

Pada tahun 2025 terdapat dinamika pelaksanaan kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Digital serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk penjadwalan ulang beberapa kegiatan agar tetap selaras dengan prioritas dan ketersediaan anggaran. Meskipun demikian, pelaksanaan program kerja tetap berjalan secara optimal dan

terkendali. Sisa anggaran yang terdapat pada akhir tahun merupakan hasil dari penyesuaian jadwal kegiatan dan upaya efisiensi dalam pelaksanaan program, tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 dan realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.17.
Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dan TA 2025



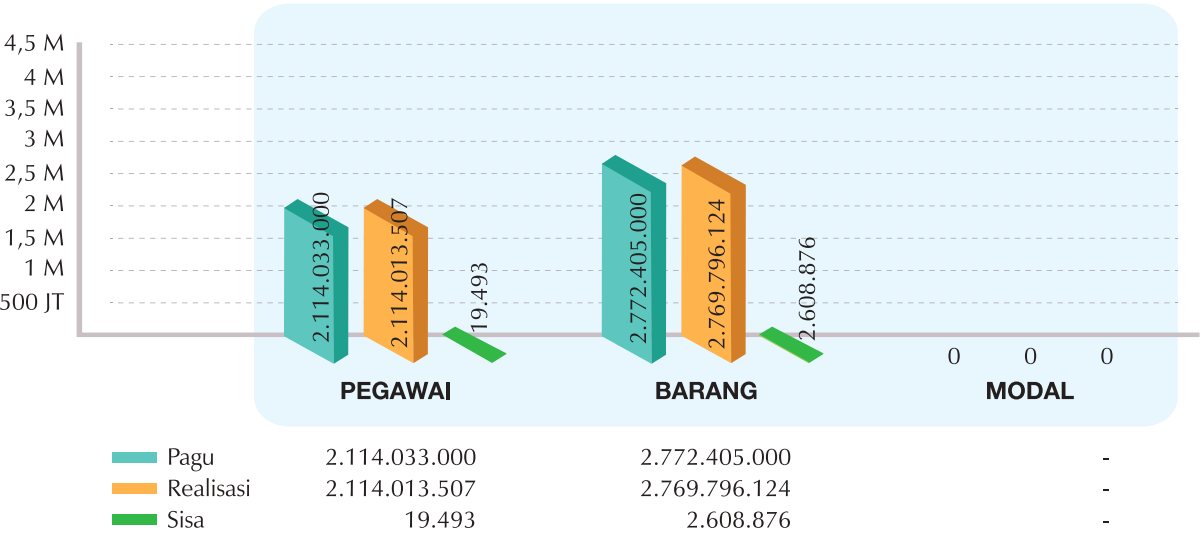
a) **Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025.**

Secara umum penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal terserap dengan baik. Perbandingan antara Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran TA. 2025 berdasarkan Jenis Belanja dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.70.
Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2025 DIPA Satker Lama (613420)

No.	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja			Total
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1	(A) RM	Pagu	2,114,033,000	1,987,105,000	0	4,101,138,000
		Realisasi	2,114,013,507	1,984,502,498	0	4,098,516,005
		%	(100%)	(99,87%)	0	(99,94%)
		Sisa	19,493	2,602,502	0	2,621,995
2	(D) PNPB	Pagu	0	785,300,000	0	785,300,000
		Realisasi	0	785,293,626	0	785,293,626
		%	0	(100%)	0	(100 %)
		Sisa	0	6,374	0	6,374
Grand Total		Pagu	2,114,033,000	2,772,405,000	0	4,886,438,000
		Realisasi	2,114,013,507	2,769,796,124	0	4,883,809,631
		Persentase (%)	(100%)	(99,91%)	0	(99,95%)
		Sisa	19,493	2,608,876	0	2,628,369

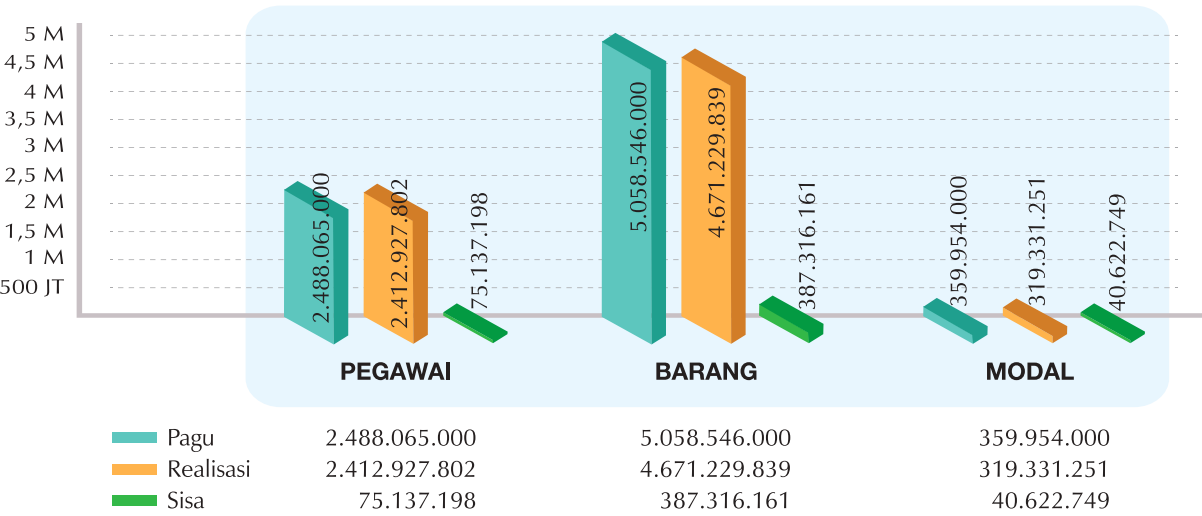
Grafik 3.18.
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TA 2025 DIPA **Satker Lama (613420)**



Tabel 3.71.
Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2025 DIPA **Satker Baru (694698)**

No.	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja			Total
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1	(A) RM	Pagu	2,488,065,000	1,973,106,000	0	4,461,171,000
		Realisasi	2,412,927,802	1,958,264,091	0	4,371,191,893
		%	(99,85%)	(99,25%)	0	(97,98%)
		Sisa	75,137,198	14,841,909	0	89,979,107
2	(D) PNPB	Pagu	0	3,085,440,000	359,954,000	3,445,394,000
		Realisasi	0	2,712,965,748	319,331,251	3,032,296,999
		%	0	(87,93%)	(88,71%)	(88,01%)
		Sisa	0	372,474,252	40,622,749	413,097,001
Grand Total		Pagu	2,488,065,000	5,058,546,000	359,954,000	7,906,565,000
		Realisasi	2,412,927,802	4,671,229,839	319,331,251	7,403,488,892
		Persentase (%)	(96,98%)	(92,34%)	(88,71%)	(93,64%)
		Sisa	75,137,198	387,316,161	40,622,749	503,076,108

Grafik 3.19.
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TA 2025 DIPA **Satker Baru (694698)**



b) **Realisasi Berdasarkan Sumber Dana Tahun Anggaran 2025**

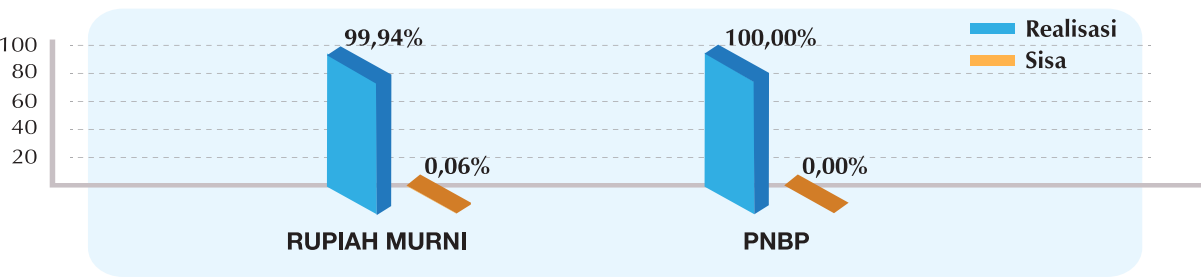
Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Lama (613420) Tahun 2025 adalah sebesar Rp 4,886,438,000 yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 4,101,138,000 dan PNPB sebesar Rp 785,300,000 Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3.72.
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana TA 2025 **Satker Lama (613420)**

Sumber Dana	Total Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran
	Rp	Rp	%	
Rupiah Murni	4,101,138,000	4,098,516,005	(99,94%)	2,621,995
PNBP	785,300,000	785,293,626	(100%)	6,374
TOTAL	4,886,438,000	4,883,809,631	(99,95%)	2,628,369

Bila disajikan dalam bentuk grafik Data Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana, maka akan nampak seperti berikut ini:

Grafik 3.20.
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana TA 2025 **Satker Lama (613420)**



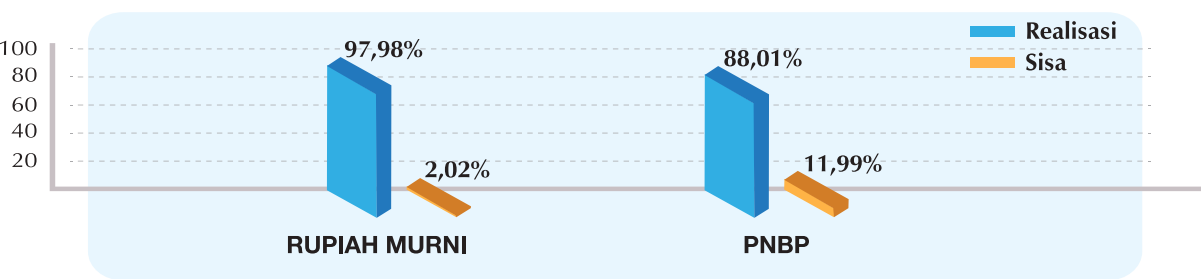
Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Baru (694698) Tahun 2025 adalah sebesar Rp 7,906,565,000 yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 4,461,171,000 dan PNPB sebesar Rp 3,445,394,000 Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Sumber Dana dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3.73.
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana TA 2025 **Satker Baru (694698)**

Sumber Dana	Total Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran
	Rp	Rp	%	
Rupiah Murni	4,461,171,000	4,371,191,893	(97,98%)	89,979,107
PNBP	3,445,394,000	3,032,296,999	(88,01%)	413,097,001
TOTAL	7,906,565,000	7,403,488,892	(93,64%)	503,076,108

Bila disajikan dalam bentuk grafik Data Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana, maka akan nampak seperti berikut ini:

Grafik 3.21.
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana TA 2025 **Satker Baru (694698)**



c) **Realisasi Belanja Berdasarkan Kegiatan**

Untuk Tahun Anggaran 2025 terbagi menjadi DIPA Lama (613420) dan DIPA Baru (694698). Dengan rincian realisasi belanja berdasarkan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.74.
Realisasi Belanja Per-Jenis Kegiatan TA 2025 Satker Lama (613420)

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)	Sisa
GE.6492	Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio	704,367,000	704,360,973	(100%)	6,027
WA.4489	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	4,182,071,000	4,179,448,658	(99.94%)	2,622,342
TOTAL PAGU		4,886,438,000	4,883,809,631	(99,95%)	2,628,369

Tabel 3.75.
Realisasi Belanja Per-Jenis Kegiatan TA 2025 Satker Baru (694698)

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)	Sisa
GE.6492	Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio	2,567,673,000	2,509,211,141	(97.72%)	58,461,859
WA.4489	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	5,338,892,000	4,894,277,751	(91.67%)	444,614,249
TOTAL PAGU		7,906,565,000	7,403,488,892	(93.64%)	503,076,108

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja Balmon Samarinda dengan 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain yang memiliki klasifikasi setara (Kelas I). Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Balmon Samarinda menunjukkan capaian kinerja tertinggi dibandingkan UPT lainnya, dengan nilai sebesar 85,76. Hal ini mencerminkan kinerja yang sangat baik serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio.

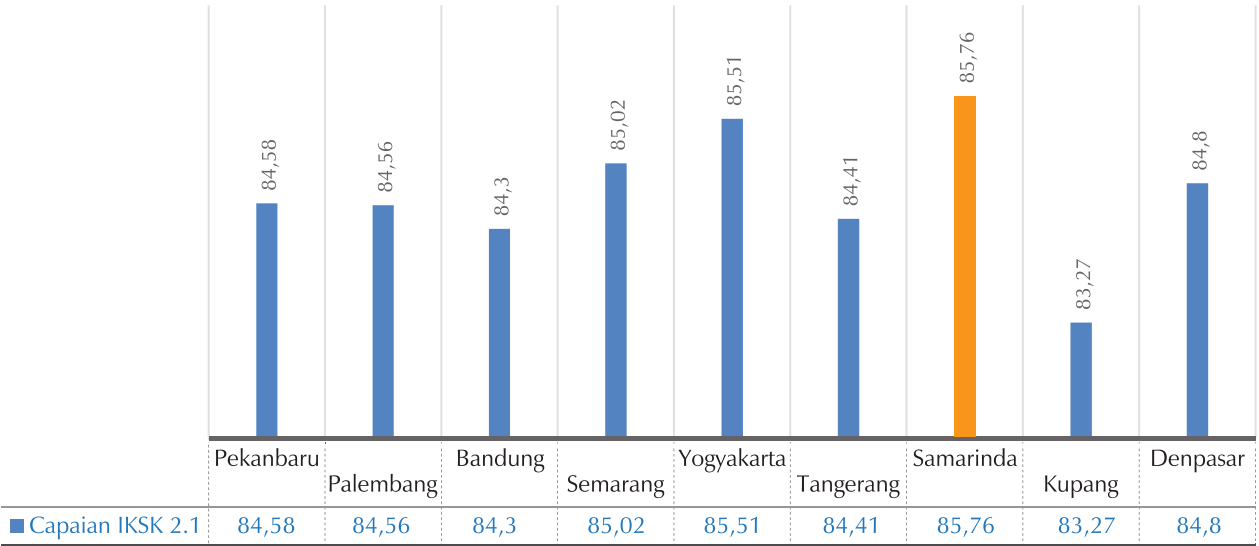
Capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan, pengendalian pelaksanaan anggaran yang cukup baik, serta koordinasi yang efektif antar tim kerja dalam mendukung pencapaian target kinerja. Selain itu, konsistensi dalam pelaksanaan monitoring, penertiban, serta peningkatan kualitas layanan turut berkontribusi terhadap capaian kinerja yang optimal.

Meskipun demikian, perbedaan capaian kinerja antar UPT tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik wilayah kerja, tingkat aktivitas

layanan, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, hasil benchmark ini tidak hanya menunjukkan posisi kinerja, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk menjaga konsistensi kinerja serta mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Hasil perbandingan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mempertahankan capaian yang telah diraih sekaligus meningkatkan kualitas kinerja pada aspek-aspek yang masih dapat dioptimalkan di masa mendatang.

Grafik 3.22.
Benchmark Capaian Kinerja IK-2.1 Tahun 2025



d. **Analisis Pencapaian Target**

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balmon Samarinda tahun 2025 sebesar 85,76 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran masih berada pada kategori baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan sebesar 86,95. Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, nilai tahun 2025 mengalami penurunan dari capaian 2021 sebesar 88,90, tahun 2022 sebesar 91,03, tahun 2023 sebesar 90,18, dan tahun 2024 sebesar 90,87.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor administratif dan teknis dalam masa transisi kelembagaan. Pada tahun 2025 terjadi perubahan nomenklatur kementerian yang berdampak pada peralihan DIPA dari satker lama ke satker baru. Kondisi ini menyebabkan adanya pemisahan pengelolaan anggaran antara DIPA lama dan DIPA baru, serta mempengaruhi kesinambungan perencanaan, pelaporan, dan pengukuran nilai kinerja anggaran.

Dari sisi formulasi perhitungan, NKA Balmon Samarinda tahun 2025 diperoleh dari komponen nilai kinerja perencanaan DIPA baru dan nilai



pelaksanaan anggaran yang dihitung berdasarkan rata-rata IKPA satker lama dan satker baru. Nilai kinerja perencanaan DIPA baru sebesar 75 memberikan kontribusi sebesar 37,50 terhadap nilai akhir. Sementara itu, nilai IKPA satker lama sebesar 98,58 dan IKPA satker baru sebesar 94,46 menghasilkan nilai pelaksanaan sebesar 48,26. Dengan demikian, total Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 menjadi 85,76.

Dari aspek pelaksanaan anggaran, kinerja Balmon Samarinda tetap menunjukkan hasil yang baik. Realisasi anggaran DIPA lama mencapai Rp4.883.809.631 dari pagu Rp4.886.438.000 atau sebesar 99,95%. Sementara itu, realisasi anggaran DIPA baru mencapai Rp7.403.488.892 dari pagu Rp7.906.565.000 atau sebesar 93,64%. Secara substansi, pelaksanaan program kerja tetap dapat berjalan dan mendukung capaian indikator kinerja organisasi.

Kinerja administratif juga menunjukkan capaian positif. Penyelesaian tagihan kontraktual pada satker lama sebanyak 8 SPM dan satker baru sebanyak 18 SPM seluruhnya diselesaikan tepat waktu dengan capaian 100%. Belanja kontraktual satker lama juga konsisten berada pada nilai 100, sedangkan satker baru tetap berada pada kategori baik meskipun mengalami penyesuaian pada triwulan akhir akibat dinamika pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tidak terdapat dispensasi SPM pada akhir tahun anggaran, yang menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian NKA tahun 2025. Pertama, adanya 12 kali revisi DIPA yang disebabkan oleh pemblokiran/efisiensi anggaran, cut off DIPA, pergeseran belanja pegawai dan belanja barang, relaksasi anggaran, serta penyesuaian halaman III DIPA. Kedua, terdapat deviasi rencana penarikan dana, khususnya pada satker baru, karena proses pelaksanaan anggaran baru berjalan setelah terbentuknya DIPA baru. Ketiga, terdapat sisa anggaran pada DIPA baru, terutama pada sumber dana PNBPN, yang dipengaruhi oleh penyesuaian jadwal kegiatan dan keterbatasan waktu pelaksanaan setelah masa transisi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Balmon Samarinda melakukan penyesuaian jadwal kegiatan, pemutakhiran RPD, pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas, serta koordinasi intensif dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, KPPN, dan unit terkait lainnya. Upaya tersebut berdampak pada tetap terlaksananya kegiatan utama organisasi, terjaganya akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta terkendalinya pelaksanaan anggaran di tengah proses transisi satker.

Meskipun target belum tercapai secara penuh, hasil benchmark dengan 8 UPT Kelas I lainnya menunjukkan bahwa Balmon Samarinda memperoleh nilai tertinggi dengan capaian 85,76. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Balmon Samarinda tetap kompetitif dan relatif lebih baik dibandingkan UPT pembanding, khususnya dalam menghadapi kondisi transisi nomenklatur dan pengelolaan dua DIPA dalam satu tahun anggaran.

e. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi pengelolaan kinerja anggaran tahun sebelumnya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda telah melakukan beberapa langkah perbaikan pada tahun 2025. Pada tahun 2024, komponen penilaian IKPA telah mencakup aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan anggaran, antara lain melalui indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Evaluasi terhadap komponen-komponen tersebut menjadi dasar perbaikan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025.

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain berupa peningkatan pemantauan terhadap realisasi anggaran, penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD), percepatan penyelesaian tagihan, pengendalian revisi DIPA, serta penguatan koordinasi internal antara pengelola keuangan dan tim teknis pelaksana kegiatan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian output.

Dalam pelaksanaannya, tahun 2025 mengalami dinamika yang cukup besar akibat perubahan nomenklatur kementerian dan peralihan pengelolaan DIPA dari satker lama ke satker baru. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian kembali terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Namun demikian, tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya tetap dilaksanakan melalui pemutakhiran RPD, penataan jadwal kegiatan, dan pengendalian administrasi keuangan agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan tertib dan akuntabel.

Hasil tindak lanjut tersebut terlihat dari beberapa capaian positif, antara lain penyelesaian tagihan kontraktual yang seluruhnya diselesaikan tepat waktu, baik pada satker lama maupun satker baru, serta tidak adanya pengajuan dispensasi SPM pada akhir tahun anggaran. Selain itu, realisasi anggaran tetap berada pada tingkat yang baik meskipun terdapat penyesuaian akibat perubahan DIPA dan kebijakan efisiensi anggaran.

Ke depan, tindak lanjut atas hasil evaluasi ini akan terus diperkuat melalui monitoring komponen IKPA dan NKA secara berkala, khususnya pada aspek perencanaan penarikan dana, pengendalian revisi DIPA, capaian output, serta ketepatan waktu penyelesaian tagihan. Dengan demikian, rekomendasi perbaikan tahun sebelumnya tidak hanya menjadi catatan evaluasi, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

f. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Dalam rangka meningkatkan capaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun berikutnya, diperlukan beberapa langkah perbaikan yang berfokus pada penguatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelaporan.

Pertama, perlu dilakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang lebih realistis dan selaras dengan jadwal pelaksanaan kegiatan teknis. Hal ini penting untuk meminimalkan deviasi Halaman III DIPA serta menjaga kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Kedua, perlu dilakukan pengendalian revisi DIPA secara lebih selektif. Revisi tetap dapat dilakukan apabila diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, namun setiap revisi perlu dianalisis dampaknya terhadap nilai IKPA, capaian output, dan kualitas perencanaan anggaran.

Ketiga, perlu diperkuat monitoring internal secara bulanan terhadap komponen-komponen penilaian IKPA dan NKA. Monitoring tersebut mencakup penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, capaian output, revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, dan potensi dispensasi SPM.

Keempat, koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, KPPN, dan unit pembina anggaran perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi perubahan kebijakan, penyesuaian nomenklatur, efisiensi anggaran, atau perubahan struktur DIPA.

Kelima, pelaksanaan kegiatan perlu semakin diarahkan berdasarkan skala prioritas, sehingga kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama dapat dilaksanakan lebih awal dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Dengan langkah tersebut, diharapkan capaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun berikutnya dapat meningkat dan memenuhi target yang ditetapkan.

g. Efisiensi

Analisis efisiensi anggaran tahun 2025 perlu dimaknai secara proporsional. Sisa anggaran pada akhir tahun tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai efisiensi murni, karena sebagian dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, perubahan nomenklatur, peralihan DIPA, serta penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, Balmon Samarinda tetap melakukan berbagai strategi efisiensi operasional agar pelaksanaan 13 indikator kinerja pada Sasaran Program I tetap tercapai.

Pada beberapa indikator teknis, efisiensi dilakukan melalui pengaturan tim yang lebih proporsional, penggabungan beberapa titik kegiatan dalam satu perjalanan dinas, pemanfaatan perangkat dan aplikasi digital, serta penyesuaian jadwal kegiatan agar tetap

efektif. Misalnya, pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio, realisasi anggaran sebesar Rp452.102.032,60 dari pagu Rp453.890.450,00, dengan efisiensi Rp1.788.417,40 atau 0,39%, disertai pengaturan jadwal dan lokasi pemeriksaan agar beberapa titik dapat diselesaikan dalam satu rangkaian kegiatan.

Strategi serupa juga dilakukan pada kegiatan penanganan piutang BHP frekuensi radio. Realisasi anggaran mencapai 97,21% dari pagu yang tersedia, dengan efisiensi sebesar 2,79%. Efisiensi tersebut didukung oleh pemanfaatan sistem pembayaran berbasis host to host (H2H), kanal komunikasi digital, dan monitoring piutang berbasis sistem sehingga proses penagihan dan pemantauan dapat dilakukan lebih cepat dan tertib.

Pada indikator sosialisasi pelayanan publik, efisiensi dilakukan melalui metode hybrid yang memadukan pelaksanaan luring dan daring, sehingga kegiatan dapat menjangkau 144 peserta tanpa memerlukan tambahan biaya yang signifikan. Realisasi anggaran mencapai 99,997%, dengan efisiensi sebesar 0,003%, dan kegiatan tetap mampu memenuhi target sosialisasi pelayanan publik.

Efisiensi juga tampak pada indikator pengukuran kualitas layanan. Sebagai indikator baru tahun 2025, kegiatan ini tetap dapat mencapai 125% melalui pelaksanaan pengukuran di 10 kabupaten/kota dari target 8 kabupaten/kota. Efisiensi diwujudkan melalui optimalisasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia, penggunaan perangkat probe dan aplikasi pendukung, serta perencanaan rute pengukuran yang lebih terarah.

Dampak dari strategi efisiensi tersebut terhadap kinerja dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian Sasaran Program I, di mana seluruh indikator kinerja tetap mencapai atau melampaui target. Beberapa capaian yang menonjol antara lain Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebesar 125%, Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital sebesar 133,33%, Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan sebesar 125%, Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio sebesar 150%, Survei Kepuasan



Pelayanan Publik sebesar 122,19%, dan Survei Integritas Pelayanan Publik sebesar 107,22%.

Dengan demikian, efisiensi anggaran dan perubahan DIPA pada tahun 2025 tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian output utama organisasi. Dampak yang muncul lebih banyak berupa kebutuhan penyesuaian jadwal, pengaturan ulang prioritas kegiatan, serta peningkatan beban koordinasi administrasi dan teknis. Namun,

melalui optimalisasi SDM, penggabungan kegiatan, pemanfaatan sistem digital, dan koordinasi lintas tim, pelaksanaan kegiatan utama tetap dapat berjalan dan target kinerja tetap tercapai.

Selain itu, kinerja administratif juga tetap terjaga. Penyelesaian tagihan kontraktual pada satker lama sebanyak 8 SPM dan pada satker baru sebanyak 18 SPM seluruhnya diselesaikan tepat waktu dengan capaian 100%. Balmon Samarinda juga tidak mengajukan dispensasi SPM pada akhir tahun anggaran, yang menunjukkan bahwa proses administrasi keuangan tetap dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Pemanfaatan aplikasi keuangan dan pelaporan seperti SAKTI, OM-SPAN, dan e-Monev SMART juga mendukung efisiensi proses kerja. Penggunaan sistem tersebut mempercepat pemantauan realisasi anggaran, pengendalian capaian output, serta penyusunan bahan evaluasi kinerja anggaran. Dengan demikian, efisiensi pada indikator ini tidak hanya dilihat dari sisa anggaran, tetapi juga dari efektivitas proses kerja, ketepatan administrasi, dan kemampuan organisasi dalam menjaga capaian kinerja di tengah dinamika tahun anggaran 2025.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran, Balmon Samarinda mengimplementasikan budaya kerja BerAKHLAK sebagai dasar dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

1. **Berorientasi Pelayanan:** diterapkan melalui pengelolaan anggaran yang diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap alokasi dan realisasi anggaran diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio, layanan publik, serta operasional organisasi.
2. **Akuntabel:** diwujudkan melalui pelaksanaan anggaran yang tertib administrasi, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tercermin dari penyelesaian tagihan kontraktual yang tepat waktu, pengelolaan realisasi anggaran sesuai

ketentuan, serta pelaporan melalui sistem yang telah ditetapkan.

3. **Kompeten:** ditunjukkan melalui kemampuan pengelola keuangan, PPK, bendahara, dan tim teknis dalam menyesuaikan diri dengan regulasi pengelolaan anggaran, mekanisme revisi DIPA, penilaian IKPA, serta penggunaan aplikasi keuangan dan pelaporan. Kompetensi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran selama masa transisi satker.
4. **Harmonis:** tercermin dalam koordinasi yang baik antara Subbagian Umum, tim kerja teknis, pengelola keuangan, pimpinan, serta unit terkait lainnya. Hubungan kerja yang baik mendukung kelancaran penyesuaian anggaran dan penyelesaian administrasi keuangan.
5. **Loyal:** diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan efisiensi anggaran, perubahan nomenklatur, dan penyesuaian struktur DIPA. Balmon Samarinda tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta menjaga kualitas tata kelola anggaran sebagai bagian dari tanggung jawab kepada negara.
6. **Adaptif:** ditunjukkan melalui kemampuan organisasi dalam menyesuaikan proses kerja terhadap perubahan nomenklatur, peralihan DIPA, perubahan kode satker, revisi anggaran, dan pemutakhiran RPD. Adaptasi tersebut memungkinkan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan meskipun terdapat dinamika pada tahun anggaran 2025.
7. **Kolaboratif:** diwujudkan melalui kerja sama antara pengelola keuangan, tim teknis, pimpinan, KPPN, Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, dan unit pembina terkait. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga pelaksanaan anggaran tetap efektif, tertib, dan akuntabel.

Dengan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK tersebut, pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran tidak hanya mencerminkan capaian administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen Balmon Samarinda dalam membangun tata kelola birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

2. INDIKATOR KINERJA

NILAI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)



Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda sampai dengan bulan Desember adalah **100%**.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada bagan diatas ini kemudian diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan dalam rangka capaian indikator kinerja ini.

Berikut adalah formulasi perhitungan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda:

Tabel 3.76.
Formulasi Perhitungan Nilai UAKPA Tahun 2025

Bulan	Target	Penjelasan Target
Januari	5%	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2024. 2. Penyusunan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran TA 2024. 3. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan.
Februari	15%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan. 2. Penyusunan keuangan TA 2024.
Maret	5%	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan
April	5%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan. 2. Menerima dan melaksanakan Hasil Pelaksanaan Tripartit (Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan dan BPK) sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
Mei	15%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan. 2. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2024 Audited. 3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d. April TA 2025
Juni	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2025
Juli	15%	1. Proses penilaian kualitas pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang dilakukan oleh Biro Keuangan. 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025. 3. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2024
Agustus	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2025.
September	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2025.
Oktober	15%	1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tingkat Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025. 2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2025.
November	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2025.
Desember	5%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode November 2025.

B. KINERJA LAINNYA

1. PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN UPT

Pada tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda melaksanakan dan mengikuti beberapa kegiatan penatausahaan kepegawaian baik yang dilaksanakan secara regular seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penghargaan Satyalencana Karya Satya dan kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh internal maupun dari external Kementerian Komunikasi dan Informatika.

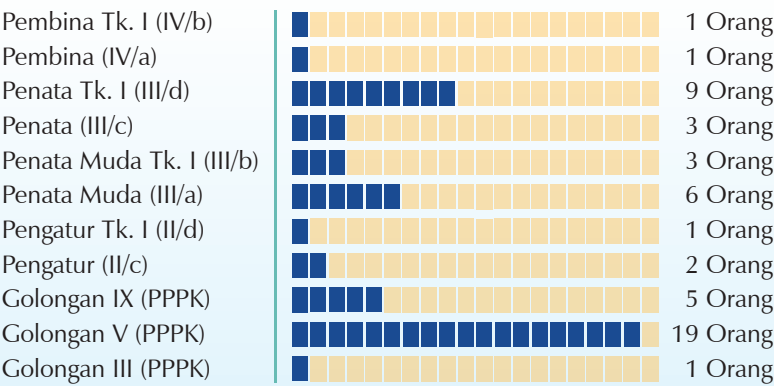
Bagan 3.7.
Peta Jabatan Balai Monitor SFR Kelas I Samarinda Tahun 2025



a) Sumber Daya Manusia, Pengembangan Jenjang Karir Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda hingga akhir tahun 2025 berjumlah 52 orang, di antaranya 51 orang ASN (26 PNS dan 25 PPPK), dan 1 orang PJLP

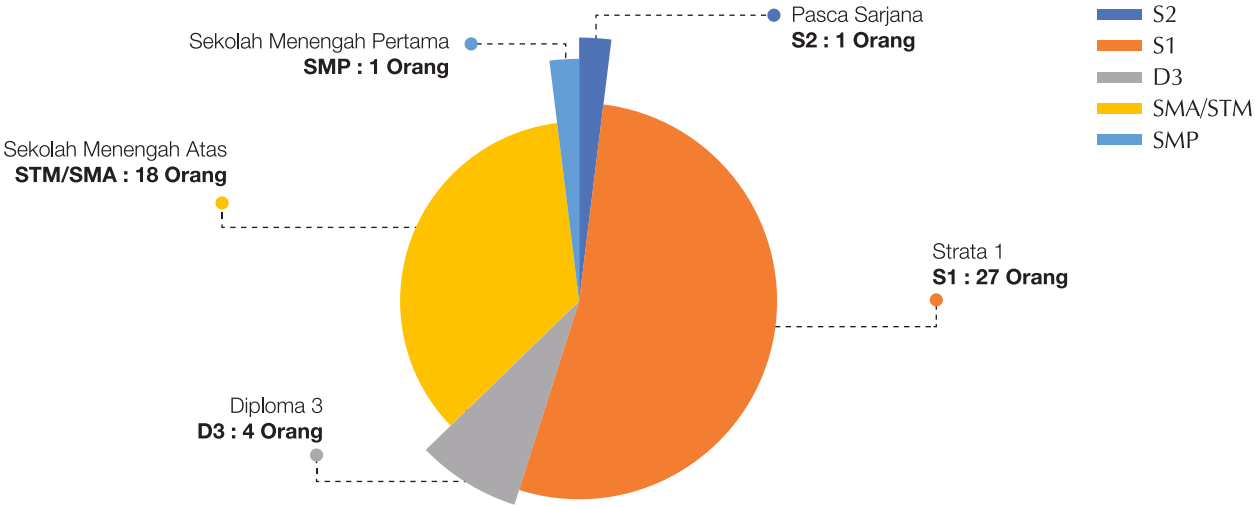
Bagan 3.8.
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2025



Bagan 3.9.
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



Bagan 3.10.
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan



b) Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat PNS adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara. Tahun 2025 ada 1 (satu) pegawai Balai Monitor SFR Kelas I Samarinda yang mendapatkan Kenaikan Pangkat Reguler. Berikut ini tabel jumlah ASN yang mendapatkan Kenaikan Pangkat Reguler TA. 2025.

Tabel 3.77.
Jumlah PNS Yang Mendapatkan Kenaikan Pangkat TA. 2025

No.	Jumlah Pegawai	Pangkat Lama	Pangkat Baru	Jenis KP
1	1 Orang	Pengatur (II/d)	Penata Muda (III/a)	REGULER
2	3 Orang	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	REGULER
3	1 Orang	Pengatur (II/d)	Penata Muda (III/a)	FUNGSIONAL
4	1 Orang	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata (III/c)	FUNGSIONAL

c) Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Kenaikan Gaji Berkala adalah layanan kepegawaian terkait kenaikan Gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja Golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yakni setiap (dua) tahun sekali dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah tabel jumlah ASN yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.78.
Data Kenaikan Gaji Berkala ASN Selama Tahun 2025

No.	Periode	Jumlah Pegawai
1	Februari 2025	5 Orang
2	Maret 2025	3 Orang
3	April 2025	1 Orang
4	Oktober 2025	2 Orang
5	Desember 2025	2 Orang

d) Mutasi Pegawai

Pada tahun 2025 tidak ada pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda yang mutasi.

e) Pensiun (Purna Bhakti)

Pada tahun 2025 tidak pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda yang memasuki masa Purna Bhakti.

f) Penghargaan Satyalancana Karya Satya

Pada tahun 2025 ada 3 (tiga) pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya

Tabel 3.79.
Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Masa Kerja
1	Widhy Baskoro	Kepala Subbagian Umum	20 Tahun
2	Bhayu Wisnu Wardhana	APK APBN Ahi Muda	20 Tahun
3	Sri Sukisno	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	20 Tahun

g) Diklat/Kursus/Bimtek/Workshop/Webinar Dalam Negeri

Data pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda yang mengikuti diklat/kursus/bimtek/workshop/webinar Online/Offline pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut

Tabel 3.80.
Data Pegawai Yang Mengikuti Diklat/Bimtek Teknis

No	Nama Pelatihan	Diikuti Oleh	Penyelenggara	Offline/Online	Tanggal Pelatihan
1	Ancaman Pembobolan Akun Pribadi dan Pencegahannya	1 Orang Pegawai	Badan Pengembangan SDM Komdigi	Online	13 Januari 2025
2	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pelayanan Infrastruktur Digital	1 Orang Pegawai	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Online	31 Januari s/d 13 Maret 2025
3	Corporate University Open Class (KCOC) Pengenalan Coretax WP Instansi Pemerintah	1 Orang Pegawai	KPP Samarinda	Online	22 Januari 2025
4	E-Learning Microsoft Excel Level Basic Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	6 Orang Pegawai	Badan Pengembangan SDM Komdigi	Online	• 15 Januari s/d 12 Februari 2025 • 13 Juni 2025
5	E-Learning Microsoft Power Point Level Basic Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	3 Orang Pegawai	Badan Pengembangan SDM Komdigi	Online	15 Januari s/d 12 Februari 2025
6	Menerapkan rekayasa prompt dengan Azure OpenAI Service	1 Orang Pegawai	Badan Pengembangan SDM Komdigi	Online	23 Januari 2025
7	Pengenalan Coretax bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah	1 Orang Pegawai	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak	Online	22 Januari 2025
8	Prinsip Prinsip Video Content Creator	3 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	• 21 Januari 2025 • 09 Juli 2025 • 16 Juli 2025
9	Coretax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan	1 Orang Pegawai	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak	Online	05 Februari 2025
10	Dasar-Dasar Implementasi Kecerdasan Artifisial	4 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	• 14 Februari 2025 • 05 s/d 07 Mei 2025 • 27 Juni 2025 • 11 Juli 2025
11	E-learning Microsoft Excel Level Intermediate Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	8 Orang Pegawai	Badan Pengembangan SDM Komdigi	Online	20 Februari s/d 13 Maret 2025
12	E-Learning Microsoft Power Point Level Intermediate Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	2 Orang Pegawai	Badan Pengembangan SDM Komdigi	Online	20 Februari s/d 13 Maret 2025
13	ICT Infrastructure Training	1 Orang Pegawai	Secretariat of Directorate General of Digital Infrastucture & International Telecommunication Union	Offline	17 s/d 18 Februari 2025
14	Pengantar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi	Online	• 03 Februari 2025 • 01 Maret s/d 15 Maret 2025
15	Sosialisasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui e-LHKPN	2 Orang Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Online	24 Februari 2025

No	Nama Pelatihan	Diikuti Oleh	Penyelenggara	Offline/ Online	Tanggal Pelatihan
16	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan Menuju Tata Kelola yang Transparansi dan Akuntabel	4 Orang Pegawai	Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital	Online	17 Maret 2025
17	E-Learning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Level 4 Angkatan III	1 Orang Pegawai	Badan Penddikan dan Pelatihan Keuangan	Online	15 Maret s/d 14 April 2025
18	Implementasi E-Katalog Versi 6 Melalui Metode Mini Kompetisi dan Negosiasi	1 Orang Pegawai	Biro Umum	Online	13 Maret 2025
19	Seni Public Speaking Untuk Pemimpin Muda Berkarakter	3 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	• 01 s/d 15 Maret 2025 • 01 s/d 30 April 2025 • 16 Mei 2025
20	Bimbingan Teknis Penyeragaman Penetapan Denda Terhadap Pelanggaran SFR dan APT	1 Orang Pegawai	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Online	29 April s/d 02 Mei 2025
21	Branding Institusi Untuk Instansi Pemerintah	2 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	• 24 April 2025 • 07 Juli 2025
22	Komunikasi Krisis Untuk ASN	2 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	• 08 s/d 28 April 2025 • 18 Juni 2025
23	Komunikasi Strategis Untuk ASN	3 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	• 08 s/d 28 April 2025 • 02 Juli 2025 • 07 Juli 2025
24	Social Media Management untuk Brand Digital	1 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	24 April 2025
25	Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Triwulan I - 2025	1 Orang Pegawai	Kepala Subdit Bimbingan Akuntansi dan Bendahara Umum Negara	Online	16 Mei 2025
26	E-learning Microsoft Excel Level Advance Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025	2 Orang Pegawai	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Online	27 Mei s/d 26 Juni 2025
27	Image Recognition dan Speech Recognition Mengubah Interaksi Kita dengan Teknologi	2 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	• 01 s/d 25 Mei 2025 • 16 Juli 2025
28	Orientasi Lanjutan bagi CPNS dan PPPK Tahap I Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Materi Kepegawaian, Organisasi, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi, Keamanan Informasi, dan Tata Naskah Dinas	13 Orang Pegawai	Biro SDM dan Organisasi	Online	14 s/d 15 Mei 2025
29	Pelatihan Cara Mudah Menggunakan Aplikasi Perkantoran Online	3 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	• 09 Mei 2025 • 17 Juni 2025 • 18 Juni 2025
30	Pelatihan Optimasi Instagram dengan Insight	2 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	• 09 Mei 2025 • 16 Juli 2025
31	Pemanfaatan AI di Pemerintahan	2 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Aparatur KOMDIGI	Online	14 s/d 17 Mei 2025
32	Pengantar Mindset Digital 1	2 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	• 05 s/d 07 Mei 2025 • 18 Juni 2025
33	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai pada CPNS dan PPPK Tahun 2025	13 Orang Pegawai	Biro SDM dan Organisasi	Online	20 s/d 23 Mei 2025
34	AI Engineer For Milenial	1 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	01 s/d 12 Juni 2025
35	Cara Berpikir Logis untuk Mengatasi Masalah (Jenjang SMA)	1 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	27 Juni 2025
36	Pengenalan Kolaborasi Menggunakan Tools Gratis Penyimpanan berbasis Cloud	2 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	• 18 Juni 2025 • 16 Juli 2025

No	Nama Pelatihan	Diikuti Oleh	Penyelenggara	Offline/ Online	Tanggal Pelatihan
37	Sosialisasi Disiplin Pegawai Kepada CPNS Dan PPPK T.A 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital	11 Orang Pegawai	Biro SDM dan Organisasi	Online	12 Juni 2025
38	Sosialisasi Karir Jabatan Fungsional Kepada CPNS T.A 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital	6 Orang Pegawai	Biro SDM dan Organisasi	Online	13 Juni 2025
39	Sosialisasi Pedoman Pengembangan Kompetensi Nonklasikal	27 Orang Pegawai	Biro SDM dan Organisasi	Online	13 Juni 2025
40	Tips melindungi diri dari ancaman Phising dan Malware di Era Digital	1 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	18 Juni 2025
41	Antena dan Propagasi I	1 Orang Pegawai	Balai Besai Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)	Online	29 Juli 2025
42	Bimbingan Teknis Penyusunan Policy Brief	1 Orang Pegawai	Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Online	17 s/d 23 Juli 2025
43	Ethical Hacker For Dummies	1 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	16 Juli 2025
44	Implementasi Metode e-purchasing melalui katalog elektronik versi 6	1 Orang Pegawai	Biro Umum	Online	31 Juli 2025
45	Introduction To Cloud Computing	1 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	16 Juli 2025
46	Introduction to Cyber Security and Career Awareness	1 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	08 Juli 2025
47	Memahami Perbedaan Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi	1 Orang Pegawai	Badan Pengembangan SDM Komdigi	Online	07 Juli 2025
48	Membangun Strategi untuk Kesuksesan Bisnis Online Micro Skill	1 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	07 Juli 2025
49	Pelatihan Implementasi AI Level Intermediate	2 Orang Pegawai	Biro SDM dan Organisasi Komdigi	Online	24 s/d 25 Juli 2025
50	Pengenalan Produk Digital dan Desain Grafis Bagi Angkatan Kerja Muda	1 Orang Pegawai	Pusat Pengembangan Literasi Digital	Online	08 Juli 2025
51	Peran ASN Dalam Membangun Citra Lembaga Melalui Konten Kreatif	1 Orang Pegawai	Badan Pengembangan SDM Komdigi	Online	07 Juli 2025
52	Sistem Telekomunikasi (Incl Device Sistem Telekomunikasi dan Jaringan Telekomunikasi) II	1 Orang Pegawai	Balai Besai Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)	Online	14 Juli 2025
53	Workshop Pemeliharaan Perangkat SMFR	3 Orang Pegawai	Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Komdigi	Online	30 Juli 2025
54	Komunikasi Optik dan Nirkabel	1 Orang Pegawai	Balai Besai Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)	Online	12 Agustus 2025
55	Pelatihan Teknis TV Digital Tahun 2025	1 Orang Pegawai	Setditjen Infrastruktur Digital	Online	15 s/d 29 Agustus 2025
56	Penerapan Two-Factor Athentication (2FA) Portal Internet dan Urgensi Penerapan untuk Peningkatan Kemanan di Komdigi	1 Orang Pegawai	Ketua KOMDIGI-CSIRT	Online	14 Agustus 2025
57	Refresment PPNS	1 Orang Pegawai	Setditjen Infrastruktur Digital	Offline	11 s/d 15 Agustus 2025
58	Seminar Pengadaan Barang/Jasa Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2025	1 Orang Pegawai	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Online	05 s/d 07 Agustus 2025
59	Sosialisasi Kepatuhan Internal	10 Orang Pegawai	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Online	08 Agustus 2025
60	Sosialisasi Konflik Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Insfrastruktur Digital TA 2025	12 Orang Pegawai	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Online	23 September 2025

No	Nama Pelatihan	Diikuti Oleh	Penyelenggara	Offline/ Online	Tanggal Pelatihan
61	PELATIHAN SMART & EFFECTIVE LEADERSHIP Seni Memimpin dengan Cerdas dan Berdampak	1 Orang Pegawai	Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	Offline	14 s/d 17 Oktober 2025
62	Sosialisasi ASN Digital BKN untuk PPPK Tahap II dan PPPK Paruh Waktu	17 Orang Pegawai	Kementerian Komunikasi dan Digital	Online	15 Oktober 2025

2. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Barang Milik Negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Pusat harus melakukan pengelolaan atas BMN agar dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. BMN adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik dan benar.

Berikut adalah Neraca Barang Milik Negara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Samarinda Posisi Per tanggal 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.81.
Neraca BMN Balmon SFR Kelas I Samarinda Tahun 2025

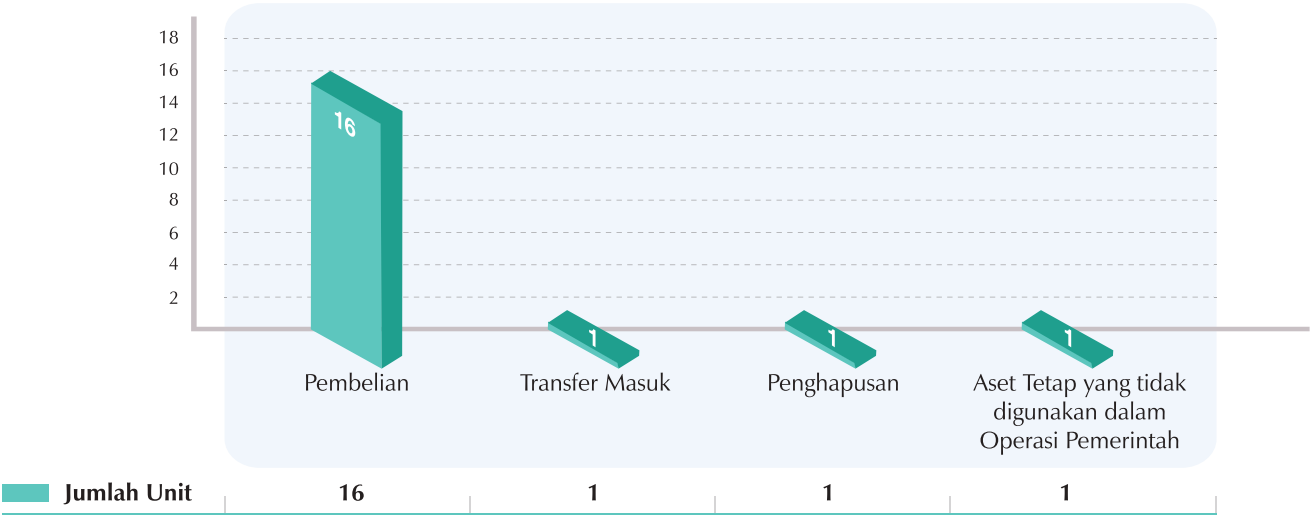
AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
117111	Barang Konsumsi	42,213,654,
131111	Tanah	117,448,619,000,
132111	Peralatan dan Mesin	45,939,561,916,
133111	Gedung dan Bangunan	15,093,982,776
134111	Jalan dan Jembatan	892.687.000,
134112	Irigasi	105,971,000
134113	Jaringan	140,919,850
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(36,530,880,351)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5,009,837,761)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(53,519,696)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(32,639,693)
162151	Software	3,607,829,255
162161	Lisensi	30.000.000,
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(2,791,339,465)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(30.000.000,)
JUMLAH		137,960,880,485

Selama Tahun 2025 terdapat pencatatan transaksi Aset berupa Pembelian, Transfer masuk dari Kantor Pusat, Penghapusan dan pencatatan aset tetap yang tidak digunakan pemerintah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.82.
Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan Jenis Transaksi Periode s.d 31 Desember 2025

No.	Jenis Transaksi	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp.)	Nilai Lelang (Rp.)
1	Pembelian	16	319,331,251	-
2	Transfer Masuk	1	2,746,260,000	-
3	Penghapusan	1	-	197,740,500
4	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	1	197,740,500	-

Grafik 3.23.
Jumlah Unit Transaksi BMN Berdasarkan Transaksi



3. PENGELOLAAN KEARSIPAN

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, maupun perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas organisasi, seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital wajib melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis sebagai pedoman dalam penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan perlu dilakukan secara tertib, sistematis, dan sesuai standar. Pada tahun 2025, Balmon Samarinda tidak termasuk dalam unit yang menjadi objek audit atau pengawasan kearsipan. Meskipun demikian, Unit Kearsipan II Balmon Samarinda tetap melaksanakan penatausahaan naskah dinas dan pengelolaan arsip aktif sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola administrasi yang baik.

Sepanjang tahun 2025, Unit Kearsipan II Balmon Samarinda telah mengelola naskah dinas yang terdiri atas surat masuk, surat keluar, Surat Keputusan Kepala Balai, dan surat tugas. Seluruh naskah dinas yang tercipta telah dicatat, diklasifikasikan, dan disimpan baik dalam bentuk sistem maupun fisik sesuai kebutuhan organisasi. Pengelolaan tersebut dilakukan untuk memastikan

keamanan arsip, keteraturan administrasi, serta kemudahan dalam proses temu balik informasi.

Adapun rekapitulasi jumlah naskah dinas yang dikelola selama periode Januari sampai dengan Desember 2025 disajikan pada tabel dan grafik berikut. Data tersebut menggambarkan volume penciptaan dan pengelolaan arsip aktif pada Unit Kearsipan II Balmon Samarinda selama tahun berjalan.



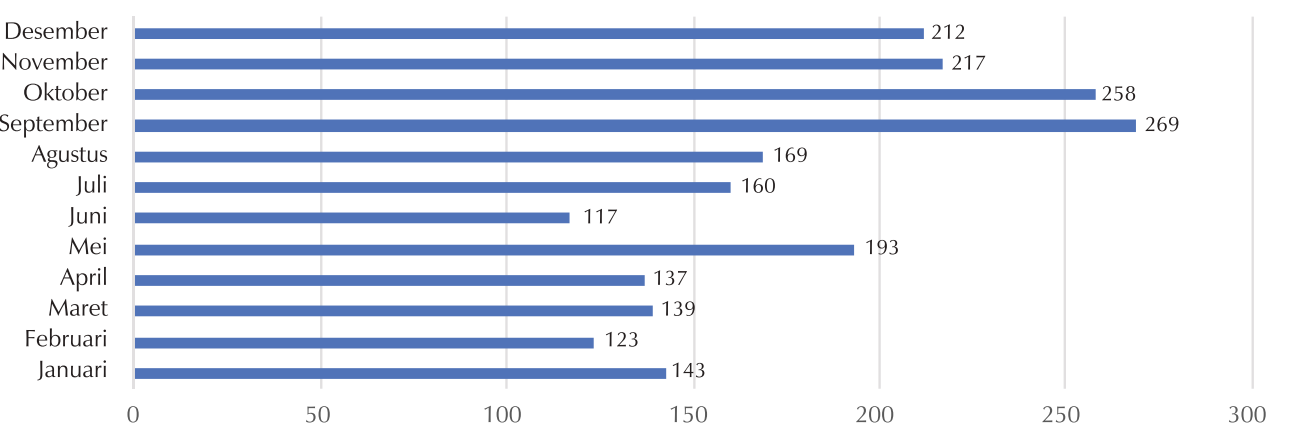
Tabel 3.83.
Rekapitulasi Naskah Dinas Tahun 2025

Jenis Naskah Dinas	Jumlah	Keterangan
Surat Masuk	908	Tersimpan dalam sistem dan fisik
Surat Keluar	882	Tersimpan dalam sistem dan fisik
Surat Keputusan (SK) Kepala Balai	91	Tersimpan dalam sistem dan fisik
Surat Tugas	256	Tersimpan dalam sistem dan fisik
Jumlah Naskah Dinas	2.137	Tersimpan dalam sistem dan fisik

Tabel 3.84.
Rekapitulasi Bulanan Naskah Dinas Tahun 2025

Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar	SK Kepala Balai	Surat Tugas	Total
Januari	55	64	18	6	143
Februari	50	60	3	10	123
Maret	71	50	3	15	139
April	61	58	2	16	137
Mei	77	89	11	16	193
Juni	62	41	3	11	117
Juli	78	52	11	19	160
Agustus	67	72	7	23	169
September	95	117	20	37	269
Oktober	105	105	9	39	258
November	93	82	3	39	217
Desember	94	92	1	25	212
Jumlah	908	882	91	256	2137

Grafik. 3.24.
Jumlah Bulanan Naskah Dinas Tahun 2025



Seluruh naskah dinas tersebut dikategorikan sebagai arsip aktif pada Unit Kearsipan II dan dikelola menggunakan sarana penyimpanan yang memadai. Dengan pengelolaan yang tertib dan terdokumentasi, arsip dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, penyediaan informasi, serta akuntabilitas administrasi Balmon Samarinda.

4. DIGI WAVE COMPETITIONS 2025

Digi Wave Competitions tahun 2025 dengan tema “Infrastruktur Digital Satukan Negeri”, adalah ajang kompetisi internal yang diselenggarakan oleh Direktorat Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Acara ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas kinerja pegawai DJID Komdigi dan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk menyampaikan karya berupa foto dan video. Balmon Samarinda turut berpartisipasi dan berhasil meraih penghargaan di tiga kategori, yaitu:

- **Juara 1** DJID Video Competition – “Tana’ Tivik (Sinyal Aman, Hidup Nyaman)”. Tujuan kompetisi ini adalah meningkatkan kreativitas pegawai DJID dalam mem-branding institusinya melalui karya video. Tema yang diusung kali ini adalah, “Infradigi Satukan Negeri”, video menceritakan kehidupan masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pemerataan infrastruktur digital dan kinerja unit kerja DJID dalam memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat. Penilaian juri dengan bobot 90% mencakup: ide/kreativitas, teknis dan konten video, bersifat informatif, dan teknik bercerita. Penilaian melalui pemungutan suara di media sosial dengan bobot 10%.
- **Juara 3** DJID Choice Awards – Administrasi Terbaik Merupakan salah satu penghargaan untuk mengapresiasi UPT yang telah melakukan kinerja terbaik di bidang administrasi. Akumulasi nilai terdiri dari: Pengelolaan BMN, Penciptaan Arsip, Penilaian IKPA, Penilaian NKA, Capaian Janji Kinerja, dan Penilaian Kualitas Dokumen Penganggaran.
- **Juara 3** DJID Choice Awards – Pengguna Aplikasi Konsultasi dan Pengaduan Teraktif Merupakan salah satu penghargaan untuk mengapresiasi UPT yang telah melakukan kinerja terbaik pada penggunaan aplikasi konsultasi dan pengaduan interaktif. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil Jumlah Tiket yang diterbitkan dan diproses sampai status “Selesai” oleh PIC UPT pada aplikasi e-Centric untuk melaporkan konsultasi dan pengaduan pada UPT masing-masing.



(Link Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=KoXz5-2WZRg>)



C. DAMPAK 5 TAHUN TERAKHIR (2021-2025)

Periode tahun 2021–2025 merupakan fase penting dalam penguatan tata kelola spektrum frekuensi radio, pengendalian perangkat telekomunikasi, peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, serta penguatan akuntabilitas kelembagaan di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda. Dalam kurun waktu tersebut, Balmon Samarinda secara konsisten melaksanakan fungsi monitoring, pemeriksaan stasiun radio, penanganan gangguan, penertiban dan tindak lanjut kepatuhan perangkat, pemeliharaan sarana monitoring, pelayanan sertifikasi operator radio, penanganan piutang BHP frekuensi radio, sosialisasi pelayanan publik, survei layanan, serta penguatan tata kelola anggaran dan pelaporan keuangan.

Pada tahun 2025, pengukuran kinerja Balmon Samarinda disesuaikan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan dan arah kebijakan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Capaian kinerja tahun 2025 diukur melalui 15 indikator kinerja, terdiri atas 13 indikator pada aspek kepatuhan dan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, dan layanan telekomunikasi, serta 2 indikator pada aspek tata kelola. Perubahan ini menunjukkan adanya penguatan fokus kinerja, antara lain melalui hadirnya indikator baru terkait penanganan sanksi denda administratif dan penyediaan data hasil pengukuran kualitas layanan, serta pemisahan indikator sosialisasi, survei kepuasan, dan survei integritas pelayanan publik.

Secara umum, capaian kinerja selama 2021–2025 menunjukkan bahwa Balmon Samarinda tidak hanya melaksanakan target tahunan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, pengguna frekuensi, pelaku usaha telekomunikasi, lembaga penyiaran, sektor maritim, komunitas amatir radio, dan pemerintah daerah. Melalui pengawasan spektrum yang berkesinambungan, penanganan gangguan yang responsif, penertiban penggunaan frekuensi dan perangkat ilegal, serta penguatan kualitas layanan publik, masyarakat memperoleh manfaat berupa layanan komunikasi yang lebih tertib, stabil, legal, aman, dan mendukung kebutuhan transformasi digital di Kalimantan Timur.

Berikut merupakan uraian dampak positif hasil kinerja selama tahun 2021–2025 berdasarkan 15 indikator kinerja tahun 2025:

1. MONITORING PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Selama tahun 2021–2025, kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan secara konsisten di seluruh 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Pada tahun 2025, monitoring, identifikasi, dan verifikasi pita penugasan kembali dilaksanakan di 10 kabupaten/kota, dengan capaian 100% terhadap target 80% kabupaten/kota atau persentase capaian 125%. Capaian ini menunjukkan bahwa Balmon Samarinda mampu menjaga kesinambungan pengawasan spektrum di wilayah kerja yang luas dan memiliki karakter geografis menantang.

Dampaknya, penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi lebih tertib dan terpantau. Masyarakat memperoleh manfaat berupa layanan komunikasi yang lebih stabil, baik untuk kebutuhan pribadi, pendidikan, pemerintahan, keselamatan, penyiaran, maupun aktivitas ekonomi. Monitoring yang berkelanjutan juga menjadi dasar penting dalam mendeteksi potensi gangguan, mengidentifikasi penggunaan frekuensi tidak sesuai ketentuan, serta mendukung pengambilan keputusan teknis dalam pengelolaan spektrum.

2. PEMERIKSAAN STASIUN RADIO

Pada periode 2021–2025, pemeriksaan stasiun radio terus dilaksanakan terhadap objek pengawasan seperti stasiun microwave link, stasiun radio siaran, dan stasiun televisi siaran. Pada tahun 2022, pemeriksaan mencapai volume tertinggi dengan 2.198 stasiun radio diperiksa, terdiri dari remote site microwave link, open shelter microwave link, radio siaran FM, dan televisi siaran digital. Pada tahun 2025, pemeriksaan terhadap stasiun microwave link dan stasiun siaran kembali mencapai 100% sesuai target.

Pemeriksaan teknis ini memastikan bahwa stasiun radio beroperasi sesuai izin, parameter teknis, dan standar emisi yang berlaku. Dampaknya, kualitas layanan siaran dan jaringan telekomunikasi menjadi lebih terjaga, risiko interferensi dapat ditekan, dan masyarakat memperoleh layanan komunikasi serta penyiaran yang lebih andal. Bagi lembaga penyiaran dan operator telekomunikasi, pemeriksaan ini juga memberikan kepastian teknis dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi.



3. PENANGANAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Selama tahun 2021–2025, Balmon Samarinda menangani dan menyelesaikan aduan gangguan spektrum frekuensi radio secara tuntas. Berdasarkan data tahunan, terdapat 13 aduan pada 2021, 11 aduan pada 2022, 16 aduan pada 2023, 8 aduan pada 2024, dan 4 aduan pada 2025. Dengan demikian, selama periode 2021–2025 terdapat 52 aduan gangguan yang ditangani, dengan capaian penyelesaian 100% pada setiap tahun.

Dampaknya sangat penting bagi keberlangsungan layanan strategis, terutama komunikasi penerbangan, keselamatan, keamanan, layanan publik, dan komunikasi masyarakat. Penanganan gangguan yang cepat dan tepat membantu mencegah terganggunya layanan vital, memperkuat kesiapsiagaan komunikasi pada kondisi darurat, serta meningkatkan kepercayaan pengguna layanan terhadap keandalan pengelolaan spektrum frekuensi radio di Kalimantan Timur.

4. TINGKAT KEPATUHAN STANDAR TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN DIGITAL

Pada tahun 2025, indikator ini mengukur tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital yang beredar atau digunakan di wilayah kerja Balmon Samarinda. Indikator ini merupakan salah satu indikator baru di tahun 2025, tetapi kegiatan pemantauan sudah dilaksanakan sejak tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan pemantauan kepatuhan pada tahun 2025 diarahkan pada perangkat prioritas, antara lain Handy Talkie (HT), wireless access point, WiFi extender, wireless repeater router, serta perangkat low power seperti wireless keyboard, True Wireless Sound (TWS), wireless microphone, bluetooth speaker, dan smart watch. Dari target kegiatan yang ditetapkan, Balmon Samarinda melaksanakan 10 kali kegiatan pemantauan di kabupaten/kota, dengan total 335 perangkat termonitor dan seluruhnya telah bersertifikat. Dengan capaian tersebut, realisasi indikator mencapai 100% dari target 75%, atau setara dengan 133,33% terhadap target kinerja.

Dampak dari indikator ini adalah meningkatnya kepastian bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang digunakan masyarakat maupun pelaku usaha telah memenuhi ketentuan standar teknis. Kepatuhan perangkat terhadap standar teknis penting untuk mengurangi risiko interferensi, menjaga keselamatan penggunaan perangkat, melindungi konsumen dari perangkat tidak sesuai ketentuan, serta mendukung ekosistem infrastruktur digital yang tertib, aman, dan andal.

5. TERJAGANYA OPERASIONAL DAN FUNGSI MONITORING DARI STASIUN MONITOR FREKUENSI RADIO DI UPT

Kinerja perangkat monitoring menjadi prasyarat utama dalam pengawasan spektrum frekuensi radio. Pada periode 2021–2024, perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur secara umum berada dalam kondisi berfungsi baik, antara lain 142 dari 146 perangkat pada 2021, 138 dari 140 perangkat pada 2022, 123 dari 130 perangkat pada 2023, dan 143 dari 148 perangkat pada 2024. Pada tahun 2025, pengukuran menggunakan SLA Stasiun Monitor menunjukkan capaian 95,42%, melampaui target 85%.

Dampaknya, Balmon Samarinda memiliki kapasitas teknis yang lebih andal dalam melakukan monitoring, deteksi, pengukuran, dan respons terhadap gangguan spektrum. Operasional perangkat yang terjaga mempercepat tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, memperluas jangkauan pengawasan, serta mendukung pengelolaan spektrum di wilayah Kalimantan Timur yang luas, termasuk daerah pesisir, kawasan industri, dan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.

6. PENANGANAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF

Pada tahun 2025, penanganan sanksi denda administratif menjadi indikator baru yang berdiri sendiri. Target indikator ini ditetapkan sebesar 80%. Selama tahun 2025 terdapat 32 invoice sanksi denda administratif, dengan 30 invoice telah terbayar, 1 invoice belum terbayar pada tahap reminder 3, dan 1 invoice belum jatuh tempo. Capaian indikator mencapai 99,06% atau 123,83% terhadap target.

Dampak dari indikator ini adalah meningkatnya efektivitas penegakan hukum administrasi di bidang spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi. Penanganan denda administratif mendorong efek jera, meningkatkan kepatuhan pengguna, serta memperkuat penerimaan negara dari sektor spektrum. Bagi masyarakat, hal ini mendukung terciptanya ekosistem komunikasi

yang lebih tertib, adil, dan bebas dari praktik penggunaan frekuensi maupun perangkat yang tidak sesuai ketentuan.

7. TERSEDIAINYA DATA HASIL PENGUKURAN KUALITAS LAYANAN

Tahun 2025 juga menambahkan indikator baru berupa tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan. Pengukuran dilakukan melalui kegiatan drive test dan static test terhadap layanan jaringan bergerak seluler di wilayah kerja Kalimantan Timur. Target indikator ditetapkan sebesar 100%, dan pada tabel capaian tahun 2025 indikator ini tercatat mencapai 125%.



Dampaknya, Balmon Samarinda tidak hanya berperan dalam pengawasan spektrum, tetapi juga mendukung tersedianya data objektif mengenai kualitas layanan telekomunikasi. Data hasil pengukuran ini bermanfaat bagi evaluasi kualitas jaringan, pengawasan terhadap penyelenggara layanan, identifikasi wilayah dengan kualitas layanan yang perlu ditingkatkan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk pemerataan konektivitas digital. Bagi masyarakat, indikator ini berkontribusi pada peningkatan kualitas akses komunikasi dan layanan data yang lebih andal.

8. PENYELENGGARAAN LAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (UNAR, MOTS-IKRAN)

Pada tahun 2025, layanan sertifikasi operator radio dirumuskan sebagai indikator gabungan yang mencakup UNAR berbasis CAT serta layanan MOTS-IKRAN/SRC/LRC. Selama 2021–2025, pelaksanaan UNAR berbasis CAT terus memberikan akses sertifikasi bagi masyarakat. Jumlah peserta UNAR tercatat 193 peserta pada 2021, 228 peserta pada 2022, 234 peserta pada 2023, 147 peserta pada 2024, dan 130 peserta pada 2025. Dengan demikian, selama 2021–2025 terdapat 932 peserta UNAR yang mengikuti layanan sertifikasi amatir radio.

Pada tahun 2025, UNAR dilaksanakan 12 kali dari target 6 kali pelaksanaan, sehingga capaian kegiatan UNAR mencapai 200%. Pada tahun yang sama, sertifikasi LRC dan IKRAN terlaksana 1 kali sesuai target. Secara keseluruhan, capaian indikator penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio mencapai 150%.

Dampaknya, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk memperoleh legalitas dan kompetensi sebagai operator radio. Operator amatir radio yang tersertifikasi dapat mendukung komunikasi alternatif di daerah blank spot, kawasan bencana, dan wilayah terpencil. Sementara itu, layanan MOTS-IKRAN/SRC/LRC memperkuat kompetensi komunikasi radio sektor maritim, mendukung keselamatan pelayaran, dan membantu nelayan menggunakan perangkat komunikasi secara legal serta sesuai ketentuan.

9. PELAKSANAAN PENANGANAN PIUTANG BHP FREKUENSI RADIO

Penanganan piutang BHP frekuensi radio terus dilaksanakan secara rutin selama periode 2021–2025 melalui penyampaian dokumen tagihan, pelaporan bulanan, koordinasi dengan KPKNL, serta pendampingan penagihan piutang. Pada 2023 dan 2024, Balmon Samarinda menindaklanjuti masing-masing 730 tagihan piutang. Pada 2025, penanganan dilakukan terhadap 704 tagihan piutang, dilaporkan dalam 12 laporan bulanan,



serta didukung koordinasi triwulanan dengan KPKNL sebanyak 4 laporan.

Dampaknya, pengelolaan PNBSP sektor spektrum frekuensi radio menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Penanganan piutang juga mendorong kepatuhan wajib bayar, memperkuat disiplin administrasi perizinan, serta memastikan potensi penerimaan negara dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan layanan komunikasi dan infrastruktur digital.

10. SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK

Pada 2025, sosialisasi pelayanan publik menjadi indikator mandiri yang terpisah dari survei pelayanan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara hybrid, baik online maupun offline, dengan jumlah peserta 144 orang, terdiri atas 75 peserta offline dan 69 peserta online. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sosialisasi pelayanan publik terus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perizinan, penggunaan spektrum frekuensi radio, kepatuhan perangkat, serta mekanisme pelayanan publik.

Selama 2022–2025, jumlah peserta sosialisasi yang tercatat mencapai sedikitnya 752 orang, yaitu 128 peserta pada 2022, 129 peserta pada 2023, 351 peserta pada 2024, dan 144 peserta pada 2025. Dampaknya,

masyarakat dan pemangku kepentingan memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai prosedur layanan, kewajiban perizinan, dan tata cara penggunaan frekuensi yang benar. Sosialisasi ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan spektrum serta mendorong budaya kepatuhan.

11. PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK (IKM/IPKP)

Pada tahun 2025, survei kepuasan pelayanan publik dipisahkan menjadi indikator mandiri melalui Indeks Kepuasan Masyarakat/Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IKM/IPKP). Pemisahan ini menunjukkan penguatan pengukuran kualitas pelayanan publik secara lebih spesifik, setelah pada tahun-tahun sebelumnya survei masih tergabung dalam indikator Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat.

Dalam periode 2022–2025, nilai IKM/IPKP Balmon Samarinda secara konsisten berada pada kategori sangat baik dan melampaui ambang target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, nilai IKM tercatat sebesar 3,89 pada skala 4,0 atau 97,25 pada skala 100 dengan 32 responden. Pada tahun 2023, nilai IKM sebesar 3,82 atau 95,5 pada skala 100 dengan 54 responden. Pada tahun 2024, nilai IKM kembali berada pada angka 3,82 atau 95,5 pada skala 100 dengan 61 responden. Pada tahun 2025, nilai IKM/

IPKP meningkat menjadi 3,91 pada skala 4,0 dengan 43 responden, atau mencapai 122,19% terhadap target nilai 3,2.

Dampaknya, Balmon Samarinda memiliki dasar evaluasi yang semakin kuat untuk memperbaiki standar layanan, meningkatkan kecepatan dan kejelasan informasi, memperkuat mekanisme pengaduan, serta memastikan layanan publik semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna. Konsistensi nilai IKM/IPKP yang tinggi selama beberapa tahun terakhir juga mencerminkan bahwa masyarakat menilai pelayanan Balmon Samarinda positif, baik dari sisi persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, kompetensi pelaksana, perilaku pelayanan, maupun sarana dan prasarana.

12. PELAKSANAAN SURVEI INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK (IIPP/IPAK)

Survei integritas pelayanan publik juga menjadi indikator mandiri pada tahun 2025 melalui Indeks Integritas Pelayanan Publik/Indeks Persepsi Anti Korupsi (IIPP/IPAK). Indikator ini penting karena mengukur persepsi masyarakat terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan, termasuk aspek diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur, penerimaan imbalan, pungutan liar, serta percaloan atau perantara tidak resmi.

Dalam periode 2022–2025, nilai IIPP/IPAK Balmon Samarinda juga menunjukkan hasil yang baik dan konsisten berada di atas target. Pada tahun 2022, nilai IIPP tercatat sebesar 3,81 pada skala 4,0 atau 9,54 pada skala 10, dengan nilai IPAK sebesar 3,82. Pada tahun 2023, nilai IIPP meningkat menjadi 3,84 pada skala 4,0 atau 9,60 pada skala 10. Pada tahun 2024, nilai IIPP kembali meningkat menjadi 3,87 pada skala 4,0 atau 9,68 pada skala 10. Pada tahun 2025, nilai IIPP/IPAK tercatat sebesar 3,86 pada skala 4,0 dengan 43 responden, atau mencapai 107,22% terhadap target nilai 3,6.

Dampaknya, Balmon Samarinda memperoleh umpan balik yang lebih terarah untuk memperkuat budaya pelayanan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Capaian nilai integritas yang stabil dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa layanan publik Balmon Samarinda tidak hanya dinilai baik dari sisi kualitas, tetapi juga dari sisi kepercayaan, keadilan layanan, dan pencegahan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip integritas pelayanan publik.

13. TINDAK LANJUT VERIFIKASI SITE ISR MICROWAVE LINK YANG TIDAK SESUAI (PRIMAAKSI)

Pada 2023 dan 2024, kegiatan verifikasi data koordinat site ISR microwave link dan penyiaran dilaksanakan di 5 kabupaten/kota pada 2023 dan 4 kabupaten/kota pada 2024. Pada tahun 2025, indikator ini berubah fokus menjadi tindak lanjut atas site ISR microwave link yang tidak sesuai melalui program PrimaAksi. Pada 2025 terdapat 33 link ISR yang tidak sesuai dari 3 operator seluler di wilayah Kalimantan Timur, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti sehingga capaian indikator mencapai 100%.

Dampaknya, akurasi data ISR microwave link meningkat dan potensi ketidaksesuaian koordinat, lokasi, maupun parameter teknis dapat dikurangi. Data site yang lebih akurat membantu meminimalkan interferensi, meningkatkan efisiensi penggunaan kanal, memperlancar proses perizinan baru, serta mendukung kualitas jaringan telekomunikasi yang lebih baik bagi masyarakat.

14. NILAI KINERJA ANGGARAN BALAI/LOKA TAHUN 2025

Selama 2021–2024, nilai kinerja anggaran Balmon Samarinda menunjukkan capaian yang baik, yaitu 88,90 pada 2021, 91,03 pada 2022, 90,18 pada 2023, dan 90,87 pada 2024. Pada tahun 2025, capaian Nilai Kinerja Anggaran tercatat sebesar 85,76. Penurunan ini dipengaruhi oleh perubahan nomenklatur kementerian serta peralihan dan penggabungan pengelolaan DIPA dari satker lama ke satker baru.

Meskipun capaian 2025 belum seoptimal tahun sebelumnya, pengelolaan anggaran tetap berjalan dan menjadi bagian penting dari akuntabilitas kinerja. Dampaknya, Balmon Samarinda tetap dapat menjaga pelaksanaan program prioritas, mengendalikan penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa belanja negara diarahkan untuk mendukung layanan pengawasan spektrum, penanganan gangguan, penertiban, sertifikasi, dan pelayanan publik.

15. NILAI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)

Indikator kualitas pelaporan keuangan UAKPA telah menjadi bagian dari pengukuran kinerja sejak 2023. Pada 2023 dan 2024, capaian UAKPA tercatat 100. Pada 2025, target nilai UAKPA ditetapkan 97 dan capaian mencapai 100 atau 103,09% terhadap target. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan tetap terjaga di tengah perubahan nomenklatur dan penyesuaian satuan kerja.

Dampaknya, tata kelola keuangan Balmon Samarinda semakin akuntabel, tertib, dan transparan. Pelaporan keuangan yang berkualitas memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran negara, memastikan kesesuaian administrasi keuangan, serta mendukung pelaksanaan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan pengguna layanan.

Pada periode 2021–2024, Balmon Samarinda melaksanakan indikator penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi untuk menindaklanjuti temuan ilegal menjadi berizin atau off air. Namun pada tahun 2025, indikator tersebut tidak lagi berdiri sebagai indikator kinerja mandiri. Fungsi penegakan tetap tercermin melalui pelaksanaan tugas penertiban SFR/APT dan indikator baru penanganan sanksi denda administratif.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Balmon Samarinda selama periode 2021–2025 menunjukkan kontribusi nyata dalam menjaga tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, meningkatkan kepatuhan penggunaan alat/perangkat telekomunikasi, memperkuat kualitas layanan publik, serta mendukung konektivitas dan transformasi digital di wilayah Kalimantan Timur. Berbagai kegiatan monitoring, pemeriksaan stasiun radio, penanganan gangguan, pengukuran kualitas layanan, sertifikasi operator radio, penanganan piutang, serta survei pelayanan publik telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, pengguna frekuensi, pelaku usaha, lembaga penyiaran, sektor maritim, dan pemangku kepentingan lainnya.





04

PENUTUP

Penutup

”

Tahun 2025 merupakan periode yang dinamis bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengawasan spektrum frekuensi radio dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta adanya perubahan nomenklatur kelembagaan yang berdampak pada penyesuaian proses kerja dan pengelolaan anggaran.

”

Secara umum, capaian kinerja Balmon Samarinda menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari 13 indikator kinerja pada sasaran program pengendalian spektrum serta 2 indikator pada aspek tata kelola, sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, seperti pada indikator layanan sertifikasi operator radio yang mencapai 150%, tingkat kepatuhan standar teknis perangkat yang mencapai 133,33%, serta beberapa indikator lainnya yang menunjukkan kinerja di atas 100%. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan serta pengawasan spektrum frekuensi radio.

Di sisi lain, terdapat indikator yang belum sepenuhnya mencapai target optimal, seperti Nilai Kinerja Anggaran, yang dipengaruhi oleh proses transisi akibat perubahan satker dan penggabungan pengelolaan DIPA lama dan baru. Meskipun demikian, capaian yang diperoleh tetap berada dalam kategori baik dan mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran tetap berjalan secara efektif dan akuntabel.

Capaian kinerja yang melampaui target pada beberapa indikator juga menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan penetapan target kinerja ke depan agar lebih realistis, terukur, dan mendorong peningkatan kualitas layanan, tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga dampak yang dihasilkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang. Dengan memanfaatkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Balmon Samarinda berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, serta memperkuat kualitas layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SAMARINDA



Jl. Sultan Sulaiman No. 55, Kel. Sambutan, Kec. Sambutan
Kota Samarinda, Kalimantan Timur - 75115
Telp.: 0541 - 241644 ; Fax.: 0541 - 241900